

ANALISIS PENANGANAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PESISIR
DI KELURAHAN KOTA BARU
KOTA TERNATE

Oleh :

M. Rachmat Hidayat Sosal

45 08 042 004



JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2012

ANALISIS PENANGANAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PESISIR
DI KELURAHAN KOTA BARU
KOTA TERNATE



Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota

Oleh :

M. Rachmat Hidayat Sosal

45 08 042 004

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2012

HALAMAN PENERIMAAN

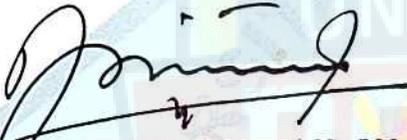
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar, Nomor : A. 147/SK/FT.U-45/XI/2012 Tanggal Rabu 21 November 2012 tentang **PANITIA DAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA PERENCANAAN WILAYAH dan KOTA**, maka :

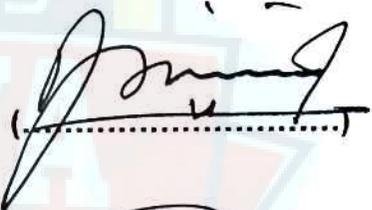
Pada Hari/Tanggal : **Kamis/ 06 Desember 2012**
Skripsi Atas Nama : **M. RACHMAT HIDAYAT SOSAL**
Nomor Pokok : **45 08 042 004**



Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar, setelah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1) pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar.

PENGAWAS UMUM


Prof. Dr. ABDUL RAHMAN, SH, MH
Rektor Universitas "45" Makassar


(.....)

TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Ketua : **Ir. RUDI LATIEF, M.Si**


(.....)

Sekretaris : **JUFRIADI, ST, M.Sp**


(.....)

Anggota : **DR. Ir. H. SYAHRIAR TATO, SH, MS, MH, MM**


(.....)

Ir. SYAFRI, M.Si


(.....)

Ir. NURDIN MONE, M.Sp


(.....)

Ir. SYAMSUDDIN, M.Si


(.....)

JAMALUDDIN JAHID, ST, M.Si


(.....)

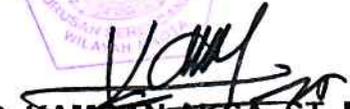
S. KAMRAN AKSA, ST, MT


(.....)

Disahkan
Rektor Universitas "45" Makassar

Diketahui:
Ketua Jurusann
Teknik Perencanaan Wilayah & Kota
Universitas "45" Makassar


Prof. Dr. ABDUL RAHMAN, SH, MH


S. KAMRAN AKSA, ST, MT

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS PENANGANAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PESISIR
DI KELURAHAN KOTA BARU KOTA TERNATE

NAMA MAHASISWA : M. RACHMAT HIDAYAT SOSAL

NO. STAMBUK : 45 08 042 004

FAKULTAS : TEKNIK

JURUSAN : PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

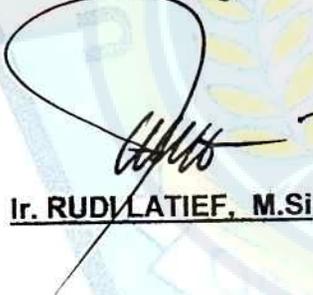
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Ir. Drs. H. SYAHRIAR TATO, SH, MS, MH, MM

Pembimbing II



Ir. RUDI LATIEF, M.Si

Pembimbing III



JUFRIADI, ST, M.SP

Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik
Universitas "45" Makassar



Ir. SYAFRI, M.Si

Ketua Jurusan
Perencanaan Wilayah Dan Kota



S. KAMRAN AKSA, ST, MT

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Rachmat Hidayat Sosal
Stambuk : 45 08 042 004
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Teknik
Universitas : "45" Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Desember 2012

Yang menyatakan

M. Rachmat Hidayat Sosal

ABSTRAK

M. Rachmat Hidayat Sosal. Analisis Penanganan Prasarana Lingkungan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir Di Kelurahan Kota Baru Kota Ternate (Dibimbing oleh ***Dr. Ir. H.Syahriar Tato, SH, MS, MH, MM, Ir. Rudi Latief, M.Si, Jufriadi, ST, M.Sp.***).

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengevaluasi penanganan prasarana kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Kota Baru Kota Ternate

Metode analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan instrumen pengambilan data melalui kuesioner, wawancara dan observasi. Populasi penelitian adalah semua kepala keluarga yang bermukim pada RW 04, 05, 06 di Kelurahan Kota Baru Kota Ternate.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penanganan prasarana jalan dikategorikan sangat baik, ketersediaan air minum dan MCK individu baik, ketersediaan prasarana MCK umum, persampahan dan drainase belum baik. Oleh karena itu disarankan (1) Pembangunan MCK umum (2) Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah dengan memperhatikan radius pencapaian dari masyarakat dan petugas kebersihan (3) pembangunan saluran drainase yang sesuai dimensi dan pada dua sisi jalan.

Kata Kunci : Penanganan, Prasarana lingkungan, permukiman kumuh



KATA PENGANTAR

**ANALISIS PENANGANAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PESISIR
DI KELURAHAN KOTA BARU
KOTA TERNATE**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS PENANGANAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PESISIR DI KELURAHAN KOTA BARU KOTA TERNATE”** yang diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas “45” Makassar. Tak lupa Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai Uswatun Hasanah serta pembawa akhlak yang mulia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini, banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi, namun atas bantuan dari berbagai pihak semua permasalahan itu dapat diatasi dengan baik seperti yang diharapkan. Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Bapak Dr. Ir. Drs. H. Syahriar Tato SH, MS, MH, MM** selaku dosen pembimbing I, **Bapak Ir. Rudi Latief, M.Si** selaku dosen pembimbing II, dan **Bapak Jufriadi, ST, M.Sp** selaku dosen pembimbing III yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis mulai dari persiapan penelitian hingga akhir penulisan.

Pada kesempatan lainpun banyak masukan dan bantuan moril yang didapatkan penulis, sehingga tak lupa ucapan terima kasih juga kepada pihak-pihak tersebut yang telah banyak membantu dalam rangka menyelesaikan skripsi ini, kepada :

1. Bapak **Ir. Syafri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Teknik, dan para Pembantu Dekan beserta seluruh staf Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar.
2. Bapak **S. Kamran Aksa, ST, MT** selaku Ketua Jurusan, **Jufriadi, ST. M.Sp** selaku Sekretaris Jurusan, serta semua Dosen dan Staf Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar.
3. Sujud Syukur penuh rasa terima kasih penulis haturkan buat ayahanda tercinta **Ramli Sosal, AMK** dan lbunda tercinta **Hj. Mariana Boina** yang telah mendidik dan selalu memberikan spirit serta motivasi bagi penulis hingga saat ini penulis mampu menyelesaikan bentuk pengabdian bagi masa depan dan tanggung jawab hidup.
4. Buat Adikku **Ichsan Felayati Sosal, Kak Audi Kamaru, Rendo** terima kasih untuk segala semangat doa dan cinta untuk penulis
5. Bapak **Walikota Ternate**, Bapak **Kepala BAPPEDA Kota Ternate**, Bapak **Kepala Pekerjaan Umum Kota Ternate**, Bapak **Kepala BPS Kota Ternate**, **Camat Kota Ternate Tengah** dan **Lurah Kelurahan Kota Baru** atas bantuannya selama penulis mengadakan penelitian di Kota Ternate.

6. Ucapan Terima Kasih buat sahabat seperjuanganku sekaligus keluarga kecilku angkatan 08 “sobat planologi” : **Bos Endry, Ardy Mbojo, Nyanda Fatmona, Galy, Adi Laloasa, Bams Geter, Malboro Menthol, L. Refra, Uny, Srie Imoet, Fivi, Ais, Subur, Fadly, Safruddin, Wahyudi M.DJ, Ashari, ahmad, Eren, Acho**, terima kasih atas bantuan dan motivasi yang diberikan selama kuliah.
7. Ucapan Terima Kasih buat keluargaku yang di lorong angkasa biru : **Big Bos Kak Adhie, Ibu Muli, Ipankk, Ichal**, terima kasih atas doa dan motivasi yang di berikan selama ini.
8. Ucapan Terima Kasih Buat Bundaku **“IBU CIA” dan Pak Jamal**, terima kasih atas semuanya.
9. Last Thankyou untuk **Iyan Wahdaniyah, SKM**. Makhluk Sensitif yang telah di titipkan ALLAH SWT tuk mewarnai setiap tetes tinta perjalanan kehidupan penulis

Kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sempat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa kiranya bernilai di sisi Sang Pencipta.

Untuk ini saran dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan penulis, demi kesempurnaan penulisan naskah dimasa-masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga segala bantuan dan bimbingan yang diberikan

kepada penulis diterima sebagai amal ibadah dan mendapat limpahan rahmat dan berkat dari Sang Ilahi.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati serta segala kekurangan, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna seperti yang diharapkan bersama namun mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukannya. Terima kasih....

Wassalam.....

Makassar, Desember 2012

UNIVERSITAS

BOSOWA

Penulis





DAFTAR ISI

**ANALISIS PENANGANAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PESISIR
DI KELURAHAN KOTA BARU
KOTA TERNATE**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.6 Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi Permukiman	8
2.2 Peranan dan Fungsi Permukiman.....	11
2.3 Peranan Pemerintah dalam Penanganan Permukiman Kumuh	12
2.4 Penerapan Program Perbaikan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir	14

2.5 Permukiman Kumuh	16
2.6 Konsep Lingkungan Permukiman yang ideal.....	19
2.7 Pembangunan Perumahan Bertumpu pada kelompok ...	21
2.8 Prasarana Lingkungan Permukiman.....	26
2.9 Urbanisasi dan Permukiman Kumuh.....	34
2.10 Kategori Permukiman Kumuh	39
2.11 Karakteristik Permukiman Kumuh.....	40
2.12 Bentuk-Bentuk Permukiman Kumuh.....	42
2.13 Tipologi dan Kriteria Permukiman Kumuh.....	44
2.14 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	
Permukiman Kumuh	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian	54
3.2 Lokasi Penelitian.....	54
3.3 Populasi dan Sampel.....	55
3.4 Jenis dan Sumber data.....	57
3.5 Teknik Pengumpulan data	58
3.6 Teknik Analisis data	58
3.7 Definisi Operasional.....	59
3.8 Kerangka Pikir.....	66

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi.....	67
4.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi.....	67

4.1.2 Topografi dan Kelerengan	72
4.1.3 Hidrologi dan Sumberdaya Air.....	72
4.1.4 Aspek Tata Guna Lahan.....	72
4.1.5 Kependudukan	74
4.1.6 Aspek Sarana dan Prasarana.....	79
4.2 Karakteristik Responden.....	88
4.3 Ketersediaan prasarana lingkungan permukiman di Kelurahan Kota Baru.....	91
4.4 Program penanganan prasarana lingkungan permukiman kumuh yang telah di lakukan di lokasi penelitian.....	115
4.5 Analisis penanganan prasarana terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh kawasan pesisir	120
4.6 Rencana Pengembangan Kebutuhan prasarana Tahun 2012 – 2030.....	125
4.7 Prasarana Lingkungan yang menjadi prioritas	126
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	128
5.2 Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

**ANALISIS PENANGANAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PESISIR
DI KELURAHAN KOTA BARU
KOTA TERNATE**



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pembagian sampel pada lokasi penelitian.....	56
Tabel 4.1	Luas Kelurahan Kota Baru Tahun 2011.....	67
Tabel 4.2	Jumlah penduduk Kelurahan Kota Baru Tahun 2011	74
Tabel 4.3	Pertumbuhan dan perkembangan penduduk Lima tahun terakhir di Kelurahan Kota Baru	75
Tabel 4.4	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kelurahan Kota Baru.....	76
Tabel 4.5	Jumlah penduduk menurut kelompok umur Di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011	77
Tabel 4.6	Penduduk menurut agama di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011.....	78
Tabel 4.7	Penduduk menurut tingkat pendidikan di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011.....	78
Tabel 4.8	Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum Di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011	79
Tabel 4.9	Fasilitas perumahan dan permukiman di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011.....	80
Tabel 4.10	Fasilitas perdagangan di Kelurahan Kota Baru tahun 2011.....	81
Tabel 4.11	Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011.....	81

Tabel 4.12 Jumlah fasilitas kesehatan	
di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011	82
Tabel 4.13 Jumlah fasilitas peribadatan	
di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011	83
Tabel 4.14 Jumlah fasilitas olah raga	
di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011	83
Tabel 4.15 Klasifikasi jaringan jalan	
di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011	84
Tabel 4.16 Jumlah pelanggan listrik	
di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011	85
Tabel 4.17 Jumlah jenis sambungan telepon	
di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011	86
Tabel 4.18 Jumlah pelanggan air minum	
di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011	86
Tabel 4.19 Jumlah prasarana persampahan	
di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011	87
Tabel 4.20 Jumlah responden menurut kelompok usia kerja.....	88
Tabel 4.21 Distribusi anggota keluarga yang tinggal dalam rumah .	89
Tabel 4.22 Tingkat pendidikan responden.....	89
Tabel 4.23 Mata pencaharian/pekerjaan responden.....	90
Tabel 4.24 Tingkat penghasilan responden.....	91
Tabel 4.25 Perbandingan antara panjang jalan lingkungan dan setapak dengan standar pelayanan minimum	92

Tabel 4.26 Perbandingan antara lebar badan jalan dan perkerasan jalan dengan standar pelayanan minimum	95
Tabel 4.27 Material perkerasan jalan.....	97
Tabel 4.28 Sumber air minum.....	98
Tabel 4.29 Kualitas air minum berdasarkan rasa.....	101
Tabel 4.30 Kualitas air minum berdasarkan bau.....	101
Tabel 4.31 Kualitas air minum berdasarkan warna.....	102
Tabel 4.32 Jumlah kepemilikan MCK di lokasi penelitian	103
Tabel 4.33 Perbandingan lebar dan tinggi/dalam drainase terhadap standar pelayanan minimum.....	113
Tabel 4.34 Kegiatan peningkatan kualitas lingkungan yang di laksanakan pada tahun 2005/2006 di Kelurahan Kota Baru	115
Tabel 4.35 Kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) Pada tahun 2007 di lokasi penelitian	117
Tabel 4.36 Kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) Pada tahun 2008 di lokasi penelitian	117
Tabel 4.37 Kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) Pada tahun 2009 di lokasi penelitian	117
Tabel 4.38 Kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) Pada tahun 2010 di lokasi penelitian	117
Tabel 4.39 Kegiatan <i>Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project</i> (NUSSP) pada tahun 2008 di Lokasi Penelitian	118

Tabel 4.40 Kegiatan <i>Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project</i> (NUSSP) pada tahun 2009 di Lokasi Penelitian	118
Tabel 4.41 Kegiatan <i>Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project</i> (NUSSP) pada tahun 2010 di Lokasi Penelitian	119
Tabel 4.42 Program PSD kawasan permukiman kumuh pada tahun 2008 di lokasi penelitian.....	119
Tabel 4.43 Program PSD kawasan permukiman kumuh pada tahun 2009 di lokasi penelitian.....	119
Tabel 4.44 Matriks penanganan dan manfaat yang terjadi dari prasarana lingkungan permukiman di Kelurahan Kota Baru.....	121
Tabel 4.45 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Di Kelurahan Kota Baru	125
Tabel 4.46 Pengembangan Kebutuhan Prasarana Drainase Di Kelurahan Kota Baru	126
Tabel 4.47 Pengembangan Kebutuhan Prasarana Persampahan Di Kelurahan Kota Baru	126
Tabel 4.48 Pengembangan Kebutuhan Kepemilikan MCK Di Kelurahan Kota Baru	126



DAFTAR GAMBAR

**ANALISIS PENANGANAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PESISIR
DI KELURAHAN KOTA BARU
KOTA TERNATE**





BAB 1

PENDAHULUAN

**ANALISIS PENANGANAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PESISIR
DI KELURAHAN KOTA BARU
KOTA TERNATE**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman kumuh merupakan permasalahan klasik yang sejak lama telah berkembang di kota-kota besar. Walaupun demikian hingga saat ini, permasalahan permukiman kumuh masih menjadi permasalahan bagi pengembangan suatu kota. Munculnya gejala permukiman kumuh erat kaitannya dengan perubahan struktur ekonomi dan laju perkembangan kota yang semakin pesat membuat pemanfaatan lahan yang semakin kompetitif, sedangkan di sisi lain perkembangan kota menjadi daya tarik urbanisasi yang pada akhirnya menyebabkan tingginya permintaan akan tempat tinggal di dalam kota.

Tingkat kemampuan ekonomi yang sangat rendah dari masyarakat dan keterkaitan yang tinggi dengan tempat mata pencaharian, menyebabkan berdirinya permukiman-permukiman masyarakat yang dipaksakan untuk berada di dalam kantong-kantong kota. Sejalan dengan itu kemampuan ekonomi yang rendah mengakibatkan pula masyarakat tidak dapat membenahi kondisi lingkungan dari kondisi yang substandar. Akumulasi kondisi ini mengakibatkan suburnya perkembangan kekumuhan di perkotaan.

Dalam perspektif penanganan pembangunan Kota Ternate tidak terlepas dari kesenjangan antara kota dan desa yang sering menimbulkan

gesekan–gesekan sosial, spatial dan kultur. Desa – desa mengungsikan penduduknya secara tak sadar ke Kota Ternate dengan tujuan untuk meningkatkan taraf penghidupan yang lebih layak dari silaunya lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Proses urbanisasi yang dimaksud tidak hanya terjadi di kota – kota besar secara umum, akan tetapi juga terjadi di Kota Ternate akibat perkembangan industrialisasi yang cukup pesat. Urbanisasi yang terjadi di Kota Ternate dalam dinamika perkembangan kotanya telah menempatkan hampir beberapa wilayah kawasan kota dengan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh. Dalam proses tersebut telah berimplikasi pada tingginya kepadatan penduduk yang secara tidak sadar telah mengakibatkan munculnya persoalan permukiman kumuh di Kota Ternate yang saat ini penanganannya diduga belum optimal.

Disamping pengaruh desakan urbanisasi, faktor kesediaan lahan juga sangat mempengaruhi terbentuknya kawasan permukiman kumuh karena lahan yang tersedia tidak cukup menampung jumlah penduduk yang ada serta tingginya nilai lahan untuk daerah perkotaan.

Kombinasi pesatnya penambahan penduduk yang semakin meningkat dan harga lahan yang tinggi menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dan pemenuhan rumah layak huni. Kesenjangan ini mengakibatkan berbagai masalah, seperti pembangunan rumah-rumah liar tanpa IMB yang akan mengganggu peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Masalah lingkungan permukiman kumuh hampir dapat dijumpai disetiap kota terutama kota-kota besar di Indonesia. Kota Ternate yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, tidaklah lepas dari permasalahan permukiman kumuh. Hampir semua kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Ternate memiliki kawasan permukiman kumuh yang lokasinya ada pada daerah pesisir pantai/sungai dan pusat kota.

Salah satu kawasan permukiman kumuh kawasan pesisir yang ada di Kota Ternate adalah di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah. Jumlah penduduk Kelurahan Kota Baru pada tahun 2007 sebesar 8.948 jiwa dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 11.078 jiwa dengan jumlah perkembangan penduduk selama 5 (lima) tahun tersebut sebesar 2130 jiwa atau rata-rata 118 jiwa tiap tahunnya. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan permukiman serta prasarana seperti sanitasi lingkungan yang diidentifikasi mengalami permasalahan, sehingga menjadi isu penting yang memerlukan penanganan secara optimal.

Sinulingga D.B. (1999:187) mengemukakan bahwa permukiman yang ideal harus memenuhi persyaratan antara lain lokasinya tidak terganggu oleh kegiatan yang dapat memberikan dampak pada pencemaran lingkungan, mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayan pendidikan dan kesehatan, perdagangan serta mempunyai fasilitas drainase, penyediaan air bersih, pembuangan air kotor/tinja, tempat pembuangan sampah, fasilitas umum seperti taman bermain, peribadatan, jaringan listrik dan telepon.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan Kota Baru, pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan pada kawasan ini tidak hanya melalui penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, juga diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha ekonomi dan sekaligus kegiatan pemberdayaan sosial kemasyarakatan.

Salah satu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam memperbaiki lingkungan permukiman kumuh kawasan pesisir ini adalah melalui program penanganan prasarana permukiman kumuh kawasan pesisir, dimana kegiatannya terdiri dari : pembuatan jalan lingkungan dan jalan setapak, pembuatan saluran drainase, prasarana persampahan dan penyediaan air minum, namun prasarana tersebut diduga masih menjadi permasalahan terhadap lingkungan permukiman kumuh kawasan pesisir di Kelurahan Kota Baru, oleh sebab itu peneliti akan mengetahui bagaimana penanganan prasarana lingkungan permukiman yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Bagaimana penanganan prasarana terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh kawasan pesisir di Kelurahan Kota Baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain adalah :

Untuk mengevaluasi sejauh mana penanganan prasarana terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh kawasan pesisir di Kelurahan Kota Baru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, antara lain adalah :

- a. Sebagai bahan masukan, informasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Ternate :
 1. Dalam upaya mengendalikan dan mengelola wilayah Pesisir di Kota Ternate.
 2. Dalam upaya penyediaan prasarana permukiman yang sesuai standar serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- b. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai permukiman di kawasan Pesisir.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Jenis prasarana lingkungan yang akan dianalisis dalam penelitian ini difokuskan pada penanganan prasarana lingkungan permukiman meliputi : jalan, air bersih, air limbah, persampahan dan drainase. Lokasi penelitian adalah permukiman kumuh kawasan pesisir di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate khususnya pada RW 04, RW 05 dan RW 06

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan penyusunan hasil penelitian yang dilakukan, maka sistematika yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat tentang : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan berbagai teori yang relevan dengan penelitian, yang meliputi teori tentang : Definisi Permukiman, Peranan dan Fungsi Permukiman, Peranan Pemerintah dalam Penanganan Permukiman Kumuh, Penerapan Program Perbaikan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir, Permukiman Kumuh, Konsep Lingkungan Permukiman yang ideal, Pembangunan Perumahan bertumbuh pada kelompok, Prasarana Lingkungan Permukiman, Urbanisasi dan Permukiman Kumuh, Kategori Permukiman Kumuh, Karakteristik Permukiman Kumuh, Bentuk-Bentuk Permukiman Kumuh, Tipologi dan Kriteria Permukiman Kumuh dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Permukiman Kumuh,

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang akan dilakukan, meliputi : Rancangan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Tekniks Analisis Data, Defenisi Operasional dan Kerangka Pikir

Bab IV menjelaskan tentang Analisis dan Pembahasan yang akan dilakukan, meliputi : Gambaran Umum Wilayah Studi, Kondisi Geografis dan Administrasi, Aspek Sarana dan Prasarana, Karakteristik Responden, Ketersediaan Prasarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Kota Baru, Program Penanganan Prasarana Lingkungan Permukiman Kumuh yang telah dilakukan di lokasi penelitian, Analisis Penanganan Prasarana terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh kawasan pesisir, rencana pengembangan kebutuhan prasarana, prasarana lingkungan yang menjadi prioritas.

Bab V Menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

**ANALISIS PENANGANAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PESISIR
DI KELURAHAN KOTA BARU
KOTA TERNATE**



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (UU no 1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman).

Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung penghidupan, sehingga fungsinya dapat di gunakan dengan sebagaimana mestinya.

Permukiman adalah suatu lingkungan hidup yang meliputi masalah lapangan kerja, struktur perekonomian dan masalah kependudukan yang bukan saja mencakup mengenai pemerataan dan penyebaran penduduk melainkan juga menyangkut kualitas manusia yang di harapkan pada generasi mendatang (Hardriyanto. D, 1986:17).

Menurut Soedarsono dalam Ridlo (2001 :19), "suatu kawasan permukiman lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan, kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan." Pengertian

permukiman menurut Sastra dan Marlina (2006:37) adalah suatu tempat bermukim manusia yang menunjukkan suatu tujuan tertentu.

Konsep permukiman menurut Daxiadis dalam Soedarsono (1986) adalah sebagai berikut : Permukiman adalah penataan kawasan yang dibuat oleh manusia dan tujuannya adalah untuk berusaha hidup secara lebih mudah dan lebih baik terutama pada masa kanak-kanak, memberi rasa bahagia dan rasa aman (seperti diisyaratkan oleh Aristoteles) dan mengandung kesimpulan untuk membangun manusia seutuhnya.

Permukiman menurut Vernor C. Vinch dan Glenn T. Trewartha dalam R. Bintaro (1977), menyatakan permukiman tempat kediaman penduduk adalah suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, dimana mereka membangun rumah-rumah, jalan dan sebagainya guna kepentingan mereka.

Batubara dalam Blaang (1986:16-17) merumuskan bahwa permukiman adalah suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional, ekonomis dan fisik, tata ruangnya dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana umum dan fasilitas sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan membudidayakan sumber daya dan dana, mengelola lingkungan yang ada untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia, memberi rasa aman, tenteram, nikmat, nyaman dan sejahtera dalam keserasian dan keseimbangan agar berfungsi sebagai wadah yang dapat melayani kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengelolaan disini dilihat sebagai usaha sadar dan sistematis, baik secara pribadi maupun secara bersama untuk mewujudkan suatu lingkungan yang dari segi estetika menyenangkan, dari segi ekonomi pantas, dan dari segi fisik menyehatkan.

Ada beberapa ketentuan untuk mewujudkan suatu permukiman yang baik menurut Sinulingga dalam Siti Umajah (2002:77), yaitu :

- a. Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain, seperti pabrik yang pada umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya.
- b. Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan perdagangan yang dapat dicapai dengan membuat jalan dan sarana transportasi di permukiman tersebut. Akses ini juga harus mencapai perumahan secara individual melalui jalan lokal.
- c. Mempunyai fasilitas drainase yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun hujan yang lebat sekalipun. Hal ini hanya mungkin jika sistem drainase di permukiman tersebut dapat dihubungkan dengan saluran pengumpul atau saluran utama dari sistem perkotaan.
- d. Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih berupa saluran distribusi yang siap disalurkan ke masing-masing rumah. Ada juga lingkungan yang belum mempunyai jaringan distribusi sehingga apabila ingin

membangun perumahan harus mengadakan pembangunan jaringan distribusi dulu atau mengadakan pengolahan air sendiri.

- e. Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor/tinja yang dapat dibuat dengan sistem individual seperti tangki septik dan lapangan rembesan ataupun tangki septik komunal.
- f. Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.
- g. Dilengkapi fasilitas umum, seperti taman bermain bagi anak-anak, lapangan atau taman, tempat ibadah, pendidikan dan kesehatan yang disesuaikan dengan skala besarnya permukiman.
- h. Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon.

2.2 Peranan dan Fungsi Permukiman

2.2.1 Peranan Permukiman

Keadaan permukiman pada umumnya mencerminkan dan menjadi salah satu ukuran taraf hidup suatu bangsa, peradaban dan kepribadian suatu bangsa. Dapat dikatakan bahwa permukiman/perumahan sebagai lingkungan hidup sehari-hari merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan jiwa dan pribadi seseorang, kesehatan dan prestasi kerja serta kesejahteraan seluruh keluarga. Dengan demikian rumah mempunyai arti yang sangat penting dalam pembinaan dan kepribadian bangsa.

2.2.2 Fungsi Permukiman

Permukiman adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia yang mempunyai sifat dan fungsi-fungsi tertentu. Fungsi permukiman tersebut adalah sebagai berikut :

- Rumah adalah tempat tinggal yang diperlukan oleh manusia untuk memasyarakatkan dirinya, suatu ketika akan melelahkan dan menghabiskan energi. Pemulihan kembali dilaksanakan baik dalam arti fisik maupun dalam arti psikis, selain itu didalam rumah pula manusia mendapatkan pendidikan dan pembentukan mental dalam memperkaya kehidupan budayanya.
- Rumah merupakan media antara manusia dengan dunianya, dengan metode ini maka terjadi suatu dialektif.

Rumah merupakan arsenal, dimana manusia mendapatkan kekuatan kembali, karya yang dilakukan sebagai hubungan dialektif antara manusia dengan dunianya. Selain itu juga rumah merupakan pusat kegiatan berbudaya bagi manusia baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen dalam mencapai

2.3 Peranan Pemerintah dalam Penanganan Permukiman Kumuh

Saat ini pemerintah melalui Departemen PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah berupaya untuk menangani permukiman kumuh perkotaan secara maksimal yang dilakukan melalui berbagai program, diantaranya :

1. Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan

Peningkatan kualitas permukiman untuk permukiman kumuh kawasan pesisir kategori ringan dan sedang, dilakukan dengan peningkatan kualitas prasarana permukiman seperti jalan setapak, saluran drainase dan prasarana air minum. Program ini juga dilakukan untuk prasarana permukiman di lingkungan Rumah Sederhana Sehat (RSH). Hingga saat ini telah dilakukan peningkatan kualitas prasarana dan sarana permukiman pada lingkungan RSH sebanyak 201.364 unit (Departemen Pekerjaan Umum).

2. Peremajaan Kota (Pembangunan Rusunawa)

Untuk menangani permukiman kumuh kawasan pesisir kategori berat dilakukan dengan upaya peremajaan kota dan pembangunan Rumah Susun Sederhana (Rusuna), khususnya pada lahan-lahan yang bernilai ekonomi tinggi dan berkepadatan penduduk tinggi di perkotaan. Hingga saat ini telah dilakukan pembanguana Rusunawa 12.672 unit yang tersebar di berbagai kota di Indonesia (Departemen Pekerjaan Umum).

3. Peningkatan Pelayanan Prasarana Permukiman Berbasis Masyarakat (Pamsimas/Sanimas)

Program pembangunan prasarana permukiman, khususnya untuk air minum berbasis masyarakat (Pamsimas) dilaksanakan di 110 kota yang mencakup 5000 kelurahan/desa. Program ini membangun prasarana air minum dengan basis pemberdayaan masyarakat serta pengembangan

kondisi sosial ekonomi penduduk setempat. Program ini juga menekankan capacity building untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan yang berprinsip bottom up development. Program Pembangunan Sanitasi berbasis Masyarakat (Sanimas) dilaksanakan di 206 lokasi yang mencakup 15.968 keluarga atau 75.203 penduduk. Program ini membangun prasarana sanitasi berdasarkan partisipasi masyarakat yang juga menekankan pentingnya capacity building masyarakat.

4. Pengentasan Kemiskinan (PNPM Mandiri/P2KP)

Salah satu upaya untuk mengurangi besaran permukiman kawasan pesisir perkotaan adalah melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja masyarakat perkotaan. Hal ini dilakukan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) yang bermanfaat bagi 14 juta keluarga dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebanyak 11% melalui penciptaan lapangan kerja baru.

2.4 Penerapan Program Perbaikan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir

Penerapan program perbaikan permukiman kumuh kawasan pesisir terpadu dimaksudkan untuk mengadakan pemusatan pembinaan pada kelompok-kelompok kelurahan secara bergilir yang difasilitasi oleh

pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam mengintegrasikan program-program perbaikan tersebut.

Perbaikan prasarana dan sarana fisik lingkungan tersebut akan menumbuhkan partisipasi masyarakat permukiman kumuh kawasan pesisir, baik partisipasi berupa tenaga maupun dana dan pikiran atau secara tidak langsung dalam bentuk pemeliharaan prasarana dan sarana di dekat rumah masing-masing dengan cara gotong royong, hal ini masih memungkinkan mengingat masyarakat yang tinggal dipemukiman kawasan pesisir sifat ini masih dijunjung tinggi (Budiharjo.E. 2002).

Salah satu usaha untuk menggalakkan partisipasi masyarakat adalah usaha melalui pembangunan masyarakat tersebut dengan keahlian, dorongan motivasi, latihan-latihan keterampilan, kegiatan-kegiatan percontohan atau bantuan pinjaman dana dengan maksud agar masyarakat kumuh dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan harapan agar kemudian mereka akan ikut memperbaiki lingkungan fisik dimana mereka tinggal. Jadi maksud usaha ini adalah untuk memperbaiki manusianya sebagai bagian dari masyarakat agar mereka tanggap dalam memperbaiki lingkungan sekitarnya.

Masyarakat yang dibangun pada umumnya akan sangat terdorong untuk memperbaiki lingkungannya, sehingga dengan demikian lingkungan permukiman kawasan pesisir itu akan diperbaiki secara keseluruhan, baik lingkungannya maupun orang – orangnya (Atmaprawira, 2004).

2.5 Permukiman Kumuh

Proses perkotaan atau urbanisasi adalah suatu gejala umum yang dialami oleh negara-negara yang sudah maju, demikian pula oleh negara – negara yang sedang membangun. Proses perkotaan di negara-negara yang sedang membangun berlangsung relatif pesat, karena daya penarik kota sangat kuat baik bersifat ekonomis maupun bersifat non ekonomis. Keadaan di daerah pedesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat dalam meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota besar.

Bagi kota yang mulai padat penduduknya, penambahan penduduk tiap tahun jauh melampaui penyediaan kesempatan kerja di dalam wilayahnya, sehingga dirasakan menambah berat tekanan permasalahan di kota-kota besar. Tekanan ekonomi dan keterdesakan akan tempat tinggal bagi kaum urban memaksa mereka untuk menempati daerah – daerah pinggiran (slum area), hingga membentuk lingkungan permukiman kumuh.

Kumuh atau slum, adalah permukiman orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di jalan atau lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan, juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan serta permukiman kumuh dianggap sebagai tempat anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi yang minim (Adisasmita, 2005).

Istilah permukiman kumuh (slum area) mengandung pengertian – pengertian pokok yang digunakan di dalam beberapa definisi yakni apatis, kelebihan penduduk, tidak mencukupi, tidak memadai, miskin, kurang, tidak berencana, bobrok, berbahaya, tidak aman, tua, kotor, di bawah standar, kurang mendapat perhatian dan tidak sehat.

Permukiman di lingkungan kumuh sebagai "kampung gembel" dengan ciri bangunan liar, di atas tanah yang tidak sah. Pengertian lingkungan permukiman kumuh secara umum di perkotaan menurut (Adisasmita, 2005), yakni :

a. Dari Segi Fisik

Pada umumnya ukuran persil dan tanah sempit serta di bawah standar dalam arti ratio luas ruang tempat tinggal per satu jiwa sangat rendah, pola penggunaan tanah tak teratur, letak dan bentuk bangunan tidak teratur, prasarana fisik lingkungan seperti air minum, drainase, air limbah dan sampah di bawah standar atau sama sekali tidak ada. Kesehatan lingkungan sangat rendah, kurang sempurnanya pembuangan air limbah rumah tangga dan sampah sehingga sering terkena wabah penyakit. Jaringan jalan internal yang tidak beraturan, kondisi bangunan pada umumnya terbuat dari material temporer atau semi permanen dan umumnya dalam keadaan kurang memenuhi syarat.

b. Dari Segi Sosial

Lingkungan yang dihuni oleh sejumlah penduduk yang padat dalam area yang terbatas. Mayoritas pendapatan penduduk rendah, tingkat pendidikan masyarakat rata-rata rendah, hubungan antara individu lebih menonjol kegotongroyongannya dibanding masyarakat kota lainnya.

c. Dari Segi Hukum

Sebagian besar kawasan kumuh umumnya terbentuk tanpa melalui prosedur perundang-undangan yang ada, hal ini disebabkan karena langka dan mahal nya tanah di perkotaan.

d. Dari Segi Ekonomi

Terdiri dari masyarakat dengan pola mata pencaharian yang heterogen, produktivitas kesehatan lingkungan rata-rata rendah, sektor perekonomian bersifat informal seperti : penarik becak, buruh, pedagang kaki lima. Tingkat keinginan menabung penduduk umumnya rendah karena tingkat pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perkampungan kumuh adalah bagian kota yang jorok, bangunanbangunanyang tidak memenuhi syarat dan kesehatan serta didiami oleh orang miskin dan fasilitas tempat pembuangan sampah namun fasilitas air bersih tidak memenuhi syarat kebersihan.

2.6 Konsep Lingkungan Permukiman yang Ideal

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya cenderung untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Hal ini terlihat dalam kecenderungannya untuk membangun rumah secara berkelompok dalam suatu lingkungan yang dinamakan permukiman.

Sinulingga. D.B. (1999 : 187) mengemukakan bahwa permukiman yang ideal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Lokasinya tidak terganggu oleh kegiatan yang dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya.
- b) Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan, perdagangan.
- c) Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air.
- d) Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih , berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah.
- e) Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor/tinja , yang dapat dibuat dengan sistem individual, yaitu tangki septik dan lapangan rembesen ataupun tangki septik komunal.
- f) Dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.

- g) Dilengkapi fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, tempat ibadah, pendidikan sesuai skala besarnya permukiman tersebut.
- h) Dilayani jaringan listrik dan telepon.

Komaruddin (1997) mengatakan rumah sehat harus memenuhi persyaratan penyehatan lingkungan, ketertiban dan keserasian lingkungan. Komponen lingkungan perumahan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat hendaknya dilengkapi sesuai dengan kebutuhan, antara lain penyediaan prasarana lingkungan yang memadai dan sesuai dengan jumlah penghuni, serta pengamanan lingkungan perumahan terhadap pencemaran (pemeliharaan sumber air bersih, pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga).

Budihardjo (1997), mengungkapkan bahwa permukiman memiliki dua fungsi, yaitu :

- a) Fungsi Pasif ; sebagai penyediaan sarana dan prasarana fisik.
- b) Fungsi Aktif; untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kehendak, aspirasi, adat dan tata cara hidup para penghuni dengan segenap dinamika perubahannya.

Lebih lanjut menurut Budihardjo, terdapat lima faktor utama yang saling berkaitan dan harus dijadikan pokok perhatian bagi tertib pembangunan, yaitu :

- a) Alam ; antara lain menyangkut tentang pola tata guna tanah, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, daya dukung lingkungan, serta taman atau area rekreasi/olah raga.
- b) Manusia ; menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan fisik/fisiologis, penciptaan rasa aman dan terlindung, rasa memiliki lingkungan, tata nilai dan estetika.
- c) Masyarakat ; menyangkut tentang partisipasi penduduk, aspek hukum, pola kebudayaan, aspek sosial ekonomi, kependudukan.
- d) Wadah/sarana kegiatan ; menyangkut tentang perumahan, pelayanan umum (puskesmas, sekolah), fasilitas umum (toko, pasar).
- e) Jaringan Prasarana ; antara lain menyangkut utilitas (air, listrik, air kotor), transportasi, komunikasi.

2.7 Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok

Pengertian yang tertuang dalam lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.06/KPTS/1994, pembangunan bertumpu pada komunitas adalah pembangunan yang mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utama, sehingga semua keputusan didasarkan atas aspirasi, kepentingan/kebutuhan, kemampuan dan upaya masyarakat. Masyarakat dalam hal ini menjadi titik tolak, sumber kekuatan wahana kerja sama dan sekaligus tujuan pembangunan itu sendiri sehingga berfungsi sebagai basis tumpuan untuk kemajuan anggotanya.

Menurut Johan Silas (dalam Rudi Yantono, 2000), pembangunan yang bertumpu pada komunitas secara umum dapat dikatakan bahwa

kemitraan dilakukan untuk mencapai nilai hasil akhir yang optimal dalam kerangka waktu tertentu bagi semua pihak serta dalam kewajaran.

Pola pembangunan perumahan bertumpu pada komunitas, pada prinsipnya menekankan pada nilai guna (*use Value*) dan mendudukan penghuni sebagai tokoh setral dalam seluruh proses merumahkan diri. Ringkasnya pembangunan bertumpu pada kelompok adalah pola pembangunan yang mendudukan masyarakat (individu/kelompok) sebagai pelaku utama dan penentu, dimana semua keputusan dan tindakan pembangunan di dasarkan pada aspirasi masyarakat, kepentingan masyarakat, kemampuan masyarakat dan upaya masyarakat (Parlindungan, A.P. ; 1997).

Dalam pengadaan permukiman terutama pada golongan menengah ke bawah perlu adanya bantuan dari pihak tertentu (pemerintah) sebagai modal awal dalam pendirian permukimannya, walaupun pemerintah sendiri mempunyai keterbatasan dalam sumber dan fasilitas.

1. Perumahan yang diadakan masyarakat

Konsep rumah terutama ditinjau dari sudut psikologi (Roske, Mildred Deyo, 1983:133 ; dalam Rudi Yantonó, 2000), diuraikan sebagai berikut :

- a. Rumah sebagai sarana untuk menjalin keakraban: Dalam konsep ini terwujud rasa kebersamaan, perhatian, keakraban dan keamanan. Rumah merupakan tempat bagi kejadian-kejadian yang melibatkan emosional dan merupakan pusat bagi kasih sayang keluarga dan

rekan-rekannya.

- b. Rumah sebagai identitas pribadi: Rumah merupakan simbol yang mencerminkan bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan apa yang kita harapkan untuk dilihat oleh orang lain dari diri kita. Jadi rumah merefleksikan nilai-nilai yang kita anut.
- c. Rumah sebagai kelangsungan hidup.
- d. Rumah sebagai tempat pribadi dan tempat untuk berlindung: Rumah merupakan tempat berlindung dari dunia luar. Rumah merupakan tempat yang bebas dari tekanan, tempat untuk beristirahat dan untuk mendapatkan kedamaian, kenyamanan dan keamanan.
- e. Rumah sebagai ekspresi pribadi: Makna yang terkandung dalam konsep ini adalah kemampuan untuk menciptakan kenyamanan yang bersifat pribadi. Pengaturan terhadap ruang, warna dan perlengkapan rumah merupakan perwujudan dari cita rasa pribadi yang menjadi aspek penting dalam pencapaian kepuasan terhadap rumah.

2. Pendekatan Partisipatif

Partisipatif berarti ikut ambil bagian atau ikut berperannya seseorang atau kelompok dalam suatu aktifitas, kegiatan atau program, dengan motif untuk mendapatkan nilai dalam skala tertentu (Ali Arifin, 1998:24 dalam Rudi Yantono, 2000).

Kata partisipasi dan partisipatoris merupakan dua kata yang umum digunakan dalam pembangunan. Tafsiran yang sangat beragam dapat disimak dalam uraian berikut (FAO, 1989):

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah membuat peka pihak masyarakat untuk meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok orang yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- d. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Ada tiga pendekatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan (Hasan Poerbo, 1996 dalam Rudi Yantonq, 2000), sebagai berikut:

- a. Pendekatan yang manipulatif, yaitu manusia dilihat sebagai obyek

dalam pengelolaan lingkungan (manusia dimanipulasi) atau merupakan perekrayaan sosial.

- b. Pendekatan berdasarkan pada potensi, di mana manusia sebagai unsur bebas dalam kreatifitas pemecahan masalah yang dilandasi oleh norma, persepsi dan kemampuan untuk mengembangkan kreatifitasnya.
- c. Pendekatan dari atas ke bawah untuk mengembangkan pranata guna memecahkan benturan dalam proses pembangunan lingkungan.

Manfaat dari pendekatan partisipatif (B. Chetkov dalam Rudi Yantono, 2000), adalah: a) Masyarakat memiliki rasa kebersamaan dan rasa ikut memiliki; b) Masyarakat ikut menyepakati norma-norma umum dan kelebagaannya; c) Ikut bertanggung jawab (terhadap diri sendiri dan pada orang lain); d) Masyarakat mau mengkoordinir seluruh kegiatan-kegiatan sosial dan rela menanggungnya bersama-sama.

Dari teori-teori yang dikemukakan, maka dapat di simpulkan, sebagai berikut: Dalam kaitan permukiman kumuh, yang dibangun dan dibentuk oleh masyarakat atau komunitas kumuh sendiri maka upaya-upaya pembenahannya harus menggunakan pendekatan partsipatif karena apapun hasilnya (yang oleh komunitas lain dinilai kumuh), adalah merupakan konsep mereka sendiri, karena merekalah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan dalam komunitas mereka, dan pada dasarnya pola-pola yang digunakan dalam membenahi permukiman mereka harus tetap mendudukan masyarakat mereka sebagai

pelaku utama dan penentu, dimana semua keputusan dan tindakan pembangunan didasarkan pada aspirasi, kepentingan, kemampuan dan upaya masyarakatnya guna memperbaiki lingkungannya sendiri menjadi lebih baik.

2.8 Prasarana Lingkungan Permukiman

Sinulingga. D.B. (1999:186) mengatakan bahwa secara garis besar lingkungan permukiman terdiri dari berbagai komponen, yaitu : Pertama, lahan atau tanah yang diperuntukan untuk permukiman, dimana kondisi tanah akan mempengaruhi harga dari satuan rumah yang dibangun diatas lahan tersebut; Kedua, prasarana lingkungan yaitu jalan lokal, jaringan air bersih, saluran air hujan, saluran air limbah dan tempat pembuangan sampah, yang kesemuanya sangat menentukan kualitas permukiman yang dibangun; Ketiga, yaitu perumahan (unit rumah) yang dibangun sebagai tempat tinggal; Keempat, fasilitas umum dan fasilitas sosial, yaitu termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, jaringan listrik dan telepon, serta taman bermain atau ruang terbuka dalam lingkungan permukiman tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan rumah sederhana sehat, maka kebutuhan infrastruktur untuk suatu lingkungan permukiman antara lain: 1) Prasarana lingkungan, meliputi: jalan, jaringan air bersih, saluran air limbah (MCK), saluran air hujan

(drainase), dan persampahan. 2) Sarana lingkungan, meliputi: fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas ekonomi.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan permukiman, prasarana lingkungan permukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang terdiri dari:

1. Jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur.
2. Jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan.
3. Jaringan saluran air hujan (drainase) dan pencegahan banjir setempat. Dalam keadaan tidak terdapat air tanah sebagai air bersih, jaringan air bersih merupakan prasarana dasar.
4. Utilitas umum, meliputi antara lain: air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi dan pemadam kebakaran.

Terdapat lima bentuk fasilitas yang perlu disediakan di suatu lingkungan permukiman, meliputi: penyediaan air bersih, penyaluran air kotor, pembuangan limbah padat atau sampah, drainase (saluran air hujan) dan jalan lingkungan (Koestoer dkk, 1995). Ke-5 fasilitas itu dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Prasarana Air Bersih

Berdasarkan Kepmenkes Nomor 907 / MENKES / SK / VII / 2002 persyaratan air bersih untuk kepentingan rumah tangga antara lain harus memiliki kualitas fisik (tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna). Menurut Kepmen Kimpraswil Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal, kebutuhan minimal air bersih bagi kawasan permukiman perkotaan adalah 60-220 liter/hari/orang.

Air bersih diperlukan terutama untuk memasak dan mandi, jumlahnya minimal sekitar 60 liter per orang per hari. Penyediaan fasilitas air bersih dapat dilakukan oleh pihak pemerintah/swasta berupa sambungan langsung ke rumah (SR) dan hidran umum (HU) atau keran umum. Bagi pemukiman di luar daerah pelayanan dapat menggunakan sumur air tanah dangkal. Masalah air bersih sangat terkait dengan penyakit kulit dan perut, sebagai akibat dari penggunaan air tidak bersih atau telah terkontaminasi bakteri *coli*. (Koestoer dkk, 2001).

2. Jaringan air limbah

Berdasarkan Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota (1997:6), disebutkan:

- a. Tangki septik adalah sebuah bak yang terbuat dari bahan yang rapat air berfungsi sebagai bak pengendap yang ditujukan untuk menampung kotoran padat untuk mendapatkan suatu pengolahan secara biologis oleh bakteri dalam waktu tertentu.

- b. Badan penerima adalah suatu fasilitas yang tersedia untuk menerima, mengalirkan atau menampung air buangan.

Menurut petunjuk Pelaksanaan PLPN-KIP (2001:25), disebutkan bahwa :

- a. Sumber air limbah rumah tangga dapat dibedakan atas air limbah yang berasal dari limbah cucian, air kamar mandi, dapur, dan air limbah yang berasal dari WC.
- b. Pada daerah yang tidak bisa ditangani dengan tangki septik (rawa dan di atas air) dapat ditangani secara khusus.
- c. Air limbah yang berasal dari bekas cucian, air kamar mandi dan dapur dapat dialirkan ke saluran air limbah lingkungan atau saluran penampung air limbah (SPAL).
- d. Setiap rumah sedapat mungkin disediakan WC, apabila tidak dimungkinkan, dapat disediakan WC/KM komunal (MCK) yang penempatannya mudah dicapai dan dekat dengan pengguna.
- e. Air limbah yang berasal dari WC, dan tidak mempunyai tangki septik dapat dialirkan ke saluran air limbah yang memenuhi standar Spesifikasi Plumbing Indonesia.
- f. Untuk kawasan yang memungkinkan dibangun tangki septik dapat dibangun pada tiap-tiap unit rumah atau sistem tangki septik bersama (komunal).
- g. Jarak minimum tangki septik terhadap sumur pompa minimal 10 meter.

h. Ukuran kapasitas tangki didasarkan pada jumlah orang yang dilayani, frekuensi pengambilan lumpur dan waktu pengendapan.

Ukuran besaran tangki septik dengan persyaratan: 1). Luas halaman cukup untuk bidang resapan; 2). Volume tangki septik minimal 1,5 m³; 3). Tinggi air dalam tangki minimal 1 m; 4). Tangki septik harus dibuat dari bahan rapat air; 5). Tutup tangki septik harus dilengkapi dengan lubang pemeriksa/bak kontrol berdiameter 45 cm kalau berbentuk persegi; 6). Ukuran lubang pemeriksa adalah 45 x 45 cm, pipa masuk terletak pada ketinggian minimum 2,5 cm lebih tinggi dari pipa keluar.

i. Sumur resapan dibuat sesuai dengan daya serap tanah.

Persyaratan MCK menurut Petunjuk pelaksanaan PLPK-KIP (2001:14) dan Petunjuk Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan Permukiman Kumuh di Perkotaan dan Pedesaan (2001:L2-7) adalah:

- a. MCK harus dilengkapi dengan penyediaan air bersih, pembuatan septick tank dan sumur peresapan.
- b. Satu jamban/unit dan satu kamar mandi/unit dapat melayani 12 KK atau 60 orang.
- c. 3 s/d 4 unit MCK Umum setiap kampung.
- d. MCK harus disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya pada daerah basah, kering dan sulit air.

3. Persampahan

Peningkatan mutu lingkungan bisa juga diawali dengan lingkungan perumahan yang bersih. Pada awalnya sampah harus dikelola oleh masing-masing rumah tangga. Sistem pembuangan sampah lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan tempat-tempat pembuangan sampah pada masing-masing unit rumah, dan tempat-tempat pembuangan sementara (TPS) yang berfungsi sebagai tempat pengumpul pembuangan sampah dari rumah tangga.

Dalam Pedoman Teknik Pembangunan Rumah Sederhana Tidak Bersusun (1986:21) disebutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah adalah :

a. Pengumpulan sampah

1). Fasilitas pengumpulan sampah Rumah Tangga

- a). Kapasitas min. $0,02 \text{ m}^3/\text{org}$
- b). Tempat sampah dibuat dari bahan rapat air
- c). Penempatan mudah dicapai petugas kebersihan dan tidak mengganggu lalu lintas.

2). Tempat pengumpulan sampah lingkungan

- a). Jarak penempatan tiap $\pm 150 \text{ m}$
- b). Kapasitas minimum $2 \text{ m}^3/200 \text{ rumah}$.

b. Pengangkutan sampah

- 1). Fasilitas pengangkutan dapat berupa gerobak dorong, becak, dan mobil pengangkut. Gerobak sampah 1 unit ($2 \text{ m}^3/2 \text{ ha}/120 \text{ rumah}$).

2). Jangka waktu pengangkutan maksimum 2 hari sekali, diusahakan setiap hari.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota (2001:14), disebutkan penampungan bak sampah $6 \text{ m}^3/2 \text{ ha}$, jarak dari tempat tinggal terdekat 50 - 100 m, dan diangkat 2 kali/minggu.

4. Drainase

Drainase berfungsi untuk menyalurkan air hujan, agar lingkungan perumahan bebas dari genangan air. Seringkali saluran ini dapat pula dimanfaatkan untuk pembuangan air limbah rumah tangga.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan saluran drainase antara lain:

- a. Ukuran saluran drainase ditentukan berdasarkan kapasitas volume air yang akan ditampung dan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah.
- b. Saluran ini dibangun pada kiri kanan jaringan jalan.
- c. Saluran drainase ini harus disesuaikan dengan sistem drainase yang lebih besar misalnya saluran sekunder.

Menurut Sinulingga (1999:226), saluran lokal yaitu saluran yang melayani permukiman pada tiap persil demi persil yang dapat berbentuk saluran terbuka atau tertutup. Untuk merencanakan dimensi masing-masing sistem diperlukan debit rencana banjir yang akan terjadi, yang

besarnya tergantung kepada curah hujan yang terjadi, karakteristik daerah aliran dan koefisien aliran permukaan.

Dalam Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana (1991:8) disebutkan juga ukuran saluran pembuangan sekurang-kurangnya :

- a. Lebar atas 30 cm
- b. Lebar bawah 20 cm
- c. Tinggi 30 cm.

Berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM, 2000), disebutkan bahwa standar pelayanan minimal panjang saluran air hujan adalah 120-250m/ha. Saluran drainase dari lingkungan perumahan dialirkan ke saluran penampung yang lebih besar kapasitasnya dan selanjutnya dialirkan ke sungai, danau, kolam, atau laut. Sehingga akan terkait dengan sistem drainase yang lebih kompleks yaitu sistem drainase kota.

5. Prasarana Jalan

Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1992, satuan-satuan lingkungan permukiman satu dengan yang lain saling dihubungkan oleh jaringan transportasi sesuai dengan kebutuhan dengan kawasan lain yang memberikan berbagai pelayanan dan kesempatan kerja. Dan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dalam skala lingkungan perumahan perkotaan dibutuhkan klasifikasi prasarana jalan lingkungan sekunder yang melayani angkutan permukiman dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Luas

jaringan jalan yang ideal untuk suatu kawasan perkotaan adalah 10%-30% dari total luas wilayah yang ada.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Perumahan dan Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota, rasio panjang jalan lingkungan terhadap luas wilayah adalah 40-60 m/ha dan lebar jalan lingkungan 3,5 meter - 5 meter, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk adalah 0,6 km/1000 penduduk, dan lahan yang disediakan untuk jalan minimal 5% dari total luas wilayah atau kawasan. Sedangkan untuk jalan setapak, rasio panjangnya terhadap luas wilayah atau kawasan adalah 50-100 m/ha dengan lebarnya 0,8 meter - 2,00 meter.

2.9 Urbanisasi dan Permukiman Kumuh

Telah sejak lama diketahui bahwa kawasan perkotaan memiliki daya tarik yang besar untuk datang dan menetap di kawasan ini. Kota diidentikan sebagai kawasan yang memiliki fasilitas yang lengkap dan tempat yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Anggapan kawasan perkotaan sebagai kawasan dengan fasilitas yang lengkap dan sebagai tempat yang mudah untuk mencari penghidupan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan akibat dari proses pembangunan yang telah terjadi selama ini. Pusat-pusat kegiatan dan sarana prasarana pendukungnya lebih terkonsentrasi dibangun di kawasan perkotaan dibandingkan di kawasan perdesaan. Keadaan ini menyebabkan lebih terkonsentrasinya

kegiatan ekonomi seperti manufaktur dan jasa perdagangan di kawasan perkotaan.

Urbanisasi menurut Gilber Alam (2007) adalah hasil dua kekuatan besar yaitu dorongan dari desa dan daya tarik ke kota. Dengan demikian arah perkembangan kota menunjukkan bahwa kota sebagai pusat pertumbuhan perekonomian. Namun dengan pertumbuhan kota ini sekaligus menjadi suatu masalah selama kota semakin besar.

Para pendatang yang berbondong-bondong datang dari pedesaan (urbanities) di Indonesia, dengan kondisi sosial ekonominya yang rendah, keterbatasan sumber daya (dana) kerap tidak mampu mengadakan rumah sendiri, terlebih dalam bentuk yang memenuhi kriteria layak huni, biasanya mengakibatkan tumbuhnya permukiman liar dan merosotnya kondisi hunian yang mereka tempati menjadi permukiman kumuh. Daya dukung perkotaan tidak mampu memenuhi kebutuhan urbanities, terutama dalam penyediaan fasilitas prasarana dan sarana perumahan.

Urbanities akan menempati dan mendirikan rumah di tanah yang tak bertuan, tanah-tanah yang belum dipergunakan atau pada lingkungan permukiman kumuh. Disamping penghasilan yang rendah, ketidakpastian status tanah yang ditempati, menjadikan penghuni ragu untuk memperbaiki rumahnya sehingga lingkungan permukiman kumuh tersebut makin memburuk.

Sedangkan (Trilisty, 1991 dalam Rudi Yantono, 2000) berpendapat bahwa tanah-tanah permukiman kumuh mempunyai tata guna tanah yang

tetap atau berbeda sesuai dengan perkembangan tata guna tanah kota yang dinamis dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Akibatnya terdapat beberapa tanah permukiman kumuh yang mempunyai nilai komersial yang menguntungkan dan strategis baik bagi pemerintah kota, swasta maupun bagi urbanities, terutama yang berhubungan dengan lapangan kerja dekat dengan pusat kegiatan kota, masih dalam radius jangkauan angkutan umum kota dan tanah tersebut sesuai dengan rencana peruntukan pengembangan tata ruang wilayah kota.

Selanjutnya, Yudohusodo (1991) mengemukakan bahwa masyarakat penghuni pada permukiman liar dan kumuh tersebut, sebenarnya telah menyesuaikan dirinya dengan kondisi permukimannya. Tidak mudah begitu saja mencabut mereka dari akar lingkungan yang kumuh itu, apalagi sudah ada generasi yang dilahirkan dan dibesarkan dari lingkungan tersebut.

Sementara itu, pemerintah kota juga berpacu dengan pertumbuhan permukiman liar dan kumuh yang makin banyak jumlah dan luasnya karena makin meningkatnya harga tanah dan rumah di perkotaan melebihi peningkatan penghasilan rata-rata masyarakat kota. Selain itu, pembangunan rumah secara mendatar sudah sangat sulit karena memerlukan lahan yang lebih luas. Walaupun pilihan yang tersedia sangat sedikit serta keterbatasan dana seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, pemerintah kota terus berupaya memperbesar daya dukung kota bagi urbanisasi yang terus meningkat.

Kata “kumuh” berarti cemar, jorok dan kotor. Konsekuensinya, kampung-kampung kota yang dikategorikan kumuh harus dilenyapkan dari pandangan mata (Budihardjo, 1996 : 106). Pendapat ini senada dengan Silas (1992) bahwa kumuh atau klumuh (Jawa) berarti kotor atau mengotorkan, yang mengandung potensi besar untuk memanusiaikan manusia dalam arti yang lebih luas.

Kawasan kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak teratur, rumah-rumah pada umumnya tidak layak huni, padat penghuni dan dengan prasarana dan sarana yang sangat minimal (Panudju B., 1998.). Kawasan ini dapat dibagi 2 jenis, yaitu :

1. Kawasan Kumuh Legal adalah kawasan permukiman yang dibangun diatas tanah/lahan milik mereka sendiri atau menyewa dari pemilik tanah atau lahan yang juga tinggal di kawasan tersebut, atau ditempati atas seijin/sepengetahuan pemilik lahan.
2. Kawasan Kumuh Ilegal adalah kawasan permukiman yang dibangun diatas lahan/tanah yang bukan milik mereka dan dalam menempati kawasan tersebut tidak memperoleh ijin menempati dari yang memiliki atau menguasai lahan tersebut. Kawasan seperti ini terdiri dari :
 - a. Kawasan di lahan-lahan kosong milik pribadi/swasta, yang oleh pemiliknya belum dibangun.
 - b. Kawasan di lahan-lahan milik publik, seperti di taman-taman kota, di daerah sempadan jalan raya, jalan kereta api, sungai dan perairan lainnya.

- c. Kawasan khusus yang umumnya dikuasai pemerintah, seperti di lahan kritis yakni bantaran sungai/laut, tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, di bawah jalur listrik tegangan tinggi, dan lain sebagainya.

Beberapa pakar lainnya (Rutz, 1987; Turner, 1972; Abrams, 1964; Trilistyo, 1991 dan Baros, 1980; dalam Rudi yantono, 2000), mendefinisikan permukiman kumuh sebagai 1) kawasan hunian masyarakat yang berpendapatan rendah dengan kondisi fisik kurang baik, 2) kampung kota dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali (kawasan ini kerap disebut slum atau squatter, 3) ditandai dengan sifat-sifat menonjol dari penghuni seperti sifat gotong royong sangat baik, tolong menolong sesama warga dan hubungan kekeluargaan yang baik dan 4) kampung kotor yang merupakan permukiman yang unik.

Dari beberapa teori di atas, dapatlah dirumuskan bahwa permukiman kumuh adalah suatu bentuk permukiman di daerah perkotaan yang spesifik di Indonesia dengan ciri, antara lain :

1. Penduduk masih membawa sifat dan perilaku kehidupan pedesaan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat.
2. Kondisi fisik bangunan dan lingkungan kurang baik dan tidak teratur.
3. Kerapatan bangunan dan kepadatan penduduk tinggi.
4. Prasarana dan sarana pelayanan dasar serba kurang seperti air bersih, saluran air limbah, drainase, pembuangan sampah dan sebagainya.

2.10 Kategori Permukiman Kumuh

Menurut Komarudin (1997:83) lingkungan permukiman kumuh didefinisikan sebagai lingkungan permukiman yang berpenghuni padat, kondisi sosial ekonomi rendah, jumlah rumah yang sangat padat dan ukurannya dibawah standar, prasarana lingkungan yang hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, dibangun di atas tanah negara atau tanah milik orang lain dan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Koestoer (2001:49), menyebutkan karakteristik permukiman kumuh yang paling menonjol terlihat dari kualitas bangunan rumah yang tidak permanen dengan kerapatan bangunan tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan yang terbatas, tidak adanya saluran drainase dan tempat pembuangan sampah sehingga terlihat jorok dan kotor.

Kawasan kumuh dapat dibedakan atas. (Petunjuk Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan Permukiman Kumuh di Perkotaan, 2001 : 7):

1. Kawasan kumuh di atas tanah legal (slums), adalah permukiman kumuh dengan segala ciri seperti tersebut di atas yang berlokasi di atas lahan yang peruntukannya memang perumahan.
2. Kawasan kumuh di atas tanah tidak legal (squatters), yaitu kawasan permukiman kumuh yang berada pada peruntukan yang bukan perumahan dalam RUTR, baik milik negara maupun milik perorangan atau Badan Hukum, yang dihuni secara tidak sah.

Berdasarkan kategori permukiman kumuh yang ada seperti uraian di atas, maka kawasan kumuh yang terdapat di Kelurahan Pampang sebahagian menempati tanah legal (slums) dan sebahagian lainnya menempati tanah illegal (squatters).

2.11 Karakteristik Permukiman Kumuh

Karakteristik permukiman kumuh yang paling menonjol terlihat dari kualitas bangunan rumah yang tidak permanen dengan kerapatan bangunan tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan yang terbatas, tidak adanya saluran drainase dan tempat pembuangan sampah sehingga terlihat jorok dan kotor (Koestoer, 2001:49).

Menurut Yudohusodo (1991), mengemukakan bahwa permukiman kumuh merupakan lingkungan perumahan yang mempunyai karakteristik, sebagai berikut :

1. Kondisi fisik lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan yaitu kurangnya atau tidak tersedianya prasarana, fasilitas dan utilitas lingkungan. Kalaupun ada kondisinya sangat buruk dan tata letak bangunan yang tidak teratur.
2. Kondisi bangunan yang sangat buruk serta bahan-bahan bangunan yang digunakan adalah bahan bangunan yang bersifat permanen.
3. Kepadatan bangunan dengan KDB yang lebih besar dari yang diizinkan, dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi (di atas 500 jiwa per Ha).

Subekti, 1984 (dalam Sumampouw, 2003), karakteristik lingkungan kumuh adalah :

1. Permukiman tersebut dihuni oleh penduduk yang padat dan berjubel, karena adanya pertumbuhan penduduk alamiah maupun karena migrasi yang tinggi dari pedesaan.
2. Perkampungan tersebut dihuni oleh penduduk yang berpenghasilan rendah atau yang memproduksi substansi dan hidup di bawah garis kemiskinan.
3. Perumahan di permukiman tersebut berkualitas rendah atau masuk dalam kategori kondisi rumah darurat (substandart housing condition), yaitu bangunan rumah yang terbuat dari bahan-bahan tradisional seperti bambu, kayu, alang-alang dan bahan-bahan cepat hancur lainnya.
4. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, ditandai oleh tersebarnya penyakit menular dan lingkungan fisik yang jorok.
5. Langkanya pelayanan kota (urban service) seperti air minum, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dan perlindungan kebakaran.
6. Pertumbuhannya tidak terencana sehingga penampilan fisiknya tidak teratur dan terurus dalam hal bangunan, halaman, jalan serta sempitnya ruang antar bangunan dan tidak ada ruang terbuka.
7. Penghuni permukiman miskin ini mempunyai gaya hidup pedesaan karena sebagian besar penghuninya merupakan migran dari

pedesaan yang masih mempertahankan pola kehidupan tradisional, seperti hubungan-hubungan yang bersifat pribadi dan gotong royong.

8. Secara sosial terisolasi dari permukiman masyarakat lainnya.
9. Perkampungan miskin ini pada umumnya berlokasi di dan pusat kota dan seringkali tak jelas status hukum yang ditempati.

Menurut Adisasmita (2005), permukiman kumuh dianggap sebagai tempat anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan atau yang pendapatan per bulannya rendah dan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi yang minim.

2.12 Bentuk-Bentuk Permukiman Kumuh

Menurut Johan Silas (1992), ada 3 bentuk dasar dari permukiman kumuh :

1. Oportunis

Bentuk permukiman ini memang dimaksudkan untuk mendapatkanpeluang memperoleh ganti rugi (uang) bila digusur oleh pemerintah atau oleh pemilik tanah yang ditempati oleh penghuni liar. Banyak penduduk dari desa yang berurbanisasi ke kota menjual rumah, sawah atau ternak mereka untuk membeli rumah di tempat kumuh yang sangat murah tetapi rawan digusur.

2. Mempunyai Tujuan

Bentuk ini lebih umum dan tersebar jumlahnya, yaitu untuk menetap. Bentuk ini ada yang berawal seperti bentuk Oportunis, sambil mendemonstrasikan kemampuan mereka membuat rumah sendiri, tanpa

bantuan apapun dan dari siapapun, namun mereka tak mampu mengadakan tempat yang layak dan benar.

3. Transitoris

Bentuk ini jumlahnya cukup besar dan dinamis, permukiman kumuh seperti ini agaknya untuk sementara masih diperlukan semua kota besar.

Ada tiga tipe penghuni tempat seperti ini :

- a. Migran sirkuler yang memang mencari tempat hunian yang sangat murah serta memberi peluang kerja yang besar agar dapat membawa pulang hasil kerja yang lumayan. Di dekat pasar atau terminal permukiman ini tumbuh subur, sebab lokalisasinya memberi peluang kerja yang menguntungkan.
- b. Permukiman cacat sosial, tetapi berniat dan mampu untuk menjadi normal kembali.
- c. Migran baru dari desa yang hendak menetap di kota, tetapi belum tahu dimana, dan mungkin juga belum punya modal, untuk bisa membeli rumah sendiri. Bagi mereka permukiman kumuh memberi harapan untuk mendapat pekerjaan yang optimal dengan biaya rumah yang minimal, sehingga ada kelebihan penghasilan yang cukup besar untuk ditabung, agar secepatnya mampu untuk membeli rumah sendiri. Umumnya tipe ini menjadi penyewa sekitar 3-5 tahun, lalu sudah punya rumah sendiri di desa pinggiran.

Dari ketiga bentuk permukiman kumuh yang dikemukakan di atas, maka bentuk permukiman kumuh yang terdapat di lokasi penelitian merupakan bentuk permukiman kumuh yang mempunyai tujuan.

2.13 Tipologi dan Kriteria Permukiman Kumuh

1. Tipologi Berdasarkan Kondisi Lingkungan Permukiman

Berdasarkan kondisi dan permasalahan lingkungan permukiman melalui pengamatan lapangan, tipologi kawasan permukiman kumuh dapat dibedakan dalam 7 (tujuh) tipe (Adisasmita, 2005). Masing – masing tipe memiliki karakter khas yang memberi corak kehidupan lingkungan permukiman tersebut. Ketujuh tipe permukiman kumuh tersebut adalah :

- a. Permukiman kumuh nelayan
- b. Permukiman kumuh dekat pusat kegiatan sosial-ekonomi
- c. Permukiman kumuh pusat kota
- d. Permukiman kumuh pinggiran kota
- e. Permukiman kumuh daerah pasang surut
- f. Permukiman kumuh daerah rawan bencana
- g. Permukiman kumuh tepian sungai.

a. Permukiman Kumuh Nelayan

Permukiman kumuh nelayan adalah permukiman kumuh yang terletak di luar area antara garis pasang tertinggi dan terendah, dengan

bangunan-bangunan yang langsung bertumpu pada tanah, baik itu bangunan rumah tinggal atau bangunan lainnya. Rata-rata lokasinya di tepi pantai.

b. Permukiman Kumuh Dekat Pusat Kegiatan Sosial-Ekonomi

Permukiman kumuh dekat pusat kegiatan sosial ekonomi adalah permukiman kumuh yang terletak disekitar pusat-pusat aktifitas sosial ekonomi, seperti halnya lingkungan industri, sekitar pasar tradisional, pertokoan, lingkungan pendidikan/kampus, sekitar obyek-obyek wisata, dan pusat-pusat pelayanan sosial-ekonomi lainnya.

c. Permukiman Kumuh Pusat Kota

Permukiman kumuh pusat kota adalah permukiman kumuh yang terletak di tengah kota (urban core), yang sebagai permukiman lama atau kuno atau tradisional. Permukiman yang dimaksud disini adalah permukiman yang dahulu merupakan permukiman yang diperuntukkan bagi hunian kalangan menengah ke bawah.

d. Permukiman Kumuh Pinggiran Kota

Permukiman kumuh pinggiran kota adalah permukiman kumuh yang berada di luar pusat kota (urban fringe), yang pada umumnya merupakan permukiman yang tumbuh dan berkembang di pinggiran kota sebagai konsekuensi dari perkembangan kota, perkembangan penduduk yang sangat cepat serta tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota yang sangat tinggi.

e. Permukiman Kumuh Daerah Pasang-Surut

Permukiman kumuh daerah pasang surut adalah permukiman kumuh yang terletak di daerah antara garis pasang tertinggi dan terendah yang secara berkala selalu terendam air pasang, dengan sebagian besar tipe bangunan yang ada, baik itu bangunan rumah tinggal maupun bangunan lainnya adalah tipe panggung. Jalan penghubung antara bangunan yang satu dengan yang lainnya adalah jalan titian. Karakter lain yang cukup menonjol adalah perletakan dermaga atau tempat menambat perahu yang berdekatan dengan perumahan.

f. Permukiman Kumuh Daerah Rawan Bencana

Permukiman kumuh daerah rawan bencana adalah permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

g. Permukiman Kumuh Tepian Sungai

Permukiman kumuh tepian sungai adalah permukiman kumuh yang berada di luar Garis Sempadan Sungai (GSS). Permukiman kumuh tepian sungai ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tipe, yaitu :

1. Apabila sungai yang bersangkutan mempunyai tanggul, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, lingkungan permukiman yang dimaksud terletak sekurang-kurangnya 5 (lima) meter sepanjang kaki

tanggul. Sedangkan untuk sungai tidak bertanggul, letak permukiman yang dimaksud berada di luar Garis Sempadan Sungai yang lebarnya ditetapkan oleh pemerintah setempat. Demikian juga permukiman untuk sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di wilayah perkotaan, letak permukiman yang dimaksud berada di luar garis sempadan sungai yang lebarnya ditetapkan oleh pemerintah setempat.

2. Lingkungan kumuh yang berada di kota-kota yang secara historis menempatkan sungai sebagai komponen prasarana yang sangat vital dan masih berlangsung sampai saat ini. Pada umumnya letak permukiman kumuh di kota-kota seperti ini berada di koridor tepian sungai. Karakteristik bangunan di lingkungan ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu tipe rakit, panggung, dan bertumpu langsung pada tanah. Unit-unit bangunan tipe panggung pada umumnya merupakan transisi antara bangunan tipe rakit dan yang bertumpu langsung pada tanah.

Berdasarkan ke tujuh tipologi permukiman kumuh yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian tergolong ke dalam kawasan permukiman kumuh yang terletak di pusat kota

2. Kriteria Permukiman Kumuh

Kriteria Permukiman Kumuh menurut Adisasmita (2005) dapat dibagi 3 (tiga) yaitu :

- a. Kumuh Biasa; adalah suatu lingkungan permukiman yang sistem tata ruangnya masih semrawut yang telah memiliki jalan lingkungan, fasilitas listrik dan air bersih, sedangkan drainasenya belum ada dan bangunan (rumahnya) sebagian masih berupa gubuk-gubuk dan belum tertata dengan baik.
- b. Kumuh Miskin; adalah suatu lingkungan permukiman yang sistem tata ruangnya masih semrawut dan jalan yang telah dimiliki masih berupa jalan rintisan (telah berbentuk badan jalan) dan berupa beraspal, fasilitas listriknya sudah ada, namun belum merata secara keseluruhan. Sedangkan fasilitas air bersih juga sudah tersedia dalam bentuk kran-kran umum berupa MCK (Mandi, Cuci dan Kakus), serta bangunan-bangunan yang ada sebagian besar masih dalam bentuk gubuk.
- c. Kumuh Melarat; adalah suatu lingkungan permukiman yang tidak layak di huni, lingkungannya masih merupakan rawa-rawa, jalan lingkungan tidak ada, fasilitas lainnyapun belum ada sedangkan bangunannya terdiri dari gubuk yang tidak layak huni.

Dari ketiga kriteria permukiman kumuh yang ada, maka permukiman kumuh yang terdapat di lokasi penelitian dapat dikategorikan sebagai kumuh biasa dan kumuh miskin.

2.14 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Permukiman Kumuh

1. Pendidikan

Pendidikan baik formal maupun informal sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan meningkatkan taraf hidup yang diinginkannya. Pendidikan merupakan bekal dalam kehidupan setiap manusia, karena melalui pendidikan yang cukup seseorang dapat merubah pola pikirnya untuk lebih maju dan berkembang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin mudah dan luas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta dengan sendirinya meningkatkan kehidupan seseorang.

Menurut Todaro (dalam Sumampouw, 2003), mengatakan mereka yang hanya memiliki pendidikan sekolah dasar atau kurang dari itu sangat sulit mendapatkan pekerjaan di kota. Pendidikan merupakan salah satu usaha mengadakan perubahan pada masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan melalui bangku sekolah. Wardiman (1994), mengatakan masyarakat yang mengalami proses pendidikan lebih luas cenderung mencapai pendidikan yang lebih tinggi diikuti pengetahuan yang banyak dan bervariasi dapat mengubah individu, dilihat dari aspek kehidupan masyarakat.

Teori pengembangan sumber daya manusia secara umum dapat dikemukakan, yakni mencakup semua usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan orang menjadi manusia seutuhnya maupun berfikir logis dan rasional serta mampu melaksanakan fungsinya.

Berdasarkan hal di atas dapatlah dikatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi untuk mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat, serta mempengaruhi tingkat kesejahteraan khususnya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak.

Pendidikan sangat berperan dalam usaha pembangunan dalam hal ini setiap permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan akan selalu melibatkan pendidikan atau dengan kata lain pendidikan sangat penting dalam setiap kegiatan pembangunan, karena melalui tenaga-tenaga pembangun sekaligus merupakan tuntutan yang benar-benar harus disadari dilaksanakan dan merupakan keharusan bagi setiap masyarakat karena dengan berpendidikan maka seseorang dapat hidup lebih layak.

2. Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud adalah baik pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan yang dilakukan untuk memperoleh hasil. Pekerjaan dapat mempengaruhi seseorang, dalam hal ini mencari tempat tinggal. Biasanya orang yang mempunyai pekerjaan yang baik cenderung tinggal ditempat yang baik pula, sedangkan yang tidak mempunyai pekerjaan atau pekerjaannya tidak menentu sulit untuk keluar dari permukiman kumuh.

Menurut Suroto, 1992 (dalam Sumampouw, 2003), pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan ingin memperolehnya, mereka dibagi atas beberapa faktor menurut kemampuannya sebagai berikut: a) Pengangguran suka rela menurut

penyebabnya, b) Pengangguran struktural menurut penyebabnya, dan c) Pengangguran Konjungtural yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim.

Pengangguran merupakan kerugian sosial karena mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan akan terbelenggu dengan kemiskinan sehingga sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak, rendah tingkat pendidikan yang dimiliki, mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap dengan upah yang maksimal.

Perbedaan jenis lapangan pekerjaan memiliki konsekuensi perbedaan imbalan dalam bentuk upah dan gaji diantara para pekerja, hal ini disebabkan jenis lapangan pekerjaan bertujuan untuk meningkatkan komoditi tertentu yang berbeda pula dengan imbalan lapangan pekerjaan lain sehingga secara langsung mempengaruhi tindak kehidupan terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal.

Kota memiliki perbedaan dengan daerah pedesaan, bukan berarti kota secara otomatis memberikan kesempatan kerja kepada para pencari kerja. Terbatasnya sektor formal, tidak memadainya kualifikasi yang dituntut oleh sejumlah pekerjaan di kota menyebabkan sektor informal menjadi berkembang dengan pesat.

3. Pendapatan

Pendapatan berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar fisiologis, sosiologis dan psikologis. Pendapatan adalah jumlah keseluruhan penghasilan dari pekerjaannya,

baik pekerjaan utama maupun pekerjaan sambilan. Tinggi rendahnya pendapatan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal atau tempat bermukim. Rendahnya tingkat pendapatan seseorang antara lain disebabkan karena lapangan pekerjaan yang dimasuki oleh kelompok masyarakat mendapatkan penghasilan, dengan bekerja disektor informal tidak banyak diharapkan untuk bisa memberikan penghasilan yang pasti, rutin dan banyak.

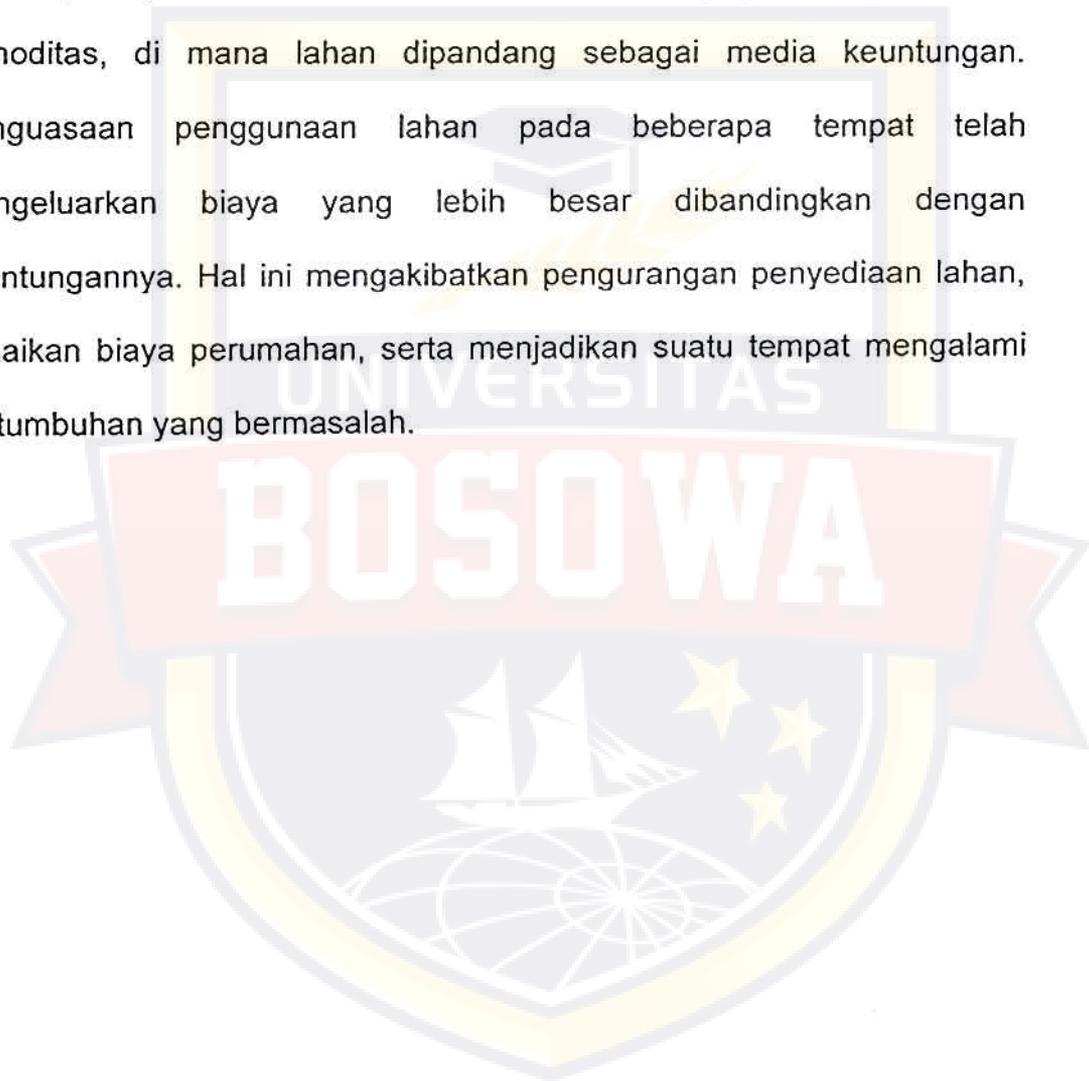
Pendapatan yang diperoleh setiap kepala rumah tangga dari hasil kegiatannya setiap bulan, biasanya ada porsi tertentu yang ditabung dan ada porsi tertentu pula yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya yang paling pokok. Dalam ekonomi kota, kebutuhan yang paling pokok ini dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup, baik yang terdiri dari kebutuhan individu (makan, perumahan, dan sandang) maupun keperluan pelayanan sosial tertentu (air bersih, listrik, sanitasi, kesehatan, pendidikan dan transportasi). Untuk mengukur tingkat pendapatan dilakukan dengan mengukur tingkat besarnya pengeluaran dibandingkan dengan pendapatannya.

4. Perumahan dan Nilai Lahan

Perumahan sebagai bagian atau yang berada di dalam daerah perkotaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal individu, keluarga, kelompok masyarakat. Menurut (Dudung, 2000 dalam Rudi Yantono, 2000), rumah merupakan institusi budaya, bukan saja sebagai hasil kegiatan manusia, tetapi juga karena peranannya sebagai tempat dalam

menampung, menyalurkan, mengembangkan usaha dan langkah menuju perbaikan taraf hidup.

Manfaat lahan sebagai ruang kehidupan dari hidupnya, yang dalam hal itu pola perilaku manusia itu berada. Lahan juga sebagai barang komoditas, di mana lahan dipandang sebagai media keuntungan. Penguasaan penggunaan lahan pada beberapa tempat telah mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungannya. Hal ini mengakibatkan pengurangan penyediaan lahan, kenaikan biaya perumahan, serta menjadikan suatu tempat mengalami pertumbuhan yang bermasalah.





BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

**ANALISIS PENANGANAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PESISIR
DI KELURAHAN KOTA BARU
KOTA TERNATE**



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis, cermat dan akurat mengenai fenomena sosial tertentu berupa fakta-fakta, keadaan, sifat-sifat suatu individu atau kelompok, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Ternate, tepatnya pada permukiman kumuh kawasan pesisir yang ada di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate yang dibatasi pada 3 (Tiga) RW (04, 05 dan 06).

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini, disebabkan karena:

- 1) Permukiman kumuh kawasan pesisir yang ada di Kelurahan Kota baru tumbuh dan berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan jumlah penduduk sebagai konsekuensi dan perkembangan kota.
- 2) Permukiman kumuh kawasan pesisir yang ada di Kelurahan Kota Baru berada pada RW 04, RW 05 dan RW 06.

Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal Juni 2012 sampai dengan Agustus 2012.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Definisi dari populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang ingin diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga (KK).

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa lokasi penelitian permukiman kumuh kawasan pesiri yang ada di Kelurahan Kota Baru terdapat pada RW 04, RW 05 dan RW 06, dengan jumlah penduduk secara keseluruhan RW sebanyak 11.078 jiwa dan jumlah KK sebanyak 1.148 KK.

3.3.2 Sampel

Menurut Arikunto (1998), sampel merupakan bagian atau wakil populasi yang diteliti. Bila populasi lebih besar dari 100, maka besarnya sampel dapat ditentukan 10-15 % atau 20-25 %.

Dalam penelitian ini, wakil atau bagian dari populasi yang menjadi responden adalah kepala keluarga (KK) menurut Sudjana N. (1992 ; 165), bahwa sampel yang mempunyai populasi yang heterogen, maka besaran sampel antara 15 – 20% dari jumlah populasi. Sedangkan menurut Sugiyono (2004 ; 65) apabila populasi bersifat homogen, maka jumlah sampel yang diperlukan 1% saja sudah mewakili. Untuk mengefisiensi penelitian, maka sampel ditetapkan secara proporsional dengan menggunakan rumus matematis;

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1}$$

Dimana ;

n = Jumlah sampel yang diambil

N = Jumlah penduduk dan KK di daerah penelitian

d = Derajat Kebebasan (15 – 20%)

Berdasarkan jumlah penduduk lokasi penelitian tahun 2011 yaitu 11.078 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.148, maka jumlah sampel yang diambil dilokasi penelitian berdasarkan rumus di atas yaitu sebanyak 52 KK, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pembagian Sampel Pada Lokasi Penelitian

No.	Lokasi	Populasi (Jiwa)	Kepala Keluarga (KK)	Sampel (KK)
1	RW 04	3387	374	25
2	RW 05	2530	345	12
3	RW 06	5161	429	15
Jumlah		11.078	1.148	52

Sumber: Data Hasil Olahan, Tahun 2012

Sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*) dengan pertimbangan populasi dianggap homogen ditinjau dari latar belakang sosial ekonomi dan dari segi fisik lingkungan yaitu dengan melihat nomor urut nama semua kepala keluarga mulai dari 1 sampai dengan banyaknya subyek. Kemudian nomor subyek tersebut dirandom sesuai dengan banyaknya sampel yang dibutuhkan, sehingga dapat memberi hak yang sama kepada setiap subyek (Kepala Keluarga) untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel

3.4 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Kualitatif : adalah jenis data yang tidak berupa angka tetapi berupa kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian atau data yang tidak bisa langsung diolah dengan menggunakan perhitungan matematis, yang termasuk dalam jenis data kualitatif ini yaitu :
 - a. Kondisi fisik wilayah studi (Kelurahan Kota Baru) Kecamatan Ternate Tengah.
 - b. Data mengenai prasarana lingkungan permukiman
 - c. Data Pola Penggunaan Lahan, Kondisi Sosial Masyarakat, kondisi ekonomi serta kondisi kultur dan budaya
 - d. Data mengenai tanggapan masyarakat mengenai penanganan prasarana lingkungan permukiman kumuh kawasan pesisir
2. Data Kuantitatif : adalah jenis data yang berupa angka atau numerik yang bisa langsung di olah dengan menggunakan metode perhitungan matematis, yang termasuk dalam jenis data kuantitatif ini yaitu :
 - a. Data jumlah penduduk, Kepadatan penduduk serta mata pencaharian di wilayah studi (kelurahan kota baru) Kecamatan Ternate Tengah.
 - b. Data Status Kepemilikan tanah
 - c. Program P2KP, Program NUSSP
 - d. Dan program pembangunan lainnya yang ada di lokasi penelitian

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian baik data primer maupun data sekunder, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dokumen, yaitu mengumpulkan data sekunder dari instansi terkait serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Observasi, yaitu teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan melalui observasi langsung pada lokasi penelitian.
3. Wawancara (interview), yaitu teknik yang dipergunakan untuk memperoleh informasi dan informan secara mendalam guna melengkapi data hasil kuesioner.
4. Dokumentasi, yaitu merekam kondisi eksisting di lapangan secara visual dalam bentuk gambar atau foto-foto.

3.6 Teknik Analisis Data

Terhadap rumusan masalah pertama adalah penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan teknik analisis penjelasan secara mendalam dengan tabulasi dan membandingkan terhadap NSPM dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta menggunakan metode analisis proyeksi penduduk bunga berganda.

RUMUS :

$$P_t = P_n (1 + r)^n$$

Ket :

P_t	: Σ Tahun akan datang
P_n	: Σ Tahun Awal
r	: Rata-rata Pertumbuhan
n	: Σ Tahun Proyeksi

3.7 Definisi Operasional

Berikut ini beberapa defenisi yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. **Penanganan** adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.
2. **Permukiman** adalah suatu tempat bermukim bagi kelompok manusia yang dapat memberikan kenyamanan hidup.
3. **Kawasan Kumuh** adalah kawasan permukiman yang tidak teratur, tidak layak huni dan padat penghuni serta minim prasarana dan sarana.
4. **Prasarana** adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman (UU No. 1 Tahun 2011, tentang perumahan dan permukiman).
5. **Lingkungan** adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berWawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya (UU No 23 Tahun 1997, Tentang lingkungan hidup).

6. **Lingkungan hunian** adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman (UU No. 1 Tahun 2011, tentang perumahan dan permukiman).
7. **Kawasan permukiman** adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU No. 1 Tahun 2011, tentang perumahan dan permukiman).
8. **Kawasan** adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya (UU No 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil).
9. **Pesisir** adalah pertemuan antara perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah

perairan kepulauan, (UU No 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil).

10. Jaringan jalan adalah susunan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya.

11. Jaringan Air Bersih adalah jaringan pipa saluran air yang mengalirkan air bersih ke rumah-rumah yang dilayaninya.

12. Saluran Pembuangan Air Limbah adalah saluran untuk mengalirkan air buangan (air bekas dan air kotor).

13. MCK adalah prasarana untuk aktifitas mandi, cuci, dan kakus.

14. Prasarana Persampahan adalah wadah atau tempat membuang sampah yang bersifat padat atau setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari aktifitas manusia, hewan maupun tumbuhan.

15. Drainase atau saluran pembuangan adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan, agar lingkungan bebas dari genangan air.

16. Sosial Ekonomi adalah hal yang berkaitan dengan faktor sosial maupun ekonomi seperti angkatan kerja, tenaga kerja, pengangguran, mata pencaharian dan upah.

17. Prasarana Lingkungan Permukiman

Adapun variabel prasarana dasar lingkungan permukiman yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari 5 variabel yang meliputi : air minum, air limbah, persampahan, drainase, dan jalan.

a. **Prasarana Air Minum** yang dimaksud adalah dari PDAM (SR dan HU) dan sumur, dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Sumber air minum dari PDAM (lapangan), diukur dengan kategori :
 - a. Baik, jika 76-100% responden menggunakan air minum
 - b. Cukup baik, jika 50-75% responden menggunakan air minum.
 - c. Buruk, jika < 50% responden menggunakan air minum.
- 2) Kepemilikan sambungan rumah (lapangan), diukur dengan kategori :
 - a. Baik, jika 76-100% sudah memiliki sambungan rumah.
 - b. Cukup baik, jika 50-75% sudah memiliki sambungan rumah.
 - c. Buruk, jika < 50% sudah memiliki sambungan rumah.
- 3) Jarak antara tempat tinggal dengan hidran umum atau sumber air dari sumur (standar 50-100m), diukur dengan kategori :
 - a. Memenuhi, jika jarak < 50 meter
 - b. Cukup memenuhi, jika jarak 50,1-100 meter
 - c. Tidak memenuhi, jika jarak > 100 meter
- 4) Kontinuitas air bersih, diukur dengan kategori :
 - a. Baik, jika air mengalir 24 jam sehari (sepanjang hari).
 - b. Cukup baik, jika air mengalir 6-12 jam sehari.
 - c. Buruk, jika air mengalir tidak menentu.

b. Prasarana Air Limbah

Prasarana air limbah yang dimaksud adalah MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yakni tempat untuk mencuci, mandi dan buang air, baik berupa MCK umum maupun MCK individu, dengan indikator sebagai berikut :

1. Kepemilikan MCK rumah tangga (lapangan), diukur dengan kategori :
 - a. Baik, jika 76-100% responden memiliki MCK sendiri.
 - b. Cukup baik, jika 50-75% responden memiliki MCK sendiri.
 - c. Buruk, jika < 50% responden memiliki MCK sendiri.
2. Ketersediaan MCK umum (lapangan), diukur dengan kategori :
 - a. Baik, jika kondisi MCK masih difungsikan dengan baik.
 - b. Cukup baik, jika kondisi MCK masih layak.
 - c. Buruk, jika kondisi MCK rusak dan sudah tidak difungsikan lagi.
3. Ketersediaan sistem pengolahan limbah/tangki septik (lapangan) :
 - a. Baik, jika 76-100% memiliki tangki septik.
 - b. Cukup baik, jika 50-75% memiliki tangki septik.
 - c. Buruk, jika < 50% memiliki tangki septik.

c. Prasarana Persampahan

Prasarana persampahan yang dimaksud adalah bagaimana ketersediaan dan sistem pembuangan sampah yang ada saat ini baik di tiap hunian maupun di dalam lingkungan, dengan indikator sebagai berikut :

1. Jarak pencapaian ke TPS (standar 500-1.000m), diukur dengan kategori:
 - a. Sangat memenuhi, jika jarak TPS dengan hunian < 1.500m.
 - b. Memenuhi, jika jarak TPS dengan hunian 500-1.000m.
 - c. Tidak memenuhi, jika jika jarak TPS dengan hunian > 1.000m.

2. Ketersediaan tempat sampah di lingkungan (standar volume $3\text{m}^3/\text{ha}$ dan tiap-tiap jarak 1.500 meter), diukur dengan kategori :
 - a. Memadai, jika tersedia TPS sesuai standart.
 - b. Cukup memadai, jika volume saja yang sesuai standar.
 - c. Tidak memadai, jika volume dan jarak tidak sesuai standar.
3. Frekuensi pengangkutan sampah dari rumah ke TPS (standar 2 kali/minggu), diukur dengan kategori :
 - a. Sangat memenuhi, jika pengangkutan dilakukan setiap hari.
 - b. Memenuhi, jika pengangkutan dilakukan 2 kali/minggu.
 - c. Tidak memenuhi, jika pengangkutan dilakukan 1 kali/minggu.
4. Ketersediaan tempat sampah di masing-masing rumah (lapangan), diukur dengan kategori :
 - a. Tinggi, jika 76%-100% responden memiliki tempat sampah.
 - b. Sedang, jika 50%-75% responden memiliki tempat sampah.
 - c. Rendah, jika < 50% responden memiliki tempat sampah.

d. Prasarana Drainase

Prasarana drainase (saluran air hujan) yang dimaksud adalah saluran lokal yang terdapat di depan unit hunian. Indikatornya sebagai berikut :

1. Panjang saluran (standar 120-250m/ha):
 - a. Sangat memenuhi, jika panjang saluran > 250m/ha.
 - b. Memenuhi, jika panjang saluran 120-250m/ha.
 - c. Tidak memenuhi, jika panjang saluran < 120m/ha.

2. Kondisi aliran air (lapangan), diukur dengan kategori:
 - a. Baik, jika kondisi saluran baik dan air mengalir lancar.
 - b. Cukup baik, jika sebagian rusak ringan dan agak tersumbat.
 - c. Buruk, jika kondisi rusak berat dan air tidak mengalir.

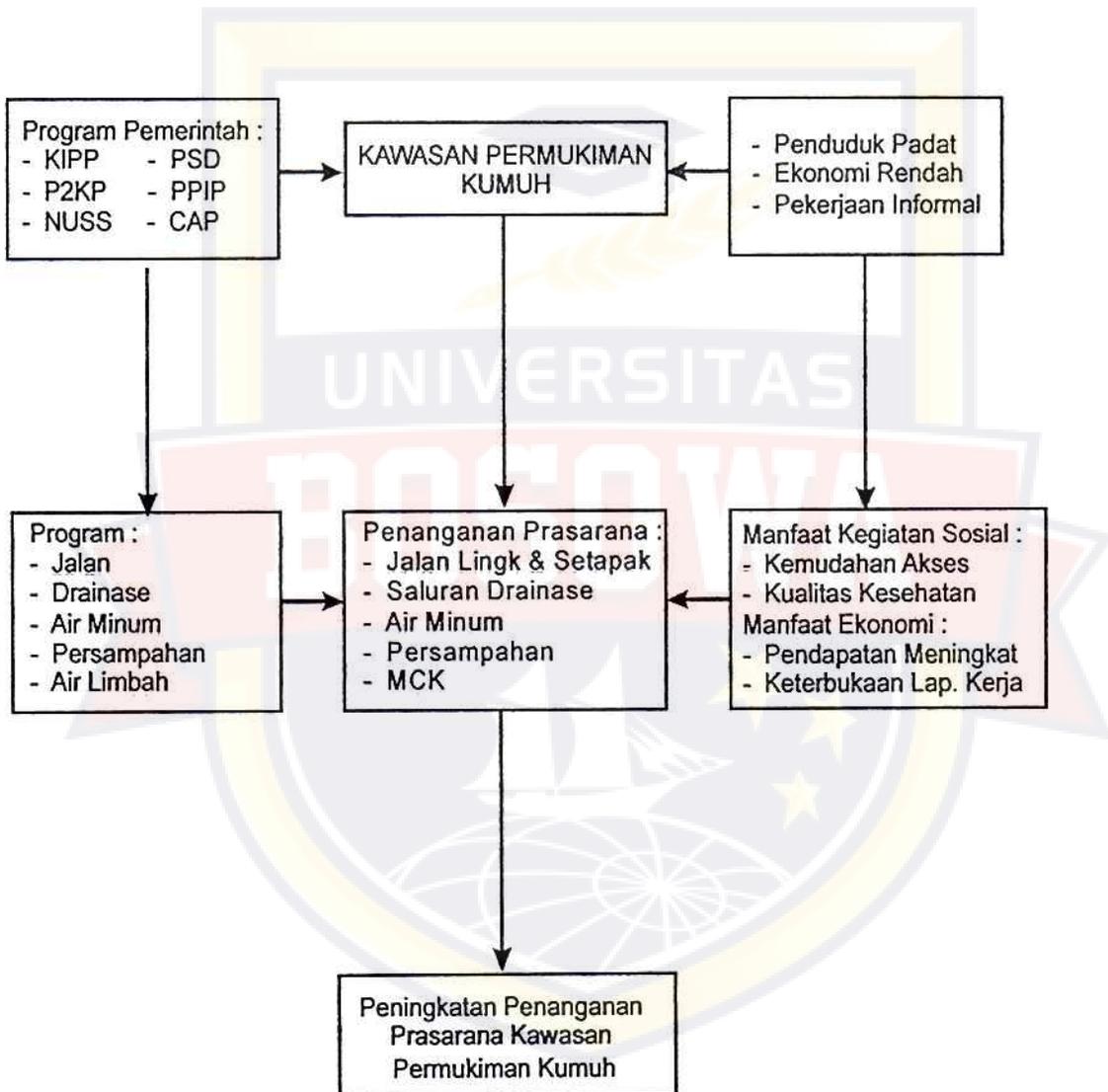
e. Prasarana Jalan

Meliputi jalan lingkungan dan jalan setapak yang terdapat di dalam lingkungan permukiman kumuh, dengan indikatornya sebagai berikut :

1. Panjang jalan lingkungan (standar 40-60m/Ha):
 - a. Sangat memenuhi, jika panjang jalan $> 60\text{m/ha}$.
 - b. Memenuhi, jika panjang jalan 40-60m/ha.
 - c. Tidak memenuhi, jika panjang jalan $< 40\text{m/ha}$.
2. Lebar jalan lingkungan (standar 3,50-5,00m):
 - a. Sangat memenuhi, jika lebar jalan $> 5\text{m}$.
 - b. Memenuhi, jika lebar jalan 3,50-5,00m.
 - c. Tidak memenuhi, jika lebar jalan $< 3,50\text{m}$.
3. Panjang jalan setapak (standar 50-110m/ha):
 - a. Sangat memenuhi, jika panjang jalan $> 110\text{m/ha}$.
 - b. Memenuhi, jika panjang jalan 50-110m/ha.
 - c. Tidak memenuhi, jika panjang jalan $< 50\text{m/ha}$.
4. Lebar jalan setapak (standar 0,8-2,00 meter):
 - a. Sangat memenuhi, jika lebar jalan $> 2,00\text{m}$.
 - b. Memenuhi, jika lebar jalan 0,8-2,00m.
 - c. Tidak memenuhi, jika lebar jalan $< 0,8\text{m}$.

3.8 Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang masalah serta teori-teori yang diuraikan sebelumnya dikaitkan dengan tujuan penelitian, maka berikut ini disajikan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar : 3.1. Kerangka Pikir



BAB 4 **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**ANALISIS PENANGANAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PESISIR
DI KELURAHAN KOTA BARU
KOTA TERNATE**



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi

4.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif

Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Kota Baru yang secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan luas wilayah Kelurahan Kota Baru adalah sebesar 120 ha. Secara administratif Kelurahan Kota Baru mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Muhajirin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Toboko, Takoma
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Halmahera
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ternate Selatan

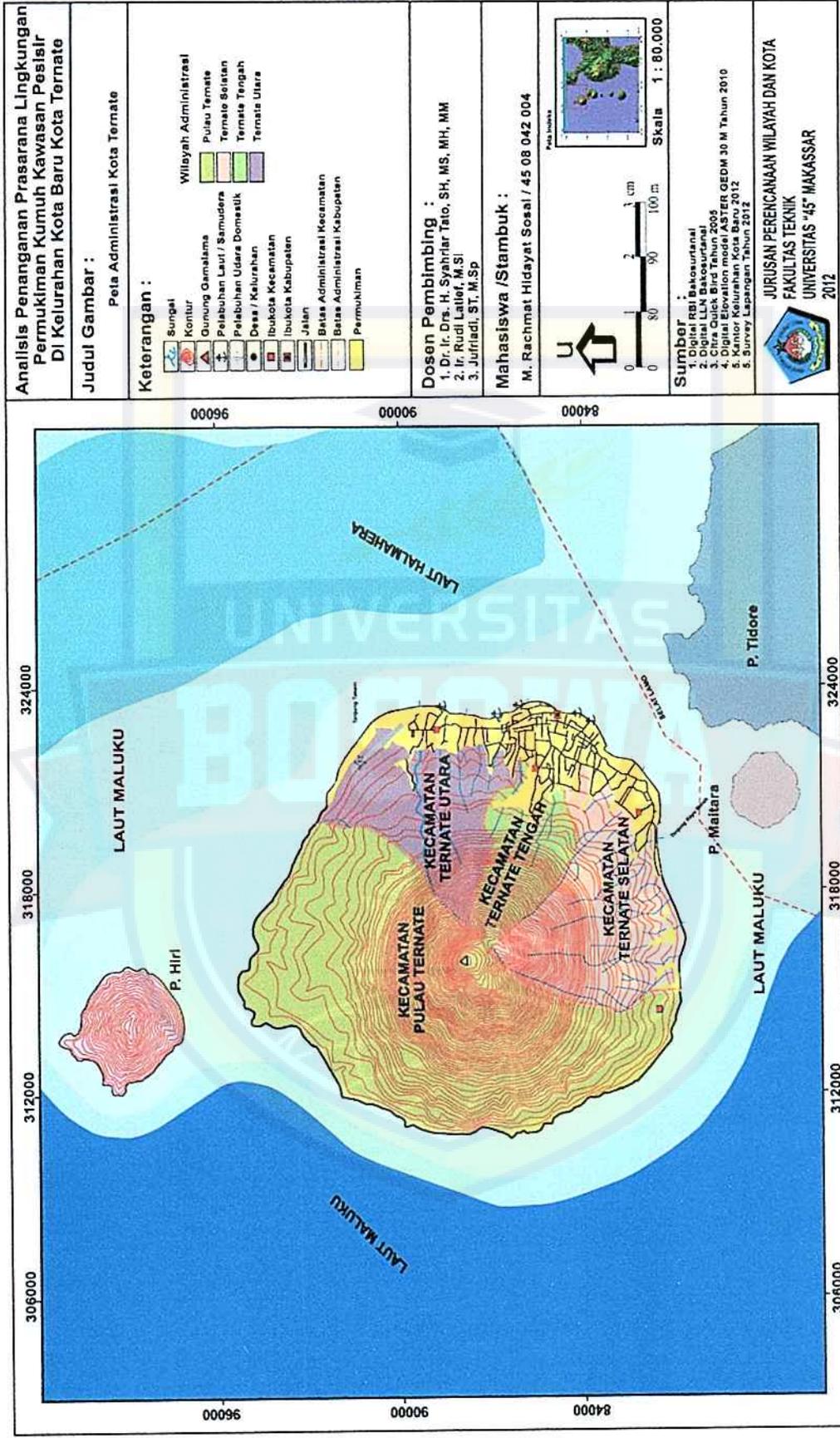
Kelurahan Kota Baru terdiri dari 6 RT dan 6 RW, sedangkan lokasi penelitian ditetapkan pada 3 (Dua) RW yaitu RW 04, RW 05, dan 06, Adapun luas wilayah Kelurahan Kota Baru dirinci menurut RW adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Luas Kelurahan Kota Baru per RW Tahun 2011

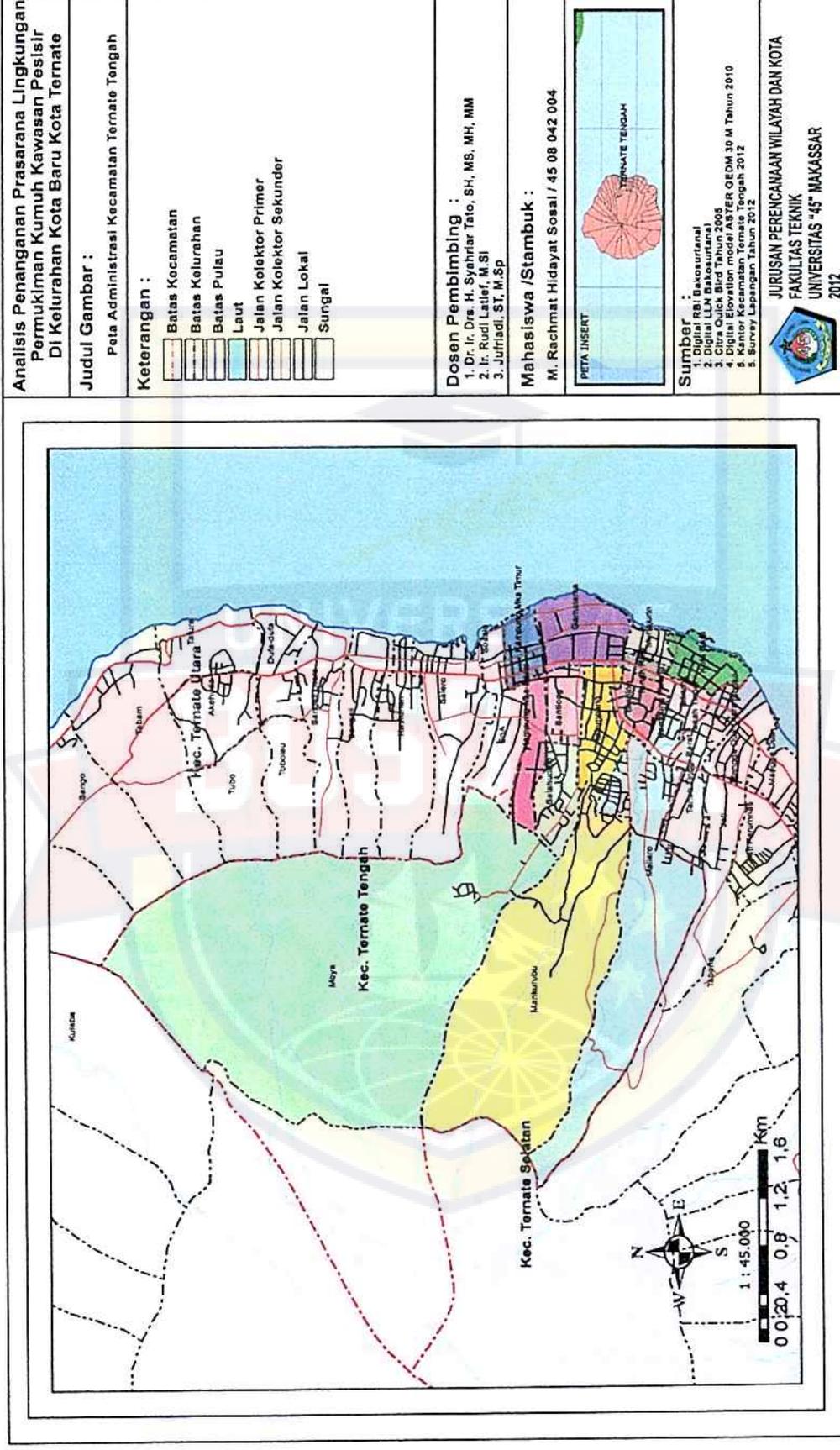
No.	Rukun Warga	Luas Wilayah (Ha)	Presentase (%)
1	RW 01	18	15
2	RW 02	38	31,66
3	RW 03	16	13,33
4	RW 04	18	15
5	RW 05	14	11,66
6	RW 06	16	13,33
Jumlah		120	100

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

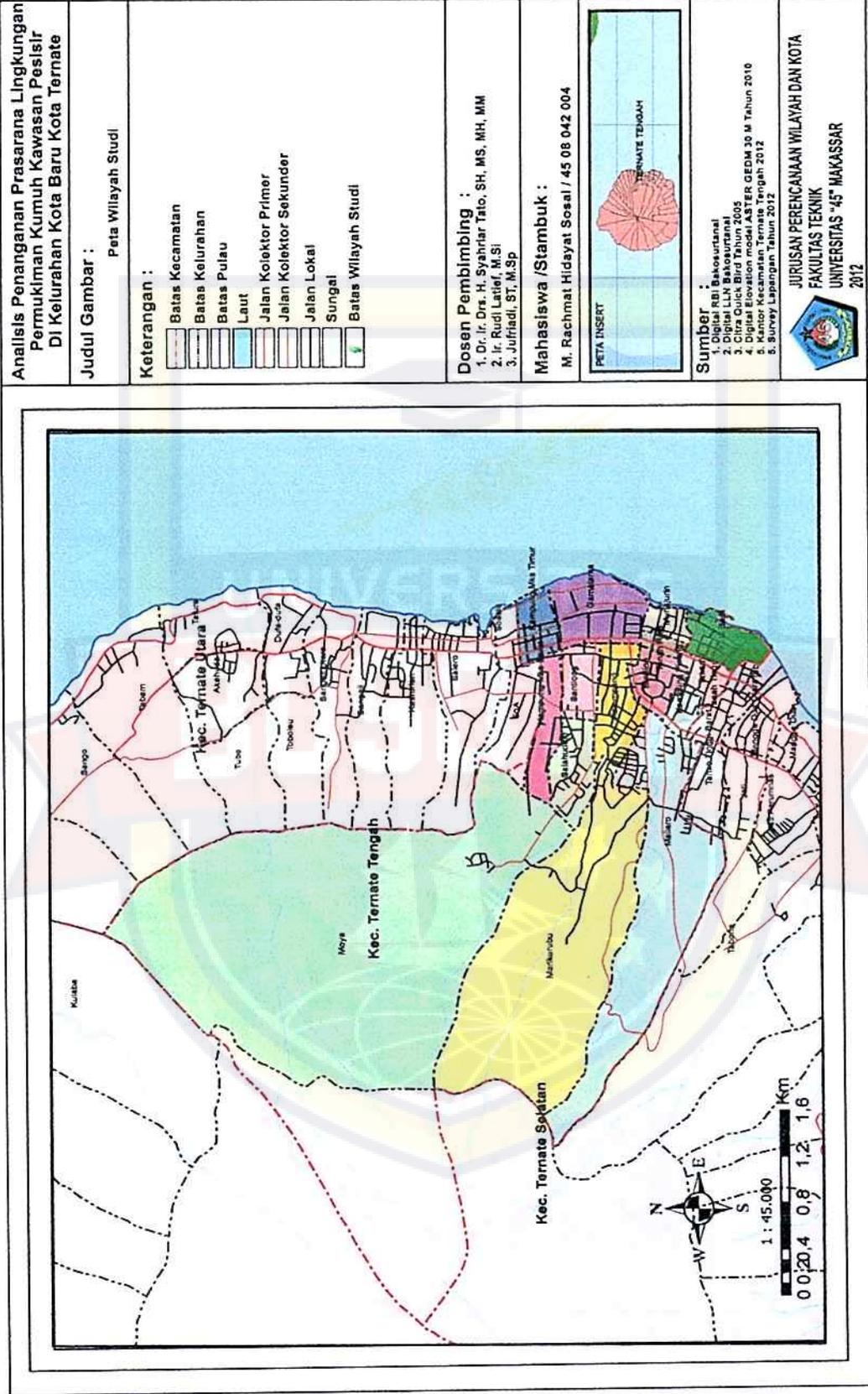
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Ternate



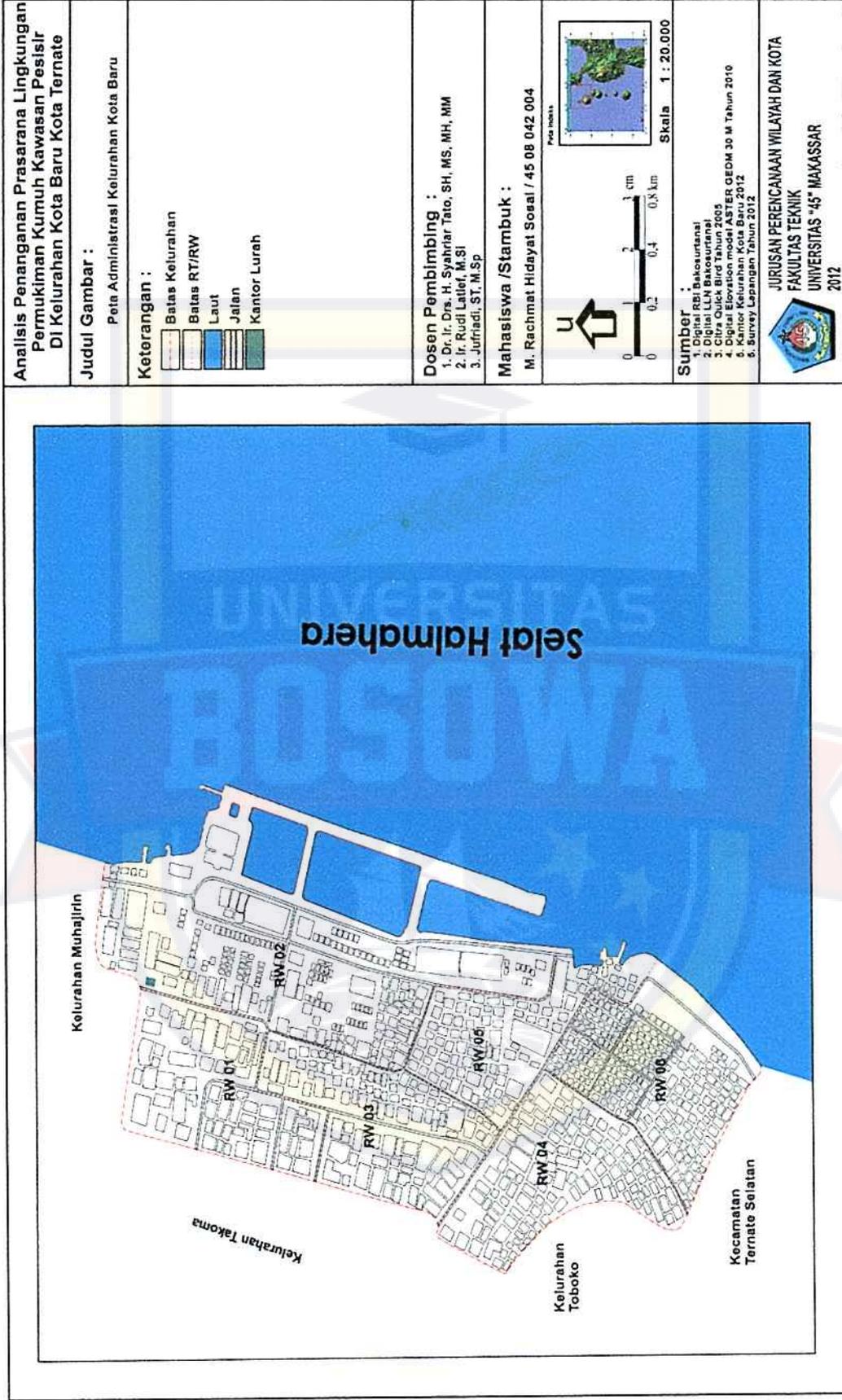
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kecamatan Temate Tengah



Gambar 4.3 Peta Wilayah Studi



Gambar 4.4 Peta Administrasi Kelurahan Kota Baru



4.1.2 Topografi dan Kelerengan

Topografi dan kelerengan Kelurahan Kota Baru berada pada ketinggian 0-200 meter dari permukaan air laut. Bentuk permukaan datar, hal tersebut dapat terlihat dari kemiringan lereng dengan kisaran 2–8 %. Kemiringan lereng tersebut menjadi dasar dalam menetapkan dan mengalokasikan berbagai fasilitas, pengembangan kawasan dan pengendalian pertumbuhan kawasan.

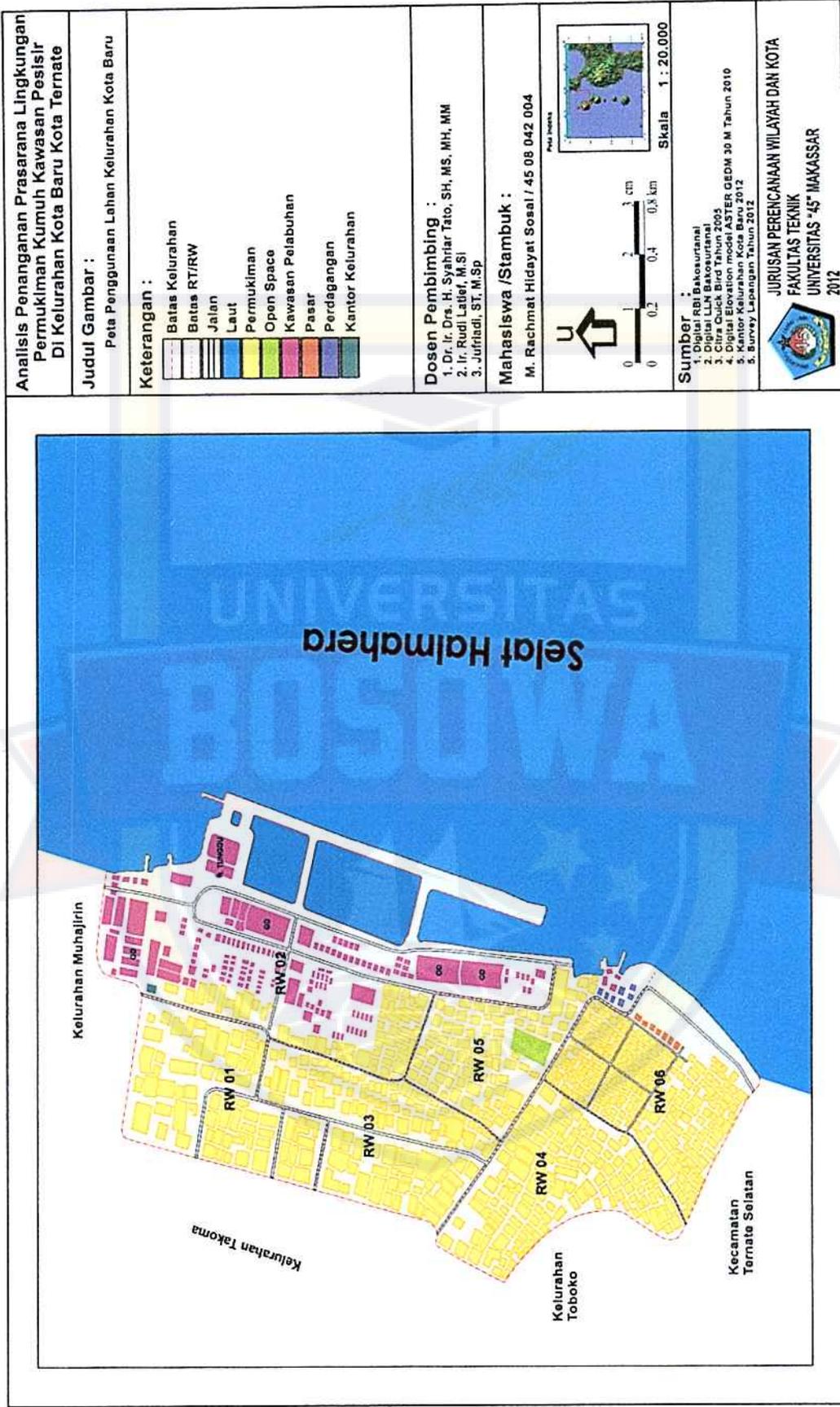
4.1.3 Hidrologi dan Sumberdaya Air

Sumberdaya air yang digunakan penduduk Kelurahan Kota Baru bersumber dari PDAM, air tanah dangkal dan dalam dengan memanfaatkan sumur gali dan sumur pompa (artesis).

4.1.4 Aspek Tata Guna Lahan

Penggunaan lahan di Kelurahan Kota Baru mengalami perubahan setiap tahun, hal ini dipengaruhi oleh kegiatan dan pertumbuhan penduduk dan pelaksanaan pembangunan yang mendiami. Pemanfaatan lahan di Kelurahan Kota Baru terdiri dari permukiman, pasar, Terminal, pelayanan umum, pelabuhan umum, pelabuhan penyebrangan dan penggunaan lainnya.

Gambar 4.5 Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Kota Baru



4.1.5 Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan wilayah dan kota, yang dapat berperan sebagai subyek ataupun obyek dalam pembangunan. Dinamika kependudukan dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan atau perkembangan suatu kota, demikian halnya terhadap ukuran suatu kota dapat dinilai berdasarkan jumlah penduduk yang mendiaminya.

1. Penduduk Berdasarkan RW

Jumlah penduduk di Kelurahan Kota Baru dirinci menurut RW dimana penduduk yang tertinggi terdapat di RW 2 dengan jumlah penduduk sebanyak 2.123 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di RW 1 sebanyak 1.225 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut RW di Kelurahan Kota Baru dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kelurahan Kota Baru per RW Tahun 2011

No.	Rukun Warga	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Presentase (%)
1	RW 01	1.225	12,03
2	RW 02	2.123	20,73
3	RW 03	1.920	19,25
4	RW 04	2.010	19,26
5	RW 05	1.800	9,57
6	RW 06	2.000	18,77
Jumlah		11.078	100

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

2. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk yang memperlihatkan selisih jumlah setiap tahunnya. Pada dasarnya

pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh penambahan secara alami yaitu faktor angka kelahiran yang lebih tinggi dari angka kematian, selain itu juga dipengaruhi oleh perpindahan penduduk (migrasi masuk dan keluar).

Tabel 4.3. Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk 5 tahun Terakhir Di Kelurahan Kota Baru Tahun 2007 – 2011

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Perkembangan (jiwa)	Kepadatan (jiwa/ha)	Rata-Rata Perkembangan
1.	2007	8.948	-	74	118
2.	2008	9.624	676	80	
3.	2009	9.969	345	83	
4.	2010	10.790	821	89	
5.	2011	11.078	288	92	
Jumlah		50.409	2130		

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

3. Struktur Kependudukan

Struktur kependudukan di Kelurahan Kota Baru terdiri dari : struktur penduduk menurut jenis kelamin penduduk menurut umur, menurut pendidikan, agama dan mata pencaharian.

a. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kelurahan Kota Baru

Struktur penduduk menurut jenis kelamin merupakan perbandingan memperlihatkan selisih atau rasio antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2011 di Kelurahan Kota Baru terdiri dari laki-

laki sebanyak 5.229 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 5.849 jiwa.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kelurahan Kota Baru Tahun 2007-2011

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2007	3.474	5.474	8.948
2	2008	2.812	6.812	9.624
3	2009	4.628	5.341	9.969
4	2010	4.975	5.815	10.790
5	2011	5.229	5.849	11.078

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

b. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kota Ternate berdasarkan hasil catatan registrasi yang diperoleh didominasi oleh kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 1.467 jiwa dan penduduk terkecil berusia antara 60-64 dengan jumlah penduduk sebanyak 273 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Kelurahan Kota Baru berdasarkan kelompok umur dapat dilihat berikut ini :

Tabel 4.5. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)				Jumlah
	Laki-Laki	Prosentase (%)	Perempuan	Presentase (%)	
0-4	511	9,77	612	10,46	1.123
5-9	533	10,19	612	10,46	1.145
10-14	542	10,37	503	8,60	1.045
15-19	550	10,52	439	7,51	989
20-24	633	12,11	834	14,26	1.467
25-29	514	9,83	442	7,56	956
30-34	498	9,52	416	7,11	914
35-39	441	8,43	486	8,31	927
40-44	233	4,46	501	8,57	734
45-49	194	3,71	268	4,58	462
50-54	153	2,93	243	4,15	396
55-59	147	2,81	152	2,60	299
60-64	126	2,41	147	2,51	273
65-	154	2,95	194	3,32	348
Jumlah	5.229	100,00	5.849	100,00	11.078

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

c. Struktur Penduduk Menurut Agama

Dari data pada tahun 2011 jumlah penduduk Kelurahan Kota Baru berjumlah 11.078 jiwa. Berdasarkan jumlah diketahui bahwa jumlah penduduk menurut agama terdiri dari pemeluk Agama Islam sebanyak 10.452 jiwa, Kristen katolik 435 jiwa, Kristen Protestan 145 jiwa, hindu 25 jiwa, dan budha 21 jiwa.

Tabel 4.6. Penduduk Menurut Agama di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011

No	Kelompok Agama	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Presentase (%)
1.	Islam	10.452	94,35
2.	Kristen Katholik	435	3,93
3.	Kristen Protestan	145	1,31
4.	Hindu	25	0,23
5.	Budha	21	0,19
Jumlah		11.078	100,00

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

d. Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Salah satu sektor prioritas yang memerlukan penanganan pada setiap daerah adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Keberhasilan pada sektor pendidikan dapat dinilai dari struktur penduduk menurut tingkat pendidikan. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kelurahan Kota Baru.

Tabel 4.7. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Presentase (%)
1.	Tamatan SD	1.496	13,50
2.	Tidak Tamat SD	342	3,09
3.	Tidak tamat SLTP	1.678	15,15
4.	Tidak Tamat SLTA	2.567	23,17
5.	Diploma	236	2,13
6.	Sarjana	1.914	17,28
7.	Lainnya	2.845	25,68
Jumlah		11.078	100

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

e. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Struktur penduduk menurut mata pencaharian merupakan salah satu indikator untuk memperoleh gambaran tentang sektor kegiatan utama dan tingkat produktivitas masyarakat dalam suatu kawasan perkotaan. Hasil pengamatan dan sumber data yang diperoleh menunjukkan struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kelurahan Kota Baru sebagian besar bergerak pada kegiatan buruh, pedagang kecil (warung), ABRI/Polri, pegawai negeri sipil, wiraswasta, pegawai swasta dan lainnya.

4.1.6 Aspek Sarana dan Prasarana

1. Aspek Sarana

a. Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum sangat dibutuhkan untuk melayani masyarakat yang berada di suatu daerah tersebut, untuk lebih jelasnya jumlah fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8. Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)
1.	Perkantoran Pemerintahan	3
2.	Perkantoran Pelayanan Umum	2
3.	Perkantoran Militer / Polisi	1
Jumlah		6

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

b. Fasilitas Perumahan dan Permukiman

Fasilitas perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, dan peningkatan generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawatan jati diri. Salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan rumah dan tingkat kelayakan hunian berdasarkan kondisi bangunan yang ditempati oleh masyarakat.

Sumber data yang diperoleh menunjukkan kondisi bangunan rumah di Kelurahan Kota Baru terdiri dari bangunan permanen, semi permanen dan temporer. Secara rinci mengenai kondisi permukiman di Kelurahan Kota Baru adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9. Fasilitas Perumahan dan Permukiman di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011

No	Kondisi Bangunan	Jumlah (Unit)	Presentase(%)
1.	Permanen	1056	51,97
2.	Semi Permanen	679	33,42
3.	Temporer	297	14,62
Jumlah		2032	100

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru Tahun 2012

c. Fasilitas Perdagangan

Pelayanan fasilitas perdagangan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan fasilitas ini sangat menunjang dalam perkembangan suatu daerah, selain fungsinya sebagai sarana untuk berbelanja juga berfungsi sebagai pendistribusi barang kebutuhan

masyarakat. Hasil pengamatan dan sumber data yang diperoleh menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas perdagangan di Kelurahan Kota Baru berupa toko/warung 54 unit, rumah makan/restoran 4 unit dan Pasar Tradisional 1 Unit.

Tabel 4.10. Fasilitas Perdagangan di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)
1.	Mall	-
2.	Toko/kios	54
3.	Restoran/Rumah Makan	4
4.	Pasar Tradisional	1
Jumlah		59

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

d. Fasilitas Pendidikan

Guna meningkatkan kualitas pendidikan disuatu daerah, perlu ditunjang oleh ketersediaan sarana dan parasarana penunjangnya. Sumber data yang diperoleh menunjukkan fasilitas pendidikan di Kelurahan Kota Baru terdiri atas TK 3, unit dan SD 4 unit.

Tabel 4.11. Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	Taman Kanak-Kanak	3
2.	Sekolah Dasar (SD)	4
3.	SMP	-
4.	SMA	-
5.	Perguruan Tinggi Swasta	-
Jumlah		7

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

e. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan selain berfungsi sebagai tempat pengobatan juga berperan dalam sistem distribusi pelayanan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan bagi masyarakat untuk mewujudkan pola hidup sehat dan layak. Sumber data yang diperoleh menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kelurahan Kota Baru yaitu Puskesmas sebanyak 1 unit, Posyandu 4 unit, Balai Pengobatan Swasta 3 unit dan Apotik 4 unit.

Tabel 4.12. jumlah fasilitas kesehatan di Kelurahan Kota baru tahun 2011

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)
1.	Posyandu	4
2.	Puskesmas	1
3.	Balai pengobatan swasta	3
4.	Apotik	4
Jumlah		12

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

f. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan wadah untuk melakukan kegiatan ritual keagamaan dan meningkatkan ketaqwaan, serta membina kerukunan hidup antar umat beragama. Fasilitas peribadatan yang terdapat di Kelurahan Kota Baru hingga saat ini terdiri dari mesjid 4 unit, Musholla 3 dan gereja 1 unit.

Tabel 4.13. Jumlah Fasilitas peribadatan di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	4
2.	Musholla	3
3.	Gereja	1
Jumlah		8

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

g. Fasilitas Olah Raga dan Ruang Terbuka

Salah satu fasilitas yang mendukung untuk meningkatkan produktivitas masyarakat adalah keberadaan fasilitas olah raga. Berdasarkan data yang diperoleh fasilitas olah raga yang terdapat di Kelurahan Kota Baru terdiri atas; lapangan sepak bola, lapangan bola di Kelurahan Kota Baru terdiri dari lapangan Bulutangkis 1 unit, lapangan bola volly 1 unit, lapangan Sepak Bola 1 unit dan lapangan tenis 2 unit

Tabel 4.14. Jumlah Fasilitas Olah Raga Di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)
1.	Lap. Bulu Tangkis	1
2.	Lap. Tenis Meja	-
3.	Lap. Bola Volly	1
4.	Lap. Sepak Bola	1
5.	Lap. Tenis	2
Jumlah		5

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

2. Aspek Prasarana

a. Jaringan Jalan

Jaringan jalan merupakan sarana penghubung antar wilayah atau kawasan yang berfungsi sebagai prasarana transportasi, yang tidak hanya digunakan sebagai jalur aliran barang dan penumpang tetapi juga berperan sebagai pembuka keterhubungan antar kawasan terutama pada kawasan yang terbelakang. Selain itu fungsi jaringan jalan dalam lingkup lokal atau lingkungan berfungsi dalam menata atau mengatur pola permukiman. Kondisi jalan di Kelurahan Kota Baru pada umumnya terdiri atas jalan aspal, pengerasan dan jalan tanah. Sedangkan berdasarkan klasifikasi fungsi jaringan jalan dilalui oleh jalan arteri sebagai jalur utama, sedangkan penghubung antar kawasan dan lingkungan permukiman dilalui oleh jalan lingkungan dan jalan setapak.:

Tabel 4.15. Klasifikasi Jaringan Jalan di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011

No	Klasifikasi Jalan	Panjang (Meter)
1.	Lingkungan	1.226
2.	Setapak	2.845
	Jumlah	4.071

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

b. Jaringan Drainase

Kondisi jaringan drainase di Kelurahan Kota Baru sepenuhnya belum berfungsi dengan baik, sebagian besar masih dalam kondisi (alami). Dari hasil pengamatan kami masih di temukan drainase yang di dalamnya

terdapat banyak sampah-sampah sehingga menghambat kelancaran air, sedangkan panjang drainase yang ada berdasarkan data dari kantor Kelurahan Kota Baru yaitu 3.615 meter.

c. Jaringan Listrik

Prasarana kelistrikan dibutuhkan untuk menunjang berbagai kegiatan seperti kebutuhan penerangan rumah tangga, kegiatan industri, penerangan jalan dan kegiatan lainnya. Oleh karenanya prasarana listrik memegang peranan sangat penting dalam suatu wilayah. Adapun jenis pelanggan listrik di Kelurahan Kota Baru adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16. Jumlah Pelanggan Listrik di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011

No	Jenis Pelanggan	Jumlah
1.	Rumah Tangga	2.862
2.	Pelayanan Umum & Sosial	27
3.	Industri	-
Jumlah		2.889

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

d. Jaringan Telepon

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk memperlancar pelayanan akan jasa pos dan telekomunikasi. Salah satu media yang efisien dan cepat untuk mendapatkan akses pelayanan informasi dan komunikasi melalui penyediaan prasarana dan jaringan telepon. Penggunaan jaringan telepon sangat berguna dalam penerimaan informasi baik untuk kegiatan bisnis dan proses interaksi masyarakat.

Tabel 4.17. Jumlah Jenis Sambungan Telepon di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011

No	Jenis Sambungan	Jumlah (Unit)
1.	Rumah Tangga	1.243
2.	Wartel	4
3.	Telepon umum	4
Jumlah		1.251

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

e. Jaringan Air Minum

Sarana air minum yang dimanfaatkan masyarakat di Kelurahan Kota Baru bersumber dari PDAM dan air tanah (sumur) dangkal dan dalam. Potensi air minum yang bersumber dari PDAM, secara umum masih dominan dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan data yang di peroleh tingkat pelayanan air minum yang bersumber dari PDAM mencapai 83,56% atau 1.698 pelanggan.

Tabel 4.18. Jumlah Pelanggan Air Minum di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011

No	Sumber Air Bersih	Jumlah Pelanggan	Presentase (%)
1.	PDAM	1.698	83,56
2.	Sumur Galian	334	16,43
Jumlah		2032	100

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

f. Sistem Persampahan

Potensi timbulan sampah di Kelurahan Kota Baru berdasarkan sumbernya meliputi; sampah rumah tangga, dan sebagainya. Jika didasarkan pada sifat dan karakteristiknya sampah yang dihasilkan oleh

berbagai aktivitas terdiri atas jenis sampah basah dan sampah kering. Hingga saat ini pengelolaan sampah yang dihasilkan belum dikelola secara optimal, pola penanganan yang dilakukan masyarakat sebagian masih bersifat konvensional dengan cara; membakar, menimbun, membuang ke Laut. Hingga saat ini prasarana yang digunakan antara lain: gerobak sampah, container dan armada pengangkutan sampah melalui dinas kebersihan Kota Ternate, adapun jumlah prasarana persampahan di Kelurahan Kota Baru adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19. Jumlah Prasarana Persampahan di Kelurahan Kota Baru Tahun 2011

No	Jenis Prasarana Sampah	Jumlah
1.	Truk pengangkut sampah	1
2.	Gerobak sampah	3
3.	TPS	3
Jumlah		7

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru 2012

g. Air Limbah/MCK

Salah satu sumber pencemaran lingkungan adalah air limbah. Air limbah di Kelurahan Kota Baru secara umum bersumber dari; limbah rumah tangga dan limbah industri serta hasil buangan dari aktivitas sosial ekonomi. Berdasarkan karakteristiknya limbah hasil buangan di Kelurahan Kota Baru terdiri atas limbah padat dan limbah cair. Hasil observasi lapangan yang dilakukan menunjukkan penanganan limbah di Kelurahan Kota Baru sepenuhnya belum dikelola secara optimal. Jika tidak diantisipasi sejak awal akan berdampak pada pencemaran lingkungan.

4.2 Karakteristik Responden

Ditinjau dari letak lokasi penelitian yang dekat dengan fasilitas Umum dan beberapa tempat lapangan kerja menyebabkan kawasan ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk tinggal di wilayah ini. Dari hasil quesioner yang diedarkan dapat diketahui bahwa di kawasan penelitian ini penduduk yang mendiami adalah penduduk asli dan pendatang dari berbagai daerah dan terdiri dari berbagai suku.

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan pada lokasi penelitian dilakukan pembagian usia responden pada lima kelompok umur untuk mengakomodir masyarakat yang bermukim dilokasi tersebut.

Tabel 4.20. Jumlah responden menurut kelompok usia kerja

No.	Umur (Tahun)	Jumlah	
		N	Presentase (%)
1	20 – 30	22	42,31
2	31 – 40	18	34,62
3	41 – 50	6	11,54
4	51 - 60	4	7,69
5	Diatas 60	2	3,85
Jumlah		52	100

Sumber : Hasil Analisis Survei, 2012

Berdasarkan perbandingan usia responden pada hasil survey dapat dilihat pada tabel 4.20 usia antara 20 – 30 tahun (42.31%) dan 31 – 40 tahun (34,62%) usia ini menunjukkan usia yang produktif dan menunjukkan jumlah yang dominan.

Tabel 4.21. Distribusi anggota keluarga yang tinggal dalam rumah

No.	Anggota keluarga yang Tinggal dalam rumah	Jumlah	
		N	Presentase (%)
1	3 Orang	14	26,92
2	4 Orang	18	34,62
3	5 Orang	12	23,08
4	Lebih dari 5 Orang	8	15,38
Jumlah		52	100

Sumber : Hasil Analisis Survei, 2012

Jumlah anggota keluarga yang menempati setiap hunian dalam lingkungan permukiman sangat bervariasi. Jumlah anggota keluarga yang menempati rumah tinggal responden mayoritas lebih dari 3 orang.

Jumlah responden yang berpendidikan kurang dari 9 tahun sebanyak 63,46 %, dan yang berpendidikan lebih dari 9 tahun sebanyak 36,54 %, ini dapat dikatakan bahwa keadaan tingkat pendidikan responden di lokasi penelitian relatif masih rendah. Jika dikaitkan dengan keadaan pekerjaan responden, setidaknya mempunyai keterkaitan dimana pekerjaan yang dilakukan tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi (tabel 4.22).

Tabel 4.22. Tingkat pendidikan responden

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		N	Presentase (%)
1	Tidak Tamat SD	10	19,23
2	Tamat SD	12	23,08
3	Tamat SMP	11	21,15
4	Tamat SMA	13	25,00
5	Sarjana Muda	4	7,69
6	Sarjana	2	3,85
Jumlah		55	100

Sumber : Hasil Analisis Survei, 2012

Berdasarkan karakteristik pekerjaan utama penduduk yang bermukim di kawasan ini, diperoleh jawaban tertinggi 99,99% mempunyai pekerjaan/mata pencaharian pada sektor informal, dimana hal ini dikarenakan tingkat pendidikan responden masih rendah dan pekerjaan ini tidak memerlukan tingkat keahlian yang tinggi. Pekerjaan/mata pencaharian dari responden ini akan berpengaruh pada tingkat penghasilan yang diperoleh (tabel 4.23).

Tabel 4.23. Mata pencaharian/pekerjaan responden

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	
		N	Presentase (%)
1	Buruh	20	38,46
2	Tukang Becak	-	-
3	Pedagang kecil (warung)	12	23,08
4	Buruh Petani	8	15,38
5	Wiraswasta	8	15,38
6	Pegawai Swasta	3	5,77
7	Pegawai negeri	1	1,92
Jumlah		52	100

Sumber : Hasil Analisis Survei, 2012

Besarnya tingkat penghasilan responden menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan masih tergolong rendah, hal ini berkaitan dengan jenis pekerjaan responden yang lebih dominan pada sektor informal (tabel 4.24).

Tabel 4.24. Tingkat penghasilan responden

No.	Tingkat Penghasilan	Jumlah	
		N	Presentase (%)
1	< 500.000	23	44,23
2	501.000 s/d 750.000	14	26,92
3	751.000 s/d 1.000.000	9	17,31
4	> 1.000.000	6	11,54
Jumlah		52	100

Sumber : Hasil Analisis Survei, 2012

4.3 Ketersediaan Prasarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Kota Baru

Hal yang hendak ditinjau pada sub bab ini adalah ketersediaan prasarana lingkungan permukiman dalam lokasi penelitian. Prasarana lingkungan permukiman yang ada sekarang, selain dilaksanakan oleh pemerintah melalui program penanganan infrastruktur perkotaan seperti P2KP dan NUSSP juga ada yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui swadaya masyarakat. Prasarana lingkungan permukiman yang dimaksud antara lain :

1. Jalan

Prasarana jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam suatu kawasan perumahan dan permukiman, karena dengan adanya jalan dapat mendukung kelancaran pergerakan dari dalam dan keluar kawasan perumahan dan permukiman.

Ketersediaan jalan lingkungan dan jalan setapak didalam kawasan ini adalah sangat tinggi. Jika melihat standar panjang jalan lingkungan dan jalan setapak sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang permukiman dan Pengembangan Wilayah (2000). Ketersediaan panjang jalan yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.25. Perbandingan antara panjang jalan lingkungan dan Setapak dengan standar pelayanan minimum

No.	Klasifikasi Jalan	Standar minimal (m/ha)	Standar minimal Kebutuhan (m/ 7,5 ha)	Panjang Jalan	
				M (meter)	Presentase (%)
1	Jalan Lingkungan	40 -60	300 - 450	1.226	30,12
2	Jalan Setapak	50 - 110	375 - 825	2.845	69,88

Sumber : Hasil Analisis Survei, 2012

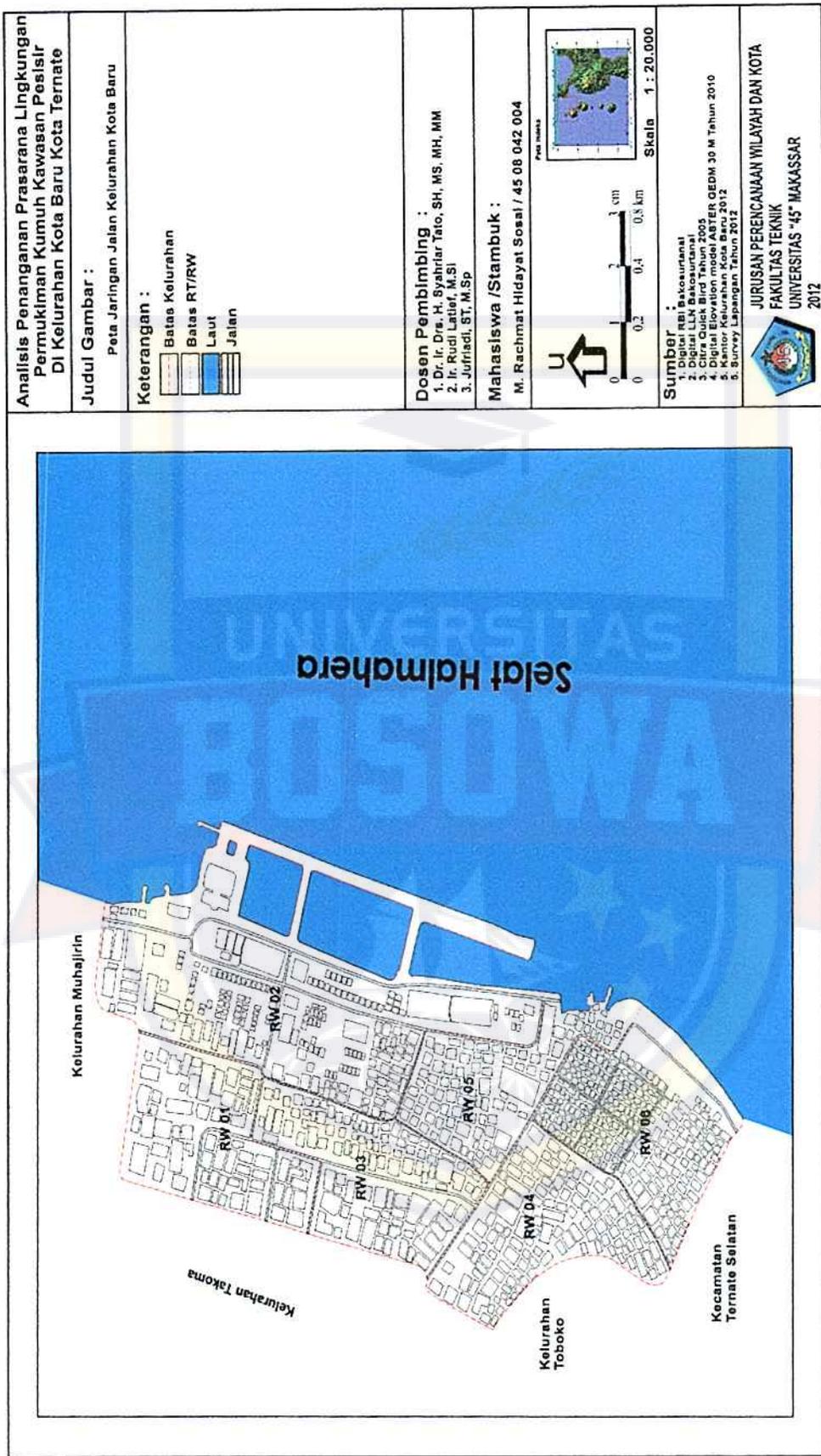
Berdasarkan tabel 4.25 menunjukkan bahwa kebutuhan jalan lingkungan untuk permukiman dengan luas lahan 7,5 ha sesuai SPM adalah 300 m sampai dengan 450 m, sementara ketersediaan panjang jalan lingkungan yang ada adalah 1.226 m. Untuk kebutuhan jalan setapak sesuai standar dengan luas lahan 7,5 ha adalah 375 m sampai dengan 825 m, dan panjang jalan setapak yang ada adalah 2.845 m. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan panjang jalan lingkungan dan jalan setapak yang ada pada lokasi penelitian dikategorikan belum baik, namun memerlukan pemeliharaan.



Gambar 4.6. Kondisi Salah Satu Jaringan Jalan Kolektor Sekunder

Untuk lebar badan jalan lingkungan sesuai standar yang dibutuhkan adalah 3,5 m – 5 m dan lebar perkerasan jalan lingkungan 3 m – 4,5 m. Sesuai pengamatan di lapangan, ketersediaan lebar badan jalan yang ada dikategorikan kurang baik dan lebar perkerasan jalan dikategorikan baik. Dapat dilihat dari presentase lebar badan jalan lingkungan yang sesuai atau lebih besar dari standar (3,5 m), dengan lebar badan jalan yang ada yaitu 4 m – 6 m adalah 59,39%, sedang yang kurang dari standar 40,61%. Untuk lebar perkerasan jalan yang sesuai atau lebih besar dari standar (3 m), dengan lebar perkerasan yang ada yaitu 3 m – 6 m adalah 82,15%, dan yang kurang dari standar (2,5 m) adalah 17,85% (tabel 4.26).

Gambar 4.7. Peta Jaringan Jalan dalam lingkungan Permukiman di Kelurahan Kota Baru



Tabel 4.26. Perbandingan antara lebar badan jalan dan perkerasan Jalan dengan standar pelayanan minimum

No.	Klasifikasi Jalan	Standar Lebar Badan JL. Min	Lebar Jalan Yang ada	Standar Lebar Perk. Min	Lebar Perk. Yang Ada	Panjang Jalan Yang Ada
1	Jalan Lingkungan	3,5 – 5	6	3 – 4,5	5	543
			5		5	325
			4		4	358
Jumlah						1.226
2	Jalan Setapak	2 – 3,5	1,5	1,5	1,5	1.254
			1		1	1.591
Jumlah						2.845

Sumber : Hasil Analisis Survei, 2012

Tabel 4.26 juga menunjukkan bahwa kebutuhan untuk lebar badan jalan setapak sesuai standar (2 m – 3,5 m) dan lebar perkerasan jalan (1,5 m). Sesuai dengan pengamatan di lapangan, ketersediaannya dikategorikan tidak memadai karena ketersediaan lebar badan jalan yang ada yaitu 1 m – 1,5 m yaitu 100%. Untuk lebar perkerasan jalan yang sesuai dengan standar (1,5 m), ketersediaannya juga dikategorikan tidak baik karena yang ada di lokasi penelitian dengan lebar perkerasan 1,5 m panjangnya hanya 1.254 meter, sedang selebihnya yaitu 1.591 meter tidak sesuai dengan standar minimal (gambar 4.8.).



Gambar 4.8. Kondisi Jalan setapak yang ada dalam permukiman

Untuk material perkerasan jalan lingkungan yang ada pada lokasi penelitian ketersediaanya sudah memadai karena keseluruhan jalan lingkungan yang ada telah diperkeras dengan material berupa aspal sebesar 100 % (tabel 4.27). Ini menunjukkan bahwa material perkerasan jalan lingkungan yang ada dikategorikan sudah sangat baik. Tetapi perlu ada perbaikan, dan pemeliharaan karena di beberapa ruas jalan material perkerasannya sudah rusak (gambar 4.9).



Gambar 4.9. Kondisi perkerasan jalan lingkungan yang rusak

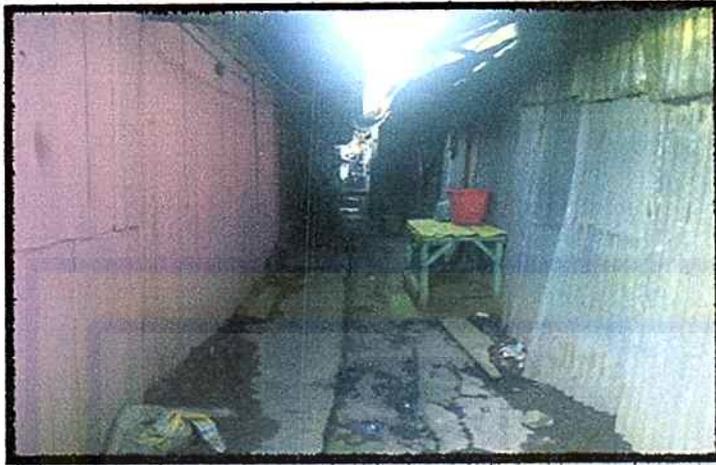
Material perkerasan jalan setapak yang ada juga sudah sangat memadai, karena jalan setapak yang ada pada lokasi penelitian keseluruhannya telah diperkeras dengan material berupa rabat beton dengan presentase sebesar 71,18% dan paving block 28,82 %. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan material perkerasan jalan setapak yang ada dikategorikan cukup baik (tabel 4.27).

Tabel 4.27. Material perkerasan jalan

No.	Klasifikasi Jalan	Material Perkerasan	Panjang Jalan Yang Ada	
			M (meter)	Presentase (%)
1	Jalan Lingkungan	Aspal	1.226	100
		Jumlah	1.226	100
2	Jalan Setapak	- Paving Block	2.025	28,82
		- Rabat Beton	820	71,18
		Jumlah	2.845	100

Sumber : Hasil Analisis Survei, 2012

Untuk material perkerasan jalan setapak yang ada pada lokasi penelitian juga perlu ada perbaikan di beberapa ruas jalan, karena kondisi jalan yang ada sudah pada rusak. Sebagian jalan juga tidak dilengkapi dengan drainase pada sisi kiri kanan jalan (gambar 4.10)



Gambar 4.10. Kondisi perkerasan jalan setapak yang rusak

2. Air Minum

Air minum adalah air yang memenuhi syarat untuk keperluan rumah tangga dan merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat, yang kegunaannya antara lain untuk keperluan air minum, mandi, memasak dan termasuk keperluan industri..

Secara umum ketersediaan jaringan air minum pada lokasi penelitian yang bersumber dari PDAM sudah ada namun masih ada sebagian masyarakat (KK) yang belum memiliki sambungan karena faktor ekonomi, sehingga masyarakat tersebut menggunakan air minum bersumber dari sumur tanah dangkal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut

Tabel 4.28. Sumber Air Minum

No.	Sumber Air Minum	Jumlah	
		N	Presentase (%)
1	PDAM	37	71,15
2	Sumur	15	28,84
Jumlah		52	100

Sumber : Hasil Analisis Survei, 2012

Dari tabel 4.28 menunjukkan bahwa warga yang telah dilayani sambungan dari PDAM adalah 71,15%, sedangkan 28,84% adalah warga yang tidak terlayani sambungan dari PDAM, tetapi cara memperoleh air minum dengan melalui sumur dan membeli. Kelompok ini adalah warga yang ekonominya tidak mampu untuk biaya penyambungan.

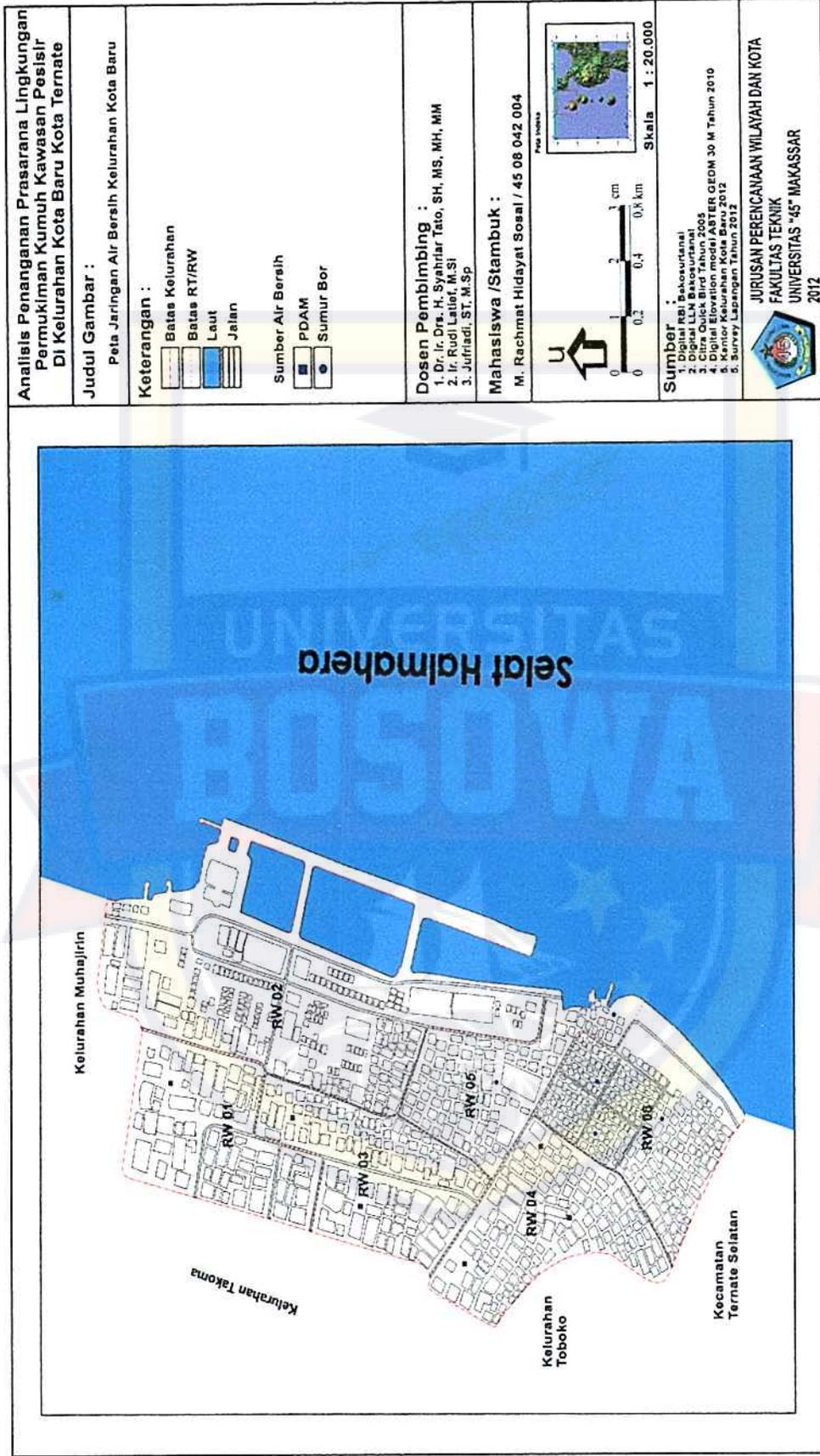


Gambar 4.11. Kondisi sumber air minum (PDAM)



Gambar 4.12. Kondisi sumber air minum (Sumur)

Gambar 4.13. Peta Jaringan Air Bersih dalam lingkungan Permukiman di Kelurahan Kota Baru



Tabel 4.29. Kualitas air minum berdasarkan rasa

No.	Sumber Air Minum	Rasa		Jumlah	
		Berasa	Tdk Berasa	N	Presentase (%)
1	PDAM	0	37	37	71,15
2	Sumur	8	7	15	28,84
Jumlah		8	44	52	100

Sumber : Hasil Analisis Survei, 2012

Ketersediaan air minum ditinjau secara fisik dan kualitas air yang meliputi rasa menunjukkan bahwa secara umum kualitas air yang digunakan oleh responden dikategorikan cukup baik karena hanya 8 responden yang menyatakan bahwa air minum berasa.

Tabel 4.30. Kualitas air minum berdasarkan bau

No.	Sumber Air Minum	Bau		Jumlah	
		Berbau	Tdk Berbau	N	Presentase (%)
1	PDAM	0	37	37	71,15
2	Sumur	8	7	15	28,84
Jumlah		8	44	52	100

Sumber : Hasil Analisis Survei, 2012

Ketersediaan air minum ditinjau secara fisik dan kualitas air yang meliputi bau, juga menunjukkan bahwa secara umum kualitas air yang digunakan oleh responden dikategorikan cukup baik karena hanya 9 responden yang menyatakan bahwa air minum berbau.

Tabel 4.31. Kualitas air minum berdasarkan warna

No.	Kualitas Warna	Jumlah	
		N	Prosentase (%)
1	Jernih	37	71,15
2	Keruh	15	28,84
Jumlah		52	100

Sumber : Hasil Analisis Survei, 2012

Tabel 4.31 menunjukkan bahwa 71,15% warga mengkonsumsi air minum yang kualitasnya baik yaitu air yang jernih, sedangkan warga yang masih menggunakan air yang keruh adalah 28.84%. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan air minum pada lokasi penelitian yang dikonsumsi oleh warga ditinjau dari segi kualitasnya sebahagian besar cukup baik.

Sementara warga yang mengkonsumsi air minum dengan kualitas kurang baik adalah warga yang berada dekat pabrik baja dan sungai sehingga mempengaruhi air yang mereka konsumsi. Kontinuitas air minum dimana sebaiknya air minum mengalir selama 24 jam, sehingga jika dibutuhkan oleh warga dapat tersedia setiap saat. Berdasarkan lamanya pengaliran air minum dari PDAM pada lokasi penelitian dikategorikan sangat baik, karena pengaliran air minum yang dibutuhkan oleh warga dapat dilakukan setiap saat. Presentase yang tidak memberi tanggapan adalah 28,84% adalah warga yang tidak menggunakan sambungan rumah.

3. Air Limbah

Pengolahan air limbah merupakan salah satu permasalahan yang sangat pelik bagi lingkungan permukiman. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik berdampak pada pencemaran lingkungan.

Sumber air limbah rumah tangga pada lokasi penelitian berasal dari limbah bekas cucian, air kamar mandi, dapur dan air limbah yang berasal dari WC. Sistem pembuangan air limbah ini dilakukan secara terpisah, dimana air limbah yang berasal dari bekas cucian, air kamar mandi, dan dapur dibuang melalui saluran tanah ataupun saluran permanen dari rumah ke saluran tersier dalam lingkungan permukiman. Air limbah yang berasal dari WC dibuang ke septictank dan sebagian lagi yang langsung membuang tinja ke WC umum yang ada di lokasi penelitian.

Jika ditinjau dari prosentase warga yang memiliki MCK, maka ketersediaan prasarana air limbah atau MCK pada lokasi penelitian, digolongkan cukup baik. Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah responden yang memiliki MCK dan yang belum memiliki MCK

Tabel 4.32. Jumlah Kepemilikan MCK di Lokasi Penelitian

No.	Kepemilikan MCK Individu Dengan Septictank	Jumlah	
		N	Presentase (%)
1	Ada	39	75
2	Tidak	13	25
Jumlah		52	100

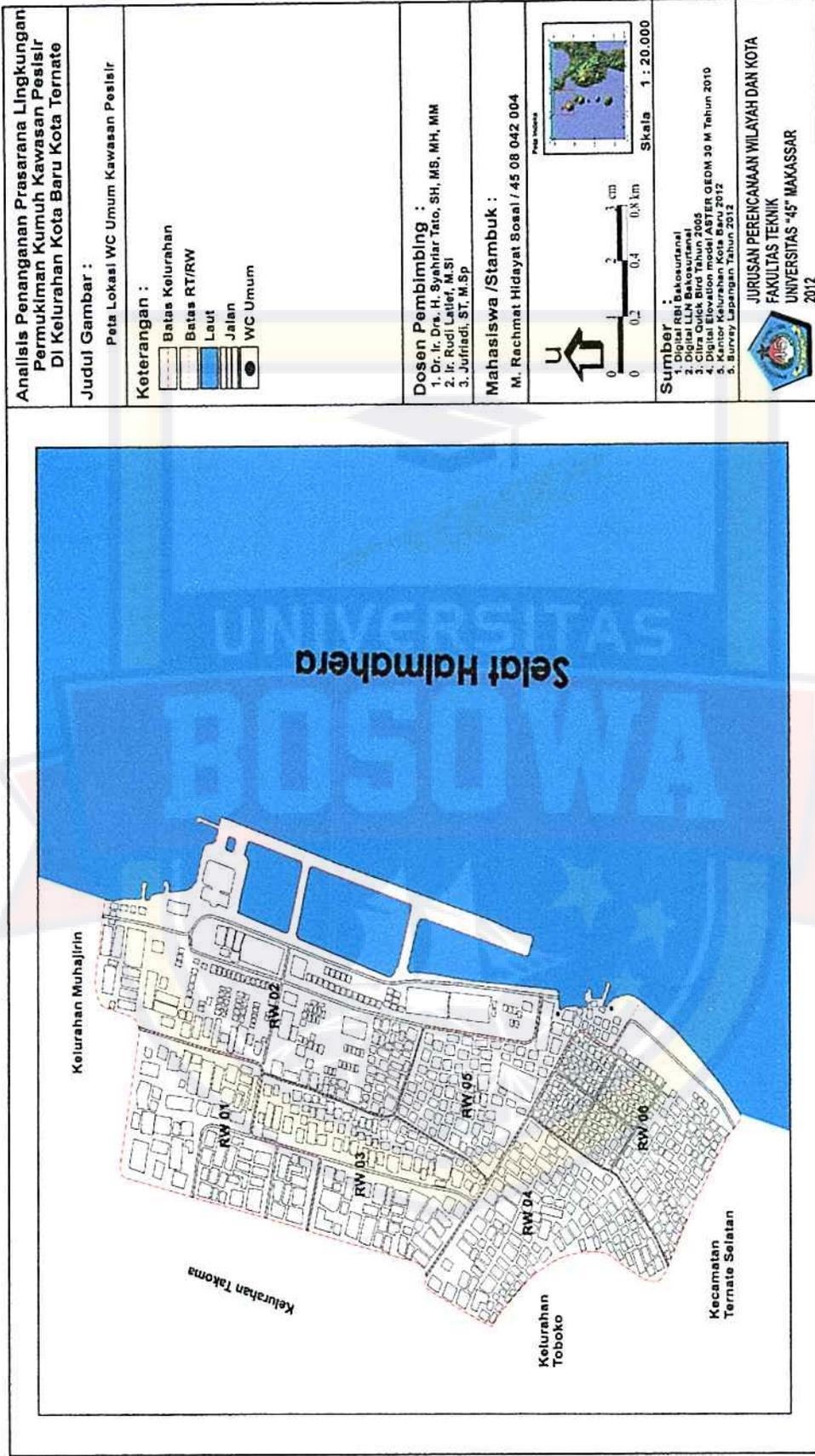
Sumber : Hasil Analisis Survei, 2012

Dari tabel 4.32 menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan MCK individu pada lokasi penelitian dapat dikategorikan sudah baik. Ini dapat dilihat dengan prosentase warga yang telah memiliki MCK individu sebesar 75%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah menyadari pentingnya membuang tinja pada MCK sendiri untuk mencegah pencemaran lingkungan sehingga tidak berbahaya terhadap kesehatan. Sedangkan warga yang tidak mempunyai MCK sendiri dan membuang tinja pada WC umum sebesar 25%. Warga yang masuk dalam kategori ini adalah warga yang bermukim dekat laut. Juga karena faktor ekonomi dan tingkat pendidikan rendah, sehingga mereka tidak tahu dengan membuang tinja di WC umum yang kondisinya tidak layak dan sumber air tidak ada, dapat mencemari lingkungan dan berbahaya pada kesehatan (gambar 4.14).



Gambar 4.14. Kondisi WC yang tidak layak, limbah langsung dibuang di saluran terbuka

Gambar 4.15. Peta Lokasi WC Umum Pada Kawasan Pesisir



4. Prasarana Persampahan

Kebutuhan Ketersediaan prasarana persampahan dalam lingkungan permukiman dapat ditinjau dari jumlah wadah tempat pembuangan sampah berupa TPS serta pengangkutan sampah berupa jumlah fasilitas pengangkut sampah.

Masalah sampah di Kelurahan Kota Baru cukup berpengaruh terhadap kondisi kebersihan lingkungan. Berdasarkan pengamatan pada lokasi penelitian, hanya terdapat 3 unit TPS (container) dan 3 gerobak sampah serta hanya dilayani 1 unit mobil pengangkut sampah, sehingga banyak warga yang tidak terlayani khususnya yang berada pada jalan setapak, sehingga terlihat banyak sampah berserakan di lokasi tersebut.

Sarana persampahan yang ada (TPS) kurang dimanfaatkan oleh responden, ini dikarenakan oleh faktor jarak tempat pembuangan sementara tersebut berada diluar dari lingkungan permukiman dan juga karena faktor tidak adanya sarana pengangkutan sampah dari rumah warga ke tempat pembuangan sementara, sehingga mereka lebih cenderung membuang sampah pada tempat terdekat.



Gambar 4.16. Lokasi TPS yang berada diluar lokasi penelitian

Sebagian warga yang berada di dekat laut juga memanfaatkan laut sebagai tempat pembuangan sampah, dimana hal ini berkaitan erat dengan kebiasaan warga yang selalu masa bodoh tanpa mengiraukan dampak. (gambar 4.17).



Gambar 4.17. Laut yang dimanfaatkan sebagai tempat membuang sampah

Juga pada lahan-lahan kosong disekitar permukiman, dimanfaatkan oleh warga sekitarnya sebagai tempat membuang sampah sehingga membuat lingkungan menjadi kotor (gambar 4.18).

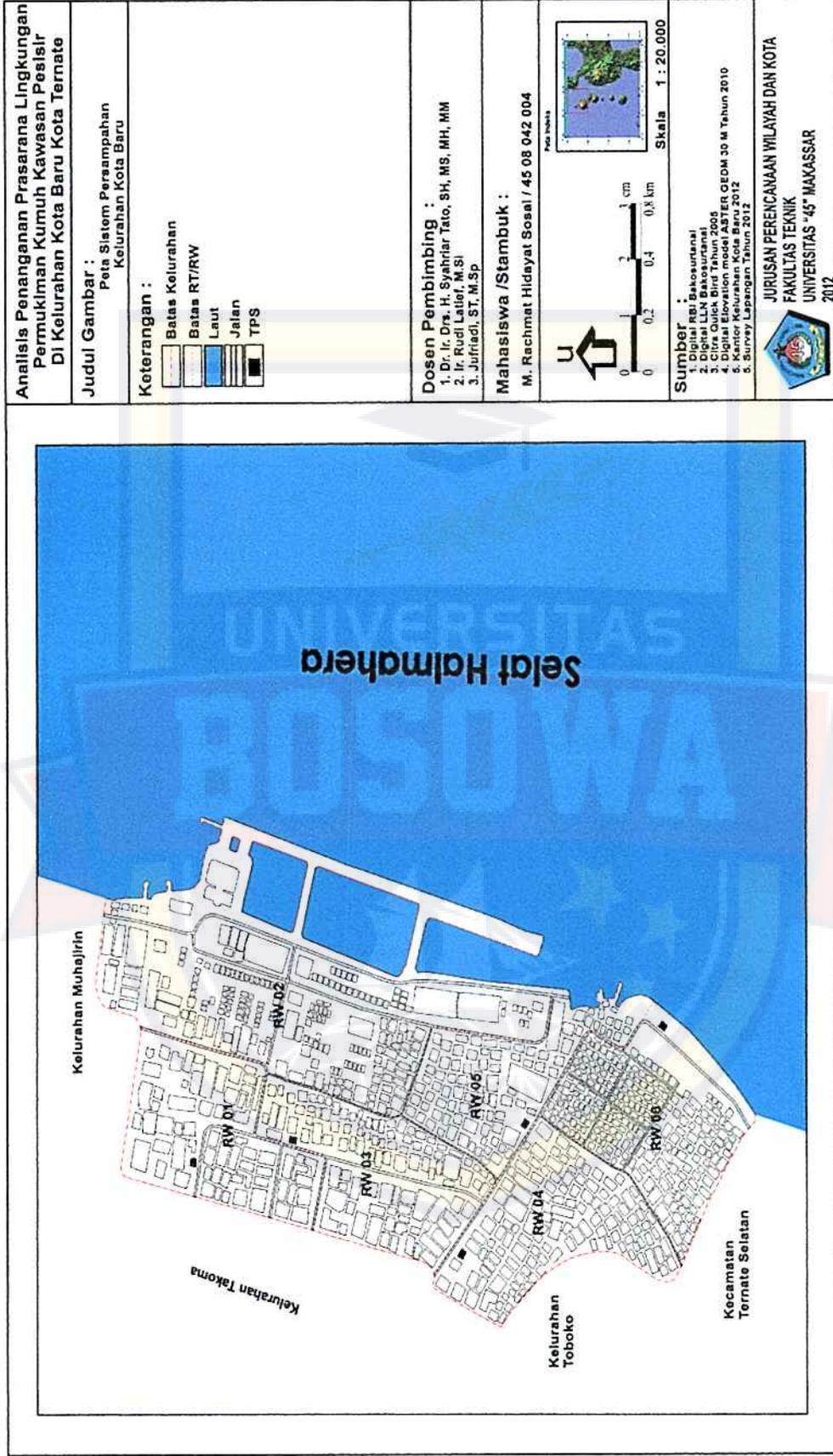


Gambar 4.18. Tumpukan sampah pada lahan kosong

BUSUWA



Gambar 4.19. Peta Sistem Persampahan dalam lingkungan permukiman Kelurahan Kota Baru



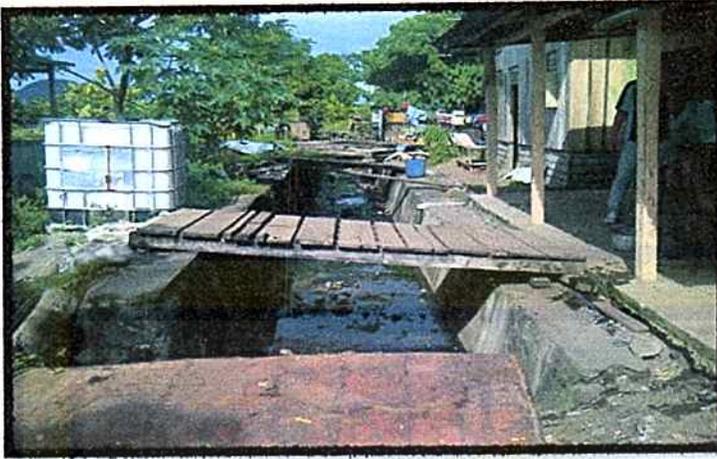
5. Prasarana Drainase

Sesuai pengamatan di lokasi penelitian terdapat saluran primer yaitu sungai, yang selain berfungsi sebagai saluran pembuangan juga dimanfaatkan sebagai tempat membuang sampah oleh warga sepanjang saluran tersebut yang aliran airnya langsung ke laut (gambar 4.20).



Gambar 4.20. Saluran primer (sungai)

Sementara saluran tersier yang ada lingkungan permukiman, pada umumnya tidak dapat berfungsi maksimal, disamping karena dimensi yang tidak sesuai dengan standar juga karena kondisi fisik saluran sudah banyak yang rusak (gambar 4.21).



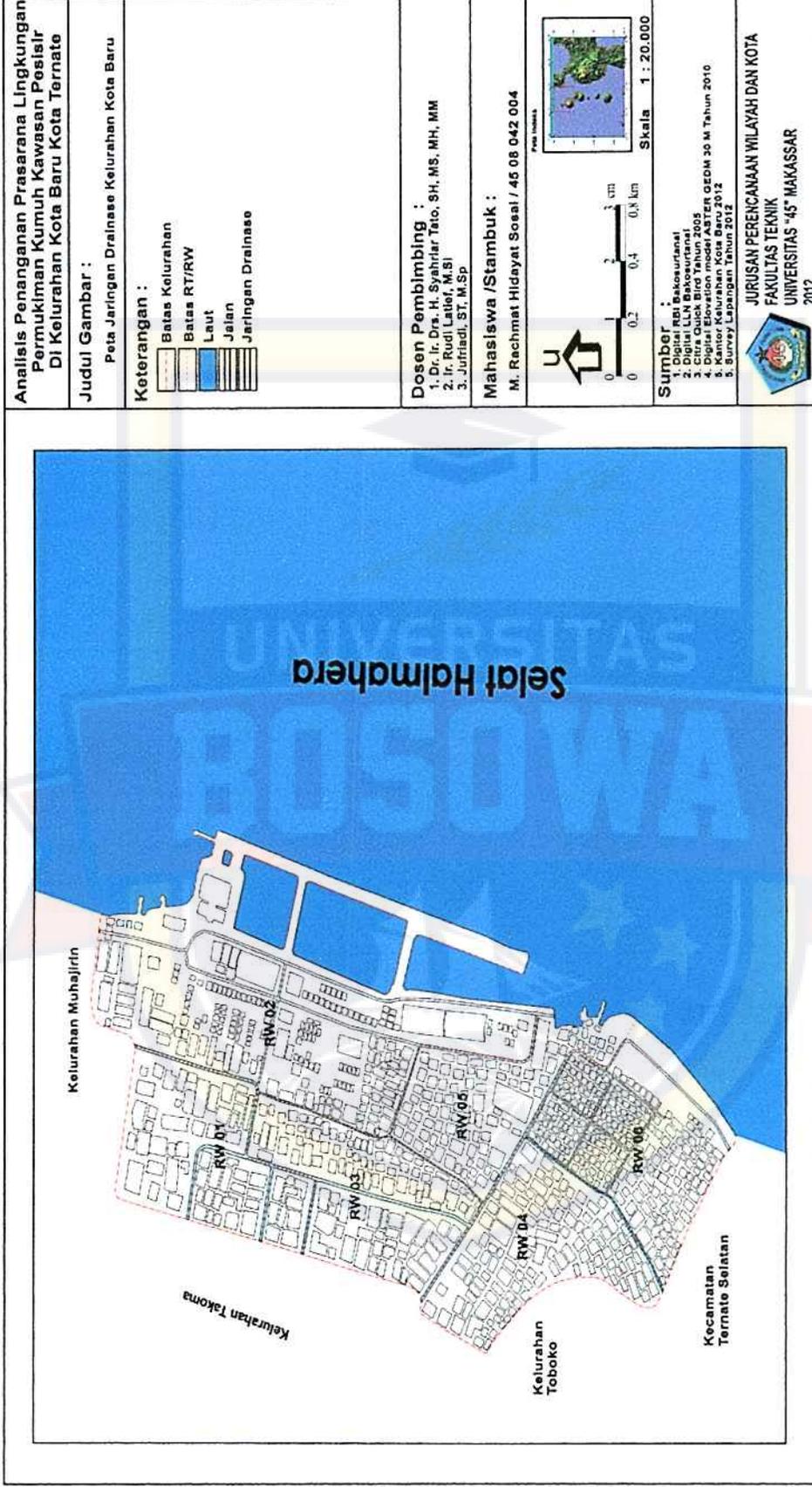
Gambar 4.22. Saluran yang tidak dapat berfungsi maksimal

Saluran yang ada pada kawasan permukiman juga banyak yang tidak berfungsi dikarenakan tingkat kesadaran warga akan kebersihan yang kurang dengan membuang sampahnya pada saluran yang ada, sehingga membuat saluran tersumbat oleh karena adanya tumpukan sampah yang menyumbat pada ujung saluran sehingga air buangan tidak dapat mengalir (gambar 4.23).



Gambar 4.23. Saluran yang tersumbat oleh tumpukan sampah

Gambar 4.24. Peta Jaringan Drainase dalam lingkungan permukiman Kelurahan Kota Baru



Berdasarkan dimensi yaitu lebar drainase, untuk ketersediaan yang ada pada lokasi penelitian dapat dikategorikan tidak memadai. Sesuai pengamatan di lapangan, lebar drainase yang sesuai atau lebih besar dari standar (30 cm) dengan lebar 30 cm sampai dengan 60 cm persentasenya hanya mencapai 36,20%, sementara drainase yang lebarnya lebih kecil dari standar (20 cm) mencapai 63,80%.

Untuk dimensi tinggi atau kedalam drainase yang ada pada lokasi penelitian, yang sesuai atau lebih besar dari standar (40 cm) dengan kedalaman 40 cm sampai dengan 50 cm hanya mencapai 20,17%. Ini menunjukkan bahwa ketersediaannya dikategorikan tidak baik (tabel 4.33).

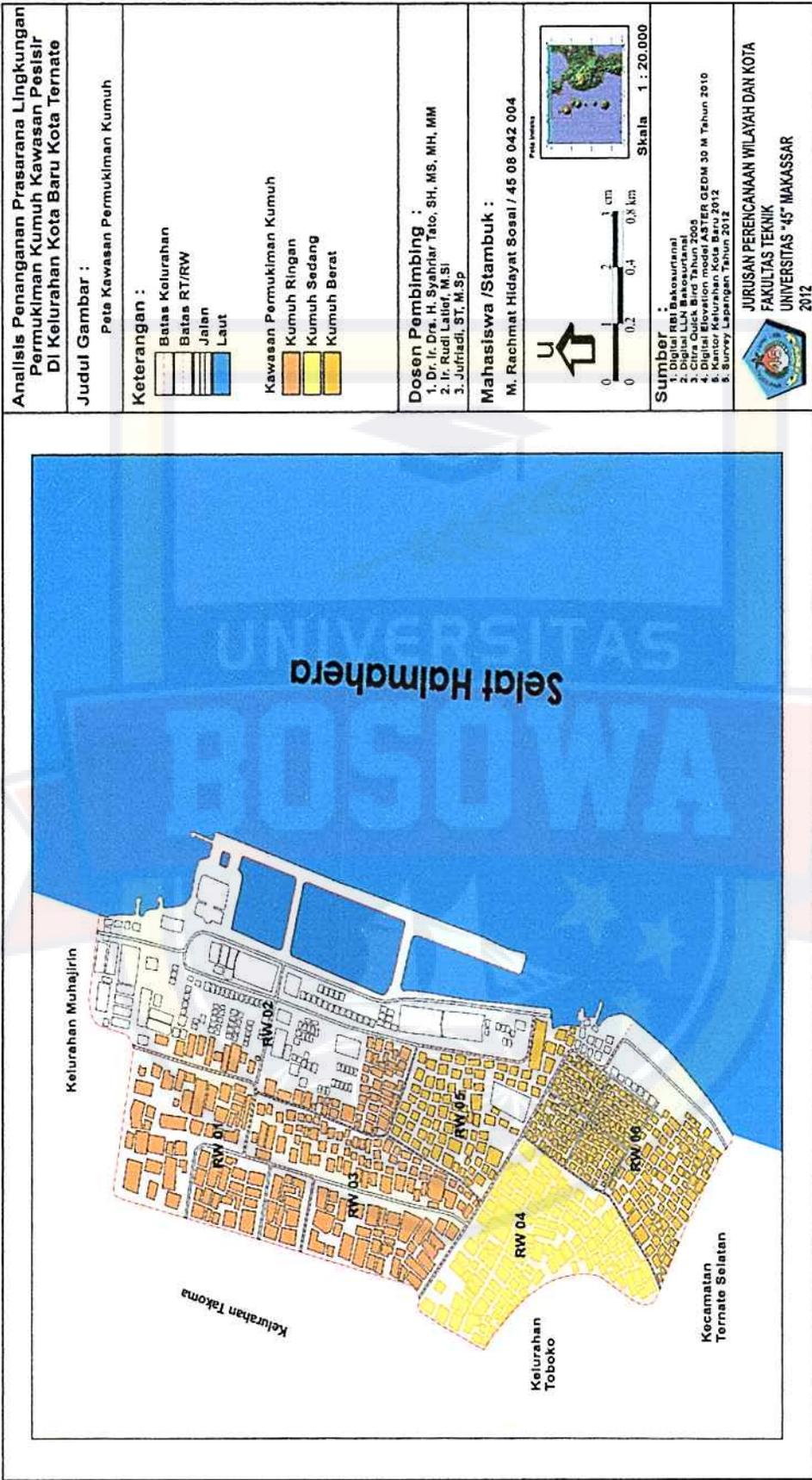
Tabel 4.33. Perbandingan lebar dan tinggi/dalam drainase terhadap standar pelayanan minimum

No	Lebar		Panjang Exist (m)	Persentase Thd Total pjt (%)	Dalam/tinggi		Panjang Exist (m)	Persentase Thd Total pjt (%)
	Esist (m)	Stand (m)			Esist (m)	Stand (m)		
1	0,60	0,30	160	4,42	0,50	0,40	160	4,42
2	0,50	0,30	569	15,75	0,40	0,40	569	15,75
3	0,30	0,30	579	16,03	0,20	0,40	2.885	79,83
4	0,20	0,30	2.306	63,80	-	-	-	-
Jumlah			3.615	100			3615	100

Sumber : Hasil Analisis Survei, 2012

Pada lokasi penelitian masih terdapat kawasan permukiman yang tidak mempunyai saluran pembuangan. Juga pada jalan lingkungan yang ada, hanya sebagian saja yang mempunyai saluran pada dua sisinya, sehingga permukiman yang tidak mempunyai saluran pembuangan utamanya permukiman daerah padat mengakibatkan air buangan tidak dapat mengalir yang pada akhirnya menimbulkan genangan di kawasan tersebut.

Gambar 4.25. Peta Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Kota Baru



4.4 Program Penanganan Prasarana Lingkungan Permukiman Kumuh yang Telah di Lakukan di Lokasi Penelitian

1. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh

Pada Tahun Anggaran 2005/2006, di Kelurahan Kota Baru mendapat alokasi dana dari pusat melalui proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan yang diarahkan pada lokasi permukiman kumuh di RW 04, RW 05 dan RW 06. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembuatan jalan setapak dengan konstruksi paving block, saluran air hujan/drainase, pemasangan prasarana air minum dan pengadaan prasarana persampahan. Tabel berikut menunjukkan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kelurahan Kota Baru.

Tabel 4.34. Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan yang telah dilaksanakan pada tahun 2005/2006 di Kel. Kota Baru

No	Jenis Kegiatan	Volume (m)
1	Jalan setapak	1.055
2	Saluran air hujan/drainase	
	a. Kedalam Saluran 2,35 m	780
	b. Jarak Tepi saluran 42 m	822
3	Pengadaan pemasangan pipa	
	a. PVC diameter 75 mm	1.200
	b. PVC diameter 50 mm	1.400
4	Pengadaan landasan container	1 (buah)

Sumber : Kantor Kelurahan Kota Baru Tahun 2012

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian selama proses penelitian, sebagian besar masih berfungsi dengan baik, tetapi sebagian yang lain sudah ada yang mengalami kerusakan seperti material perkerasan pada jalan setapak sudah banyak yang rusak, juga saluran air

hujan. Hal ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan warga di sekitarnya, mengatakan bahwa kondisi kerusakan ini terjadi sekitar tahun ketiga setelah masa penyelesaian proyek, namun selanjutnya dilakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

2. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Berdasarkan data yang didapatkan pada lokasi penelitian bahwa Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ada sejak tahun 2003, namun untuk Kelurahan Kota Baru baru pada tahun 2007 mendapatkan program tersebut. Adapun pelaksanaan program yang telah dilakukan melalui kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang dibagi dalam dua program yaitu program fisik lingkungan berupa : perbaikan jalan setapak, saluran air hujan/drainase, prasarana kesehatan dan prasarana air minum serta program non fisik berupa : bantuan dana sosial dan ekonomi. Untuk lebih jelasnya program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah dilakukan di Kelurahan Kota Baru sejak tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.35. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) pada tahun 2007 di Lokasi Penelitian

No	Nama Kegiatan	Volume (m)	Lokasi
1	Jalan setapak (Paving)	98	RW VI
2	Saluran air hujan/drainase Diameter 0,50 m	172	RW V
3	Jalan setapak (Paving)	105	RW IV
4	Pembangunan Posyandu	1 (unit)	RW VI
5	Penimbunan Jalan setapak	130	RW VI
6	Hidran Umum	1 (Unit)	RW IV

Sumber : BKM Kelurahan Kota Baru Tahun 2012

Tabel 4.36. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) pada tahun 2008 di Lokasi Penelitian

No	Nama Kegiatan	Volume (m)	Lokasi
1	Jalan setapak (Paving)	68	RW VI
2	Jalan setapak (Paving)	100	RW V
3	Jalan setapak (Paving)	82	RW IV
4	Jalan setapak (Beton)	80	RW V
5	Jalan setapak (Paving)	78	RW VI

Sumber : BKM Kelurahan Kota Baru Tahun 2012

Tabel 4.37. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) pada tahun 2009 di Lokasi Penelitian

No	Nama Kegiatan	Volume (m)	Lokasi
1	Jalan setapak (Beton)	80	RW VI
2	Lampu Jalan	5 (buah)	RW IV
3	Lampu Jalan	5 (buah)	RW VI
4	Gerobak Sampah	2 Unit	Kel. Kota Baru

Sumber : BKM Kelurahan Kota Baru Tahun 2012

Tabel 4.38. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) pada tahun 2010 di Lokasi Penelitian

No	Nama Kegiatan	Volume (m)	Lokasi
1	Jalan setapak (Paving)	86	RW IV
2	Jalan setapak (Paving)	80	RW V
3	Jalan setapak (Paving)	92	RW VI

Sumber : BKM Kelurahan Kota Baru Tahun 2012

3. Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project* (NUSSP)

Sejak dimulainya program ini yakni tahun 2005, dana dari APBN dan APBD yang telah terserap untuk pelaksanaan NUSSP sebesar Rp. 178,4 milyar serta dana hasil swadaya masyarakat sebesar Rp. 3,2 juta yang dilakukan di 458 Kelurahan dengan luasan kawasan kumuh yang ditangani 6.143 hektar. Sementara itu hingga 2009, ditargetkan program NUSSP bisa menjangkau sebanyak 841 Kelurahan/Desa di 32 Kabupaten/Kota dengan luasan kawasan kumuh yang ditangani mencapai seluas 2.400 hektar dan melayani sekitar 480 ribu kepala keluarga miskin.

Sedangkan untuk Kelurahan Kota Baru program ini baru bergulir pada tahun 2008 dan telah menangani beberapa infrastruktur diantaranya perbaikan jalan setapak, pembangunan drainase dan pengadaan lampu jalan. Untuk lebih jelas mengenai program yang telah dilaksanakan melalui NUSSP dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.39. Kegiatan *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project* (NUSSP) pada tahun 2008 di Lokasi Penelitian

No	Nama Kegiatan	Volume (m)	Lokasi
1	Jalan setapak (Paving)	70	RW V
2	Jalan setapak (Paving)	74	RW VI
3	Lampu Jalan	5 (buah)	RW IV

Sumber : BKM Kelurahan Kota Baru Tahun 2012

Tabel 4.40. Kegiatan *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project* (NUSSP) pada tahun 2009 di Lokasi Penelitian

No	Nama Kegiatan	Volume (m)	Lokasi
1	Jalan setapak (Paving)	80	RW V
2	Jalan setapak (Paving)	74	RW VI
3	Jalan setapak (Paving)	86	RW VI

Sumber : BKM Kelurahan Kota Baru Tahun 2012

Tabel 4.41. Kegiatan *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project* (NUSSP) pada tahun 2010 di Lokasi Penelitian

No	Nama Kegiatan	Volume (m)	Lokasi
1	Saluran air hujan/drainase Diameter 0,30 m	122	RW VI
2	Jalan setapak (Paving)	76	RW V
3	Saluran air hujan/drainase Diameter 0,30 m	160	RW VI

Sumber : BKM Kelurahan Kota Baru Tahun 2012

4. Program Dukungan PSD Kawasan Permukiman Kumuh

Program dukungan PSD Kawasan Permukiman Kumuh ini adalah program Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan salah satu program untuk penanganan kawasan permukiman kumuh. Di Kelurahan Kota Baru program ini telah menangani perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan saluran air hujan/drainase.

Tabel 4.42. Program PSD Kawasan Permukiman Kumuh pada Tahun 2008 di Lokasi Penelitian

No	Nama Kegiatan	Volume (m)	Lokasi
1	Jalan Lingkungan (Paving)	250	RW V

Sumber : BKM Kelurahan Kota Baru Tahun 2012

Tabel 4.43. Program PSD Kawasan Permukiman Kumuh pada Tahun 2009 di Lokasi Penelitian

No	Nama Kegiatan	Volume (m)	Lokasi
1	Saluran air hujan/drainase Diameter 0,50 m	265	RW VI

Sumber : BKM Kelurahan Kota Baru Tahun 2012

Program penanganan kawasan permukiman kumuh yang telah di Kelurahan Kota Baru memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap peningkatan kualitas lingkungan khususnya pengadaan/pembangunan prasarana dasar kawasan permukiman seperti prasarana jalan, drainase, air minum dan prasarana persampahan sebagaimana yang terlihat pada tabel diatas.

4.5. Analisis Penanganan Prasarana terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh kawasan pesisir.

Analisis penanganan prasarana terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh kawasan Pesisir serta manfaatnya terhadap kegiatan sosial ekonomi dapat dilihat pada tabel matriks berikut ini :

Tabel 4.44. Matriks Penanganan dan manfaat yang terjadi dari prasarana lingkungan permukiman di Kelurahan Kota Baru

N O	PRASARANA	KEBUTUHAN	PENANGANAN			EVALUASI	FAKTOR PENGARUH	MANFAAT TERJADI
			EXISTING	STANDAR NSPM	PENANGANAN			
1.	Jalan - Lingkungan	Peningkatan fisik Permukaan jalan dan lebar badan jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan 1.226 meter - Lebar badan jalan 4 m – 6 m - Lebar perkerasan 4 m – 5 m - Material Aspal 	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan 300 m-450 m - Lebar badan jalan 3,5 m-5 m - Lebar perkerasan 3 m – 4,5 m - Perkerasan seluruh panjang jalan - Panjang jalan 375m-825 m - Lebar badan jalan 2m – 3,5 m - Lebar perkerasan 1,5m - Perkerasan seluruh panjang jalan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kualitas Lingkr : <ul style="list-style-type: none"> - Jalan setapak sepanjang 1.055 meter 2. Program P2KP : <ul style="list-style-type: none"> - Jalan setapak sepanjang 998 meter 3. Program NUSSP: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan setapak sepanjang 460 meter 4. Program PSD : <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Lingkr. sepanjang 250 meter 	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan Prasarana jalan pada lokasi penelitian sangat baik dimana panjang jalan telah ditangani yaitu 2.845 m dari total panjang jalan 4.071 m, sisanya tersebut sudah tangani lebih dulu. Jadi prasarana jalan hanya membutuhkan pemeliharaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat - Kegiatan/ aktifitas masy. berlangsung diluar Lingkungan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perekonomian dapat berjalan - Akses transportasi menjadi lancar di dalam maupun keluar permukiman - Terciptanya lapangan pekerjaan, misalnya dengan Membuka usaha warung - Meningkatkan pendapatan masy. dgn terciptanya lap. pekerjaan - Pencapaian ke tempat Pelayanan kesehatan dapat di
	- Setapak							

	Air bersih	Penyediaan air bersih bagi penduduk yang tidak terlayani dari PDAM dengan menyediakan hidran umum	Sumber air bersih dari sambungan PDAM dan sumur dangkal	Pondok air bersih terlayani dalam lingkungan permukiman	1. Program Peningkatan Kualitas Lingkar : Pemasangan PVC diameter 75 mm panjang 1.200 m dan PVC diameter 50 mm panjang 1.400 meter 2. Program P2KP : Hidran Umum 1 Unit	Penanganan Prasarana Air Minum cukup baik dimana jumlah pelanggan yang menggunakan sumber air dari PDAM sebesar 71,15% sedangkan menurut standar yaitu antara 55-75%	Penduduk yang tidak terlayani karena faktor ekonomi	jangkau setiap saat
2.	Air bersih	Penyediaan air bersih bagi penduduk yang tidak terlayani dari PDAM dengan menyediakan hidran umum	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber air bersih dari sambungan PDAM dan sumur dangkal - Responden yang terlayani sambungan rumah 71,15% - Waktu pengaliran 24 jam 	<ul style="list-style-type: none"> - Penduduk air bersih terlayani dalam lingkungan permukiman 55-75% - 30 s/d 60 ltr/org/hr dengan sistem perpipaan 	<p>1. Program Peningkatan Kualitas Lingkar : Pemasangan PVC diameter 75 mm panjang 1.200 m dan PVC diameter 50 mm panjang 1.400 meter</p> <p>2. Program P2KP : Hidran Umum 1 Unit</p>	Penanganan Prasarana Air Minum cukup baik dimana jumlah pelanggan yang menggunakan sumber air dari PDAM sebesar 71,15% sedangkan menurut standar yaitu antara 55-75%	Penduduk yang tidak terlayani karena faktor ekonomi	jangkau setiap saat <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih tersedia dalam lingkungan permukiman - Kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan sehari-hari terpenuhi - Air bersih yang ada memenuhi standar konsumsi
3.	Air limbah	Penyediaan Septik tank komunal pada permukiman yang belum memiliki MCK secara individu	<ul style="list-style-type: none"> - MCK individu (dirumah) terdapat 75% - WC umum 1 unit 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 s/d 4 unit MCK/ kampung atau 12 KK per-unit. - Presentase penduduk terlayani 50 s/d 70% 		Penanganan Prasarana Limbah di kategorikan cukup baik ini dilihat dari presentase warga yang memiliki MCK yaitu 75%	- MCK sebagian besar terdapat pada rumah	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas lingkungan menjadi lebih baik dengan kepemilikan MCK individu
4.	Drainase	Pembangunan drainase sesuai dengan standar dan pada dua sisi jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang drainase yang ada 3.615 m - Lebar saluran 0,20 m- 0,60 m 	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang drainase 120 m - 250 m/Ha - Lebar saluran 0,30 m - 1 m - Dalam/tinggi 	1. Program Peningkatan Kualitas Lingkar : Saluran air hujan/drainase diameter 0,30 m	Penanganan Prasarana Drainase dikategorikan belum baik karena masih	- Drainase yang ada tidak sesuai standar dan OP yang kurang dari masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Belum

				saluran 0,40 m	sepanjang 395 & diameter 0,50 m panjang 411 meter	sering terjadi genangan akibat dari drainase yang ada dan masih ada warga yang membuat sampah ke drainase	seperuhnya terbangun saluran pada dua sisi jalan
					2. Program P2KP : - Pembangunan Saluran Drainase sepanjang 172 meter		- Terbangunnya drainase pada sekitar daerah permukiman
					3. Program NUSSP: - Pembangunan Saluran Drainase sepanjang 282 meter		- Tidak ada genangan pada daerah yang terdapat drainase dan sesuai dimensi
					4. Program PSD : - Pembangunan Saluran Drainase sepanjang 265 Meter		
					1. Program Peningkatan Kualitas Lingkr : - Pengadaan landasan container sebanyak 1 unit	Penanganan prasarana persampahan dikategorikan belum baik dimana masih kurang sarana	
					- Bak penampungan 6m ³ /2 Ha. - Jarak dari tempat tinggal 50-100 m - Diangkut 2 kali		
					- TPS 3 unit di luar lokasi penelitian - Gerobak 3 Unit - 1 Unit Mobil Truk Pengangkut		
					Penyediaan gerobak sampah sebagai sarana pengangkut sampah dari rumah warga ke TPS		
5.	Persampahan						- Tempat pembuangan sementara tidak tersedia dalam lingk. Permukiman - Warga

			seminggu	2. Program P2KP : - Pengadaan Gerobak Sampah 2 Unit	dan prasarana persampahan		memanfaatkan daerah sekitar sebagai tempat membuang sampah. - Lingkungan menjadi bersih dan sehat pada daerah sekitar tempat pembuangan sampah
--	--	--	----------	--	------------------------------	--	---

4.6. Rencana pengembangan kebutuhan prasarana

Tahun 2012 - 2030

1. Air Minum

Tabel 4.45 Proyeksi Kebutuhan Air Minum
Di Kelurahan Kota Baru (RW 04,05, 06)

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Minum (Liter/Detik)	Standar Kebutuhan
1	2007	8,948	536,880	1 Orang Penduduk Membutuhkan 60 Liter Air / Hari
2	2008	9,624	577,440	
3	2009	9,969	598,140	
4	2010	10,790	647,400	
5	2011	11,078	664,680	
6	2012	11,685	701,100	
7	2013	12,326	739,560	
8	2014	13,002	780,120	
9	2015	13,715	822,900	
10	2016	14,467	868,020	
11	2017	15,260	915,600	
12	2018	16,097	965,820	
13	2019	16,980	1,018,800	
14	2020	17,911	1,074,660	
15	2021	18,893	1,133,580	
16	2022	19,929	1,195,740	
17	2023	21,022	1,261,320	
18	2024	22,174	1,330,440	
19	2025	23,390	1,403,400	
20	2026	24,673	1,480,380	
21	2027	26,026	1,561,560	
22	2028	27,453	1,647,180	
23	2029	28,958	1,737,480	
24	2030	30,546	1,832,760	

Sumber : Hasil Analisis 2012

2. Prasarana Drainase

Tabel 4.46 Pengembangan Kebutuhan Prasarana Drainase
Di Kelurahan Kota Baru (RW 04,05, 06)

No	Kondisi drainase (m)	Standar Pelayanan Minum (m)	Kekurangan	Keterangan
1.	3615 m	Standar 120-250m/ha	26.385 m/ha	Perlu Penambahan Panjang Drainase untuk Tahun kedepan

Sumber : Hasil Analisis 2012

3. Prasarana Persampahan

Tabel 4.47 Pengembangan Kebutuhan Prasarana Persampahan
Di Kelurahan Kota Baru (RW 04,05, 06)

No	Kondisi Eksisting TPS	Standar Pelayanan Minum (m)	Kekurangan	Keterangan
1.	7 unit	standar 500-1.000m	5 unit	Perlu Pembahan TPS untuk tahun yang akan datang

Sumber : Hasil Analisis 2012

4. Air Limbah

Tabel 4.48 Pengembangan Kebutuhan Kepemilikan MCK
Di Kelurahan Kota Baru (RW 04,05, 06)

No	Kondisi MCK di lokasi penelitian	Standar Pelayanan Minum (m)	Kekurangan	Keterangan
1.	42 %	76-100 %	34%	Jumlah MCK yng tersedia antara 42 % dari jumlah KK

Sumber : Hasil Analisis 2012

4.7. Prasarana Lingkungan Yang Menjadi Prioritas

Pada kawasan penelitian (RW 04, 05, 06) prioritas utama menurut Tabel 4.46 kekurangan sekitar 26.385 m/ha prasarana drainase, ini menyebabkan lokasi penelitian sering terjadi banjir sehingga di prioritaskan untuk pengembangan drainase sekaligus untuk

mengantisipasi banjir pada musim hujan. Dan prasarana air bersih tabel 4.45 merupakan prioritas kedua dimana kebutuhan air minum di kawasan penelitian saat ini masih terasa kurang dimana masyarakat susah untuk mendapatkan air bersih disamping itu masyarakat rata-rata ekonomi rendah tidak mampu membeli air minum.





BAB 5 PENUTUP

**ANALISIS PENANGANAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PESISIR
DI KELURAHAN KOTA BARU
KOTA TERNATE**



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Analisis penanganan prasarana lingkungan permukiman di lokasi penelitian yang telah dilakukan melalui program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh, P2KP, NUSPP, Dukungan PSD Kawasan Permukiman Kumuh adalah :

- Penanganan prasarana jalan dikategorikan sangat baik terutama dilihat dari kondisi jalan, panjang jalan, sedangkan sisanya tersebut sudah ditangani sejak dulu melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kota, namun sebagian kondisinya memerlukan pemeliharaan.
- Penanganan prasarana air minum dikategorikan cukup baik dimana jumlah masyarakat yang mengkonsumsi air minum yang bersumber dari PDAM sedangkan sebagian warga yang tidak terlayani sambungan dari PDAM menggunakan sumur dan membeli.
- Penanganan prasarana drainase dikategorikan belum baik terutama dilihat dari kondisi jaringan drainase dimana lebar drainase yang sesuai atau lebih besar dari standar (30 cm) dengan lebar 30 cm sampai dengan 60 cm, sementara drainase yang lebarnya lebih kecil dari standar (20 cm), sehingga mengakibatkan masih seringnya terjadi genangan.

- Penanganan prasarana persampahan dikategorikan belum baik, dimana masih terdapat masyarakat membuang sampah pada lahan kosong sekitar permukiman yang diakibatkan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung khususnya pada lingkungan permukiman yang berada pada ruas jalan setapak.
- Penanganan prasarana limbah dikategorikan cukup baik ini dapat dilihat dari presentase warga yang telah memiliki MCK individu, sedangkan warga yang tidak mempunyai MCK sendiri dan membuang tinja pada WC umum. Warga yang masuk dalam kategori ini adalah warga yang bermukim dekat sungai dan laut.

5.2 Saran

Dalam penanganan prasarana kawasan permukiman kumuh tersebut diharapkan :

- Sebaiknya dibangun saluran drainase pada dua sisi jalan dan sesuai standar yang ada, sehingga tidak akan menimbulkan genangan akibat limbah dari rumah tangga dan air hujan.
- Perlu dibuatkan septictank komunal bagi masyarakat yang belum memiliki MCK individu sehingga mereka tidak lagi membuang air di WC umum yang tidak layak.
- Perlu penyediaan gerobak sampah sebagai sarana pengangkut sampah dari rumah warga ke tempat pembuangan sementara.
- Diperlukan keterlibatan dan kesadaran masyarakat untuk memelihara prasarana yang sudah ada.



DAFTAR PUSTAKA

**ANALISIS PENANGANAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PESISIR
DI KELURAHAN KOTA BARU
KOTA TERNATE**



DAFTAR PUSTAKA

- Adismita. R. 2006. *Permukiman Kumuh di Perkotaan*, Unhas Press, Makassar
- Arikunto S, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Perkotaan dan Wilayah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Anonim, 2002, *Konsep Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kekumuhan*, Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta
- Atmaprawira. F.H., 2004, *Penampilan Visual Perumahan dan Permukiman*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota No. 12 Edisi April 2004, LPP Bandung
- Budihardjo E. 1997. *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Alumni, Bandung.
- Bryant, C. & White, L.G, 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Departemen Kimpraswil, Kepmen Kimpraswil Nomor 534/KPTS/M/2001, *Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM)*, Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum, 1997, *Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota*, Jakarta.
- Dirjen Perumahan dan Permukiman, Departemen Kimpraswil, 2002, *Identifikasi Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh*, Jakarta.
- Gilber Alam. 2007. *Urbanisasi dan Kemiskinan*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta
- Koestoer. dkk, 1995, *Perspektif Lingkungan Desa-Kota*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Komarudin, 1997, *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, Yayasan Realestate Indonesia, Jakarta.
- Panudju B, 1999, *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Alumni, Bandung.

- Parlindungan, 2001, *Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman dan Undang-Undang Rumah Susun*, Mandar Maju, Bandung.
- Rudi Y, 2000, *Upaya Pemahaman Standart Kekumuhan Berdasarkan Jenis Dan Model Permukiman Kumuh Di Surabaya*, Tesis Prodi Arsitektur, ITS Surabaya.
- Silas. J, 2000, *Rumah Produktif dalam Dimensi Tradisional dan Pemberdayaan*, FTSP Jurusan Teknik Arsitektur ITS, Surabaya.
- Sogiyono. 2004. *Statistik Untuk Penelitian*. CV. Alfabeta, Bandung
- Sinulingga. D.B. 1999. *Pembangunan Kota "Tinjauan Regional dan Lokal"*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Sudjana N, 1992, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- , 2005. *Metoda dan Teknik Partisipatif*. Falah Production. Bandung.
- Sumampouw. I. F, 2003, *Identifikasi Tingkat Kekumuhan dan Upaya Penataan Permukiman di Kota Manado*, Tesis Prodi MAP. PPS. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Undang – Undang Repuplik Indonesia No. 4 Tahun 1992, *Tentang Perumahan dan Permukiman*, Jakarta
- Wunas, S, 2003. *Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perkotaan*, Makalah disajikan dalam Pelatihan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pembangunan, Kota Parepare
- Yudohusodo S, dkk, 1991, *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, Inkoppol, Jakarta.
-



LAMPIRAN

**ANALISIS PENANGANAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PESISIR
DI KELURAHAN KOTA BARU
KOTA TERNATE**



FORMULIR KUESIONER UNTUK RESPONDEN

Angket/Kuesioner ini adalah untuk mengungkap permasalahan-permasalahan mengenai karakteristik permukiman kumuh kawasan pesisir di Kelurahan Kota Baru Kota Ternate, untuk keperluan penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, sangat diharapkan jawaban yang benar-benar obyektif dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Jika jawaban yang sudah disediakan dianggap sesuai, maka Bapak/Ibu dapat memberi tanda silang (X) pada jawaban tersebut di bawah ini.

Judul Penelitian : "Analisis Penanganan Prasarana Lingkungan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir di Kelurahan Kota Baru"

Mahasiswa / STB : M. Rachmat Hidayat Sosal /45 08 042 004

Perguruan Tinggi : Universitas 45 Makassar (Perencanaan Wilayah & Kota)

1. Hari / tanggal : /
2. RT/RW :
3. Kelurahan :

Isilah daftar pertanyaan berikut dengan cara :

- Memberi tanda silang (a b d e) pada jawaban yang tersedia.
- Memberi tanda check list () pada kotak yang tersedia.
- Mengisi titik-titik yang tersedia.

Atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar pertanyaan ini, kami ucapkan terima kasih.

DATA RESPONDEN

1. No. Angket :
2. Asal daerah/suku:
3. Usia RespondenTahun
4. Pekerjaan:
 - a. Wiraswasta
 - b. Buruh
 - c. Pegawai negeri / swasta
 - d. Lainnya, sebutkan
5. Pendidikan tertinggi:
 - a. Tidak sekolah
 - b. SD
 - c. SMP
 - d. SMA
 - e. Sarjana S2 S1
 - D3 D2 D1
6. Berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal serumah?
 - a. 3 Orang
 - b. 4 Orang
 - c. 5 Orang lebih dari 5 Orang
 - d. Lebih dari 5 Orang
7. Pendapatan per bulan:
 - a. < Rp. 250.000
 - b. Rp. 250.000 – Rp. 500.000
 - c. Rp. 500.001 – Rp. 750.000
 - d. Rp. 750.001– 1.000.000
 - e. > Rp. 1.000.000

PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1. Sumber air bersih berasal dari mana?
 - a. PDAM
 - b. Air sumur
 - c. Air hujan
2. Bagaimana kelancaran air mengalir (dari PDAM) dalam sehari?
 - a. Setiap saat (24 jam)
 - b. Selama 12 jam
 - c. Selama 6 jam
 - d. Tidak tentu waktunya
3. Berapa rata – rata pemakaian air anda dalam sehari?
 - a. Kuarang dari 100 liter
 - b. 100 – 200 liter
 - c. 200 – 300 liter
 - d. lebih dari 300 liter

4. Bagaimana kualitas air (dari PDAM) dan sumur?
 - a. Bau
 - b. Tidak Bau
 - c. Jernih
 - d. Keruh
5. Apa alasannya sehingga tidak memiliki sambungan rumah?
 - a. Belum ada jaringan distribusi PDAM
 - b. Biaya pengadaan yang tidak terjangkau
 - c. Kurang perlu karena masih ada sumber air bersih lain (air sumur)
6. Apakah sudah memiliki MCK rumah tangga?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
7. Jika tidak ada, MCK rumah tangga, dimana anda membuang air besar/air kecil?
 - a. MCK umum
 - b. Lainnya,
8. Dimana anda mandi, mencuci dan buang air besar/kecil?
 - a. Rumah sendiri
 - b. MCK umum
 - c. Lainnya,
9. Bagaimana pengaliran drainase pada musim hujan?
 - a. Lancar
 - b. Kurang Lancar
 - c. Tidak Mengalir
10. Dimana anda membuang sampah rumah tangga?
 - a. TPS
 - b. Saluran air hujan
 - c. Lahan kosong di pekarangan
11. Bagaimana cara pengangkutan sampah ke TPS?
 - a. Dibawa sendiri (jalan kaki/kendaraan)
 - b. Oleh petugas (dengan gerobak)
12. Setiap berapa harikah anda membuang sampah ke TPS:
 - a. Tiap hari
 - b. 2 hari sekali
 - c. Seminggu sekali
13. Apa tujuan anda melewati jalan yang telah dibangun?
 - a. Tempat Kerja
 - b. Pasar
 - c. Lainnya.....
14. Anda ketempat kerja menggunakan sarana apa?
 - a. Mobil
 - b. Motor
 - c. Lainnya.....
15. Bagaimana menurut anda tentang program penanganan yang dilakukan oleh oleh :
 - P2KP.....
 - NUSSP
 - Dan program lainnya

16. Menurut anda, apa yang perlu dibenahi terhadap prasarana lingkungan permukiman yang ada?

.....
.....
.....
..... (tuliskan)

PERAN SERTA MASYARAKAT

1. Bentuk partisipasi apa yang dapat anda sumbangkan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana lingkungan yang ada?
a. Tenaga b. Uang c. Keduanya
2. Bila bentuk partisipasinya tenaga dalam perbaikan prasarana yang ada:
a. Sukarela b. Digaji c. Tidak peduli
3. Frekuensi kerja bakti (bersih-bersih) dalam rangka pemeliharaannya:
a. Tiap minggu b. Tiap bulan c. Tidak peduli
4. Dari mana sumber dana untuk pemeliharaan prasarana di lingkungan anda?
a. Swadaya b. Pemerintah c. Swasta d. Ketiganya
5. Bila ada sumber dana dari swadaya masyarakat dalam bentuk iuran?
a. Tiap minggu b. Tiap bulan c. Tidak peduli
6. Menurut anda apa yang perlu dibenahi tentang partisipasi masyarakat yang ada?

.....
.....
.....
..... (tuliskan)



